

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Dokumen Evaluasi
Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)
Kabupaten Tuban Tahun 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian Pengembangan
Kabupaten Tuban

Direktorat Kerjasama dan
Pengelolaan Usaha (DKPU)
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya **LAPORAN AKHIR** Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban 2023.

Penyusunan dokumen ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tuban dalam pemantauan (monitoring) dan evaluasi capaian SDGs, sebagaimana yang telah dituangkan pada Rencana Aksi Daerah tahun 2023 dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Tuban. Hasil pemantauan (monitoring) tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan, regulasi, dan program yang tepat sesuai dengan kewenangannya.

Laporan ini membahas metodologi, capaian SDGs dan evaluasi program terkait SDGs, serta rekomendasi dan kesimpulan. Penyusunan dokumen ini merupakan upaya mengetahui capaian indikator SDGs di Kabupaten Tuban tahun 2023. Pembangunan SDGs terdiri atas 17 tujuan yang terbagi atas 4 (empat) pilar, yaitu: (1) pembangunan manusia diantaranya pendidikan dan Kesehatan, (2) ekonomi, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi, (3) lingkungan, berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik, dan (4) hukum dan tata kelola. Hasil evaluasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan pihak lain dalam menyusun program/kegiatan mendatang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung untuk terselesaikannya laporan ini.

Tuban, September 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	II-1
1.1 Latar Belakang	II-1
1.2 Maksud dan Tujuan	II-2
1.2.1 Maksud	II-2
1.2.2 Tujuan	II-3
1.3 Ruang Lingkup	II-3
1.4 Dasar Hukum	II-3
1.5 Sistematika Laporan	II-4
BAB II METODOLOGI	II-1
2.1 Pengumpulan Data	II-1
2.2 Kebutuhan Data	II-3
2.3 Metode Analisis	II-13
BAB III CAPAIAN SDGs KABUPATEN TUBAN	III-1
3.1 Pilar Pembangunan Sosial	III-2
3.1.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-4
3.1.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-10
3.1.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-14
3.1.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-21
3.1.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender	III-27
3.2 Pilar Pembangunan Ekonomi	III-30
3.2.1 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	III-32
3.2.2 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-35
3.2.3 Tujuan 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi	III-39
3.2.4 Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan	III-43
3.2.5 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	III-46



3.3 Pilar Pembangunan Lingkungan	III-50
3.3.1 Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua.....	III-52
3.3.2 Tujuan 11 Perkotaan dan Permukiman yang Berkelanjutan	III-57
3.3.3 Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-64
3.3.4 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	III-69
3.3.5 Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-72
3.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.....	III-75
3.4.1 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.....	III-77
BAB IV EVALUASI PROGRAM.....	IV-1
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Rekomendasi	V-6
LAMPIRAN	B-1



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.....	II-1
Gambar 3.1	Pilar Sustainable Development Goals (SDGs).....	III-1
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2023.....	III-6
Gambar 3.3	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, Jenis Kloset dan Ketersediaan IPAL/SPAL pada kelompok 40% Terbawah Tahun 2022-2023	III-88
Gambar 3.4	Prevalensi Stunting Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2023	III-12
Gambar 3.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.	III-17
Gambar 3.6	Proporsi perempuan yang proses melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan.	III-18
Gambar 3.7	Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.	III-18
Gambar 3.8	Persentase merokok pada penduduk umur diatas 15 tahun di Kabupaten Tuban, tahun 2019 – 2023.....	III-19
Gambar 3.9	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Sederajat (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2022 - 2023.....	III-2323
Gambar 3.10	Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA Sederajat (%) di Kabupaten Tuban, Tahun 2022-2023	III-24
Gambar 3.11	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023	III-25
Gambar 3.12	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	III-28
Gambar 3.13	Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Bulan di Kabupaten Tuban, 2023	III-32
Gambar 3.14	Laju Pertumbuhan PDRB.....	III-37
Gambar 3.15	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tuban (km), 2022-2023	III-40
Gambar 3.16	Gini Ratio Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023	III-44



Gambar 3.17	Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDRB dan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB, Tahun 2021-2023.....	III-48
Gambar 3.18	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023	III-54
Gambar 3.19	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023	III-55
Gambar 3.20	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	III-59
Gambar 3.21	Indeks Kualitas Udara.....	III-60
Gambar 3.22	Jumlah Timbulan Sampah yang di Daur Ulang di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023	III-65
Gambar 3.23	Persentase Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah dan Jenis Sampah di Kabupaten Tuban Tahun 2023	III-66
Gambar 3.24	Limbah B3 yang Dihasilkan Per Kapita dan Proporsi Limbah B3 yang Ditangani/Diolah Berdasarkan Jenis Penanganannya/Pengelolaannya	III-67
Gambar 3.25	Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.....	III-70
Gambar 3.26	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Laut yang Berada dalam Batasan Biologis	III-73
Gambar 3.27	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir.....	III-80
Gambar 3.28	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 dan Kelompok 40% Berpendapatan Bawah	III-81
Gambar 3.29	Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui.....	III-83
Gambar 3.30	Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	III-84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kebutuhan dan Sumber Data.....	II-3
Tabel 2.2	Formulir Evaluasi Kinerja Capaian SDGs.....	II-14
Tabel 2.3	Status Capaian SDGs	II-14
Tabel 2.4	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	II-15
Tabel 2.5	Matriks Evaluasi Program	II-16
Tabel 3.1	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 1	III-4
Tabel 3.2	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 2	III-10
Tabel 3.3	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 3	III-14
Tabel 3.4	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 4	III-21
Tabel 3.5	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 5	III-27
Tabel 3.6	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 7	III-32
Tabel 3.7	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 8	III-355
Tabel 3.8	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 9	III-3939
Tabel 3.9	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 10	III-43
Tabel 3.10	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 17	III-46
Tabel 3.11	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 6	III-52
Tabel 3.12	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 11	III-57
Tabel 3.13	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023.....	III-60
Tabel 3.14	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 12	III-64
Tabel 3.15	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 13	III-6969
Tabel 3.16	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 14	III-72
Tabel 3.17	Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 16	III-77
Tabel 4.1	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	III-77



DAFTAR SINGKATAN

DINSOS P3A	: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
DINKES	: Dinas Kesehatan.
DISNAKERIN	: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
DPUPRPRKP	: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman ¹² .
DISDIK	: Dinas Pendidikan.
DLHP	: Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
DINSOS	: Dinas Sosial.
BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
DKP2P	: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
BAPPEDALITBANG	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
BNN	: Badan Narkotika Nasional.
DINKOPDAG	: Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
DISPARBUD	: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
DISPARBUDPORA	: Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata.
BPS	: Badan Pusat Statistik.
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informatika.
POLRES	: Kepolisian Resor.
BPKPAD	: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa.
SETDA	: Sekretariat Daerah.
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kebijakan pembangunan pada tingkat global/ dunia yang dilaksanakan mulai tahun 2016 hingga tahun 2030 dengan melibatkan seluruh negara di dunia termasuk Indonesia yang merupakan salah satu perintis/pemberi usulan terbentuknya kebijakan SDGs di dunia. Pelaksanaan dan pencapaian SDGs (2016-2030) di Indonesia memang memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam mengurangi ketimpangan, pembangunan antar wilayah, peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola.

Adapun 4 (empat) pilar dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pilar pertama yang melekat pada pembangunan manusia diantaranya pendidikan dan kesehatan. Pilar kedua yang melekat pada faktor ekonomi, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pilar ketiga melekat pada lingkungan, berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik, serta pilar terakhir dalam rangka menjamin keadilan dan penengakkan hukum di seluruh dunia yaitu pilar hukum dan tata kelola. Dalam pelaksanaannya kebijakan SDGs akan mengacu pada 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, dimana 17 tujuan pembangunan tersebut meliputi :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Perkerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;



9. Industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tuban telah memiliki RAD (Rencana Aksi Daerah) tahun 2018 dengan merujuk pada RPJMD Kabupaten Tuban. Selanjutnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk memantau perkembangan pencapaian. Hasil pemantauan (monitoring) tersebut dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan, regulasi, dan program yang tepat sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023 Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023 Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tuban memandang perlu adanya kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan SDG's pada tahun 2023 melalui "Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023" yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023 di Kabupaten Tuban serta merumuskan strategi pencapaiannya pada periode selanjutnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah mengetahui dan mengevaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023 di Kabupaten Tuban.



1.2.2 Tujuan

Tujuan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023 ini sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs Tahun 2023;
2. Merumuskan strategi pencapaian TPB/SDGs pada periode selanjutnya;

Menganalisis permasalahan dan faktor-faktor penyebab capaian SDGs Tahun 2023 sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Melakukan analisis tentang pencapaian pelaksanaan SDGs di Kabupaten Tuban pada tahun 2023;
- b. Mengidentifikasi kondisi capaian program/kegiatan/sub kegiatan pendukung 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Tuban Tahun 2023;
- c. Mengidentifikasi masalah dan rencana tindak lanjut 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
- d. Penyediaan Matriks Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD SDGs.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.



1.5 Sistematika Laporan

Sistematika dokumen laporan akhir kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023 diantaranya ialah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang; tujuan dan sasaran; ruang lingkup; referensi hukum, serta sistematika penulisan.

BAB 2 METODOLOGI

Dalam bab ini menjabarkan mengenai alur dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan metode analisis dalam penyusunan Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang digunakan.

BAB 3 CAPAIAN TPB/SDGs KABUPATEN TUBAN

Bab ini berisikan penjelasan terkait pencapaian pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Tuban pada tahun 2023.

BAB 4 EVALUASI PROGRAM PENDUKUNG SDGs

Pada bab ini berisikan hasil evaluasi program pendukung SDGs di Kabupaten Tuban, meliputi penilaian efektivitas, efisiensi, dan faktor penghambat.

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

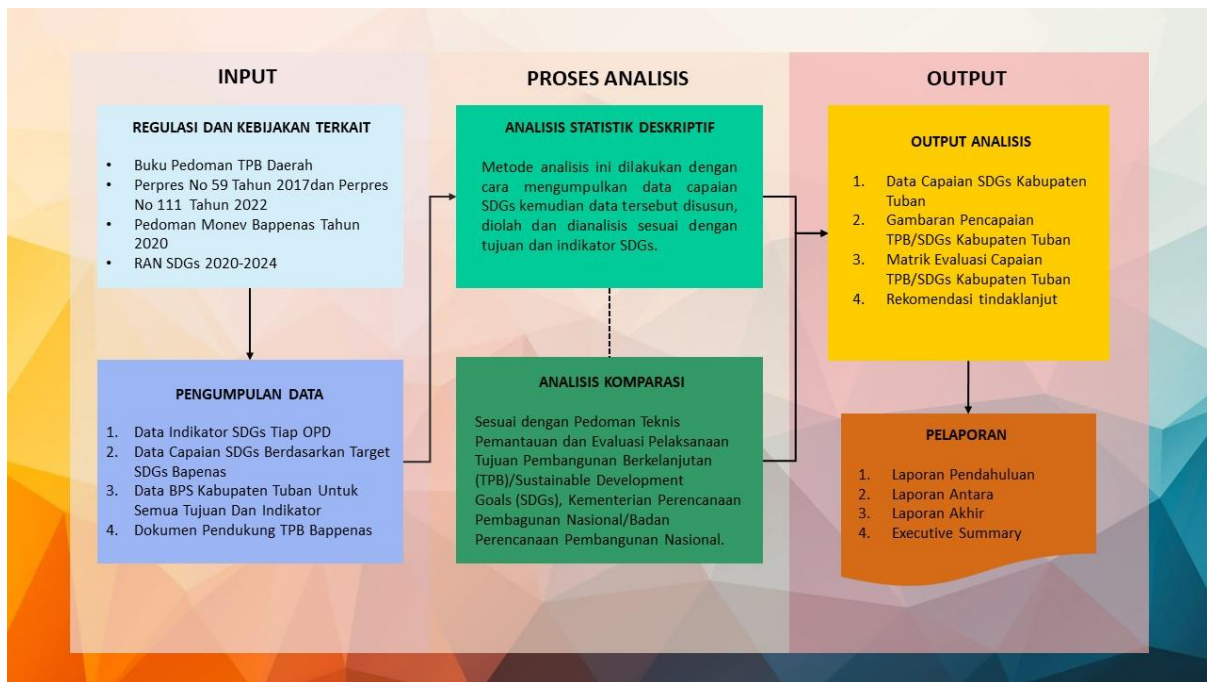
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi untuk kegiatan mendatang dalam proses pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kabupaten Tuban.



BAB II

METODOLOGI

Dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023, proses metodologi dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut.



Gambar 2.1 Proses Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

2.1 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung di lapangan dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan. Penggunaan data primer dianggap lebih akurat, karena data disajikan secara terperinci. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan observasi langsung, partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan FGD.



- **Focus Group Discussion (FGD)**

Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode analisis kualitatif. Secara sederhana FGD dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah tertentu. Irwanto (2006: 1-2) mendefinisikan FGD adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. *Focus Group Discussion* (FGD) juga merupakan metode analisis yang digunakan dalam pengumpulan dan proses verifikasi data dalam proses perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan.

Kegiatan FGD dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait capaian kinerja dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan SDGs di Kabupaten Tuban. Tahapan yang digunakan dalam melakukan FGD adalah dengan melakukan pertemuan dari hasil kajian data sekunder dan evaluasi permasalahan dan isu strategis pada dokumen perencanaan. Analisis ini dilakukan dengan penyajian data dan analisis sementara, kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan umpan balik atas capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Output yang dihasilkan berupa notulensi masukan yang diberikan oleh stakeholder dalam rangka penyempurnaan hasil analisis. Hasil dari kegiatan FGD ini akan dicatat dan ditranskripsikan untuk dapat diolah lebih lanjut.

2. **Pengumpulan Data Sekunder**

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal ini penulis tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Menurut Sugiarto (2001), data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Pada kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023 pengumpulan data sekunder terdiri dari survey literatur dan survey instansional.



2.2 Kebutuhan Data

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) memerlukan beberapa data berdasarkan indikator dari 4 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Data tersebut diampu oleh perangkat daerah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan SDGs di Kabupaten Tuban. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan tujuan, jumlah indikator dan sumber data yang dibutuhkan.

Tabel 2.1 Kebutuhan dan Sumber Data

Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun		
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	DINSOS P3A
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	DINSOS P3A
1.2.2	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	DINSOS P3A
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	DINSOS P3A
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	DINKES
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	DISNAKERIN
1.3.1.(b)	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	DISNAKERIN
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINSOS P3A
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINSOS P3A
1.4.1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar	DINKES
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DINKES



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DINKES
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DINKES
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DPUPRPRKP
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DPUPRPRKP
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DPUPRPRKP
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DISDIK
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	DISDIK
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	DISDIK
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DLHP, DINSOS
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial / *Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	BPBD, DINSOS P3A
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	BPBD, DINSOS P3A
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		
2.1.1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	DKP2P
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES
2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	DINKES
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINKES
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINKES



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) pada balita	DINKES
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil. (***)	DINKES
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINKES
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINKES
2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DKP2P
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat	DKP2P
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.(***)	DKP2P
2.a.2	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.	BAPPEDALITBANG
Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		
3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI) *per 100 ribu kelahiran hidup	DINKES
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINKES
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	DINKES
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	DINKES
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	DINKES
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	DINKES
3.4.1	Kematian akibat penyakit jantung, kanker, diabetes, atau penyakit pernapasan kronis.	DINKES



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	DINKES
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	DINKES
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINKES
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN, DINKES
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DINKES
3.8.1	Cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung)	DINKES
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINKES
3.9.2	Angka kematian akibat air tidak aman, sanitasi tidak aman, dan tidak higienis	DINKES
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	DINKES
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINKES
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	DISDIK
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DISDIK
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DISDIK
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	DISDIK
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	DISDIK
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DISDIK
4.4.1	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DISDIK
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.(***)	DISDIK



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DISDIK
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan		
5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINSOS P3A
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINSOS P3A
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINSOS P3A
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	DINSOS P3A
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	DINSOS P3A
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINKES
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	DINSOS P3A
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DINSOS P3A
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.		
6.1.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	DPUPRPRKP
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUPRPRKP
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DPUPRPRKP
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DPUPRPRKP
6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga (*atau Proporsi populasi) yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air atau Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DPUPRPRKP
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. atau Persentase rumah tinggal bersanitasi	DPUPRPRKP



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DPUPRPRKP
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DPUPRPRKP
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat / *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	DPUPRPRKP
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	DPUPRPRKP
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUPRPRKP
6.4.1	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	DLHP
Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua		
7.1.1	Rasio elektrifikasi	DPUPRPRKP
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua		
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BAPPEDALITBANG
8.1.1 (a)	PDB per kapita	BAPPEDALITBANG
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BAPPEDALITBANG
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	DISNAKERIN
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	DISNAKERIN
8.3.1.(c)	Persentase pengajuan pembiayaan KUKM yang lulus verifikasi	DINKOPDAG
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	DISNAKERIN
8.7.1	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).	DISNAKERIN
8.8.2	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.	DISNAKERIN



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	DISPARBUD
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	DISPARBUDPORA
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	DISPARBUDPORA
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi		
9.1.2	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	DLHP
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS
9.a.1	Total dukungan resmi internasional (bantuan resmi pembangunan ditambah aliran bantuan resmi biaya) untuk infrastruktur.	BAPPEDALITBANG
9.b.1	Proporsi nilai tambah teknologi menengah dan tinggi terhadap total nilai tambah	BPS
9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	DISKOMINFO
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	DISKOMINFO
Tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara		
10.1.1*	Koefisien Gini.	BAPPEDALITBANG
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINSOS P3A
10.1.1 (b)	Jumlah desa tertinggal.	DINSOS P3A
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	DINSOS P3A
10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.	DINSOS P3A
10.1.1 (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	BPS
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	DINSOS P3A
10.3.1	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.	DINSOS P3A
10.3.1 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	POLRES, Bagian Hukum



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	DINSOS
10.4.1	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.	BPS
10.4.1 (b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKERIN
10.5.1	Financial Soundness Indicator	BPKPAD
Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan		
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	DPUPRPRKP
11.1.1 (a)	Proporsi/Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	DPUPRPRKP
11.2.1 (a)	Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik	DLHP
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	DPUPRPRKP
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	BAPPEDALITBANG
11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	DISPARBUDPORA
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana (IRB) Indonesia	BPBD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD
11.6.1 (a)	*Persentase sampah perkotaan yang tertangani / Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah	DPUPRPRKP
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk) .	DLHP
11.6.2 (b)	Indeks kualitas udara	DLHP
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas	DPUPRPRKP, DLHP
11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	DPUPRPRKP, DLHP
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan		



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	DKP2P
12.4.2	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	DLHP
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLHP
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	DLHP
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	DLHP
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	PBJ
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister	Bagian Pemerintahan Setda
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		
13.1.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD
13.1.2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah / Jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun	BPBD
Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan		
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan	DKP2P
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman (berdasarkan MSY)	DKP2P
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	DKP2P
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		
16.1.1	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin	POLRES/KEJAKSAAN
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	POLRES/KEJAKSAAN
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES/KEJAKSAAN



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	POLRES/KEJAKSAAN
16.1.4.	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	POLRES/KEJAKSAAN
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	POLRES/KEJAKSAAN
16.5.1. (a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	POLRES/KEJAKSAAN
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BAPPEDALITBANG
16.6.1.(b)	*Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) $\geq B$ / Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Jawa Timur	BAPPEDALITBANG
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq B$	BAPPEDALITBANG
	Persentase penggunaan E-pro curement terhadap belanja pengadaan.	BAPPEDALITBANG
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	BAPPEDALITBANG
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	DISDUKCAPIL
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DISDUKCAPIL
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	DISKOMINFO
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	DISKOMINFO
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOMINFO
Tujuan 17 : Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan		
17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BAPPEDALITBANG, BPKPAD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PAD	BPKPAD



Nomor Indikator	Nama Indikator	Sumber Data/OPD
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga	DISKOMINFO
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun / *Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dlm Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BAPPEDALITBANG
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	BAPPEDALITBANG
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DISDUKCAPIL
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	DISKOMINFO
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS

2.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023, yaitu sebagai berikut.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan jenis analisis data yang digunakan untuk menggambarkan, menampilkan dan meringkas sekumpulan data. Metode analisis ini termasuk dalam metode analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan variabel yang diperoleh dari suatu kelompok tertentu.

Metode analisis ini dilakukan dengan cara merancang & mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data untuk memberikan informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Analisis deskriptif menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, grafik, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data dan sebagainya (Sugiyono, 2010).

2. Analisis Komparasi

Analisis komparasi yang digunakan dalam kegiatan ini kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Kabupaten



Tuban Tahun 2023 merujuk pada Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMD. Kegiatan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan dan keluaran (*output*) yang terdapat dalam Rencana Aksi Daerah (RAD). Kegiatan evaluasi TPB/SDGs dengan menggunakan formulir evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs. Tabel 2.2 merupakan contoh formulir evaluasi kinerja pencapaian sasaran TPB/SDGs.




Tabel 2.2 Formulir Evaluasi Kinerja Capaian SDGs

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target SDGs	Capaian			Tren Capaian	Status
					2021	2022	2023		
Target SDGS									

Sumber: Diadopsi dari Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs, 2020

Keterangan pada tabel status capaian indikator TPB/SDGs akan ditunjukkan dengan menggunakan 3 simbol sebagai penanda, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Status Capaian SDGs

Simbol	Keterangan
 Tercapai (<i>achieved</i>)	<p>a. Target tahun berjalan tercapai dan trend capaian menuju kondisi membaik</p> <p>b. Untuk indikator kualitatif yang diukur dengan ketersediaan kerangka regulasi/kebijakan, Jika regulasi/kebijakan telah tersedia atau telah ditetapkan maka indikator telah tercapai</p>
 Menuju kondisi kurang baik	Tren capaian menunjukkan penurunan dan atau meningkat menuju kondisi kurang baik dari tahun sebelumnya.
 Menuju kondisi sangat kurang baik sehingga menjadi perhatian khusus	a. Untuk indikator yang memiliki angka target: Tren capaian turun/memburuk dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai
	b. Untuk indikator yang tidak memiliki angka target: capaian tahun berjalan memburuk dari tahun sebelumnya

Sumber: Diadopsi dari Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs, 2020



3. Analisis Evaluasi Program

Pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan ini mengacu kepada evaluasi tahap pasca-pelaksanaan atau *ex-post evaluation*, yaitu menilai pencapaian keluaran/hasil dampak; menilai program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan (sasaran dan isu prioritas), serta menilai efisiensi, efektivitas dan dampak ataupun manfaat suatu program. Sumber data untuk *input* dan target adalah LAKIP. Sumber data untuk *outcome* adalah RPJM dan data-data dari BPS dan dari sumber lainnya. *Impact evaluation* dilakukan melalui komparasi dan pemetaan secara deskriptif dan statistik.

Kegiatan evaluasi hasil pembangunan ini dilakukan pada beberapa OPD yang terkait dengan program kerja dan indikator kinerja dalam hal pembangunan manusia ekonomi. 7 OPD terkait yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Kegiatan evaluasi capaian kinerja program dan anggaran ini menggunakan dasar sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap target kinerja dan pagu anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Berikut merupakan tabel kriteria penilaian evaluasi kinerja dan anggaran.

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90,9%	Tinggi
3.	66% ≤ 75,9%	Sedang
4.	51% ≤ 65,9%	Rendah
5.	≤ 50,9%	Sangat rendah

Sumber : Permendagri No 86 tahun 2017



Tabel 2.5 Matriks Evaluasi Program

		Penyerapan Anggaran				
		Sangat Tinggi ≥ 91%	Tinggi 76%-90%	Sedang 66%-75%	Rendah 51%-65%	Sangat Rendah ≤ 50%
Capaian Kinerja	Sangat Tinggi ≥ 91%	SB	B	C	C	KB
	Tinggi 76%-90%	B	B	C	C	KB
	Sedang 66%-75%	C	C	C	KB	KB
	Rendah 51%-65%	C	C	KB	KB	SKB
	Sangat Rendah ≤ 50%	KB	KB	KB	SKB	SKB

Sumber : PDPM-ITS 2023

Keterangan:

SB : Sangat Baik, **B** : Baik, **C** : Cukup, **KB** : Kurang Baik, **SKB** : Sangat Kurang Baik.



BAB III

CAPAIAN SDGs KABUPATEN TUBAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu agenda global/dunia dan nasional yang merupakan rencana aksi yang ditujukan untuk manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian dan kerjasama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam SDGs terdapat **17 tujuan dengan 169 target** yang telah disepakati bersama. Tujuan dan target SDGs tersebut dibagi kedalam **4 pilar**, sebagai berikut.



Gambar 3.1 Pilar Sustainable Development Goals (SDGs)

Evaluasi capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) mengacu pada dokumen Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan TPB/SDGs yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2020. Pada bab ini berisikan penjelasan terkait capaian tujuan (*goal*) SDGs yang terdapat di Kabupaten Tuban. Namun, tidak keseluruhan tujuan (*goals*) SDGs dapat diterapkan di Kabupaten Tuban, karena sebagian tujuan SDGs merupakan kewenangan pada tingkat nasional dan provinsi.



3.1 Pilar Pembangunan Sosial

TUJUAN 1 MENGHAPUS KEMISKINAN

1 MENGHAPUS
KEMISKINAN



TUJUAN 2 MENGAKHIRI KELAPARAN

2 MENGAKHIRI
KELAPARAN



**TUJUAN 3 KESEHATAN YANG BAIK
DAN KESEJAHTERAAN**

3 KESEHATAN
YANG BAIK DAN
KESEJAHTERAAN



TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERMUTU

4 PENDIDIKAN
BERMUTU



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER

5 KESETARAAN
GENDER



1 NO POVERTY



#TUJUAN 1

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di Manapun



Tujuan ini bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem, memastikan semua orang memiliki akses terhadap sumber daya dasar seperti pangan, air, dan tempat tinggal, serta memberikan perlindungan sosial bagi mereka yang rentan.

Persentase Penduduk yang Hidup di bawah Garis Kemiskinan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Tahun 2022 **15.02%** → Tahun 2023 **14.05%**

Sumber : Badan Pusat Statistik

Terjadi **penurunan** persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut jenis kelamin dan kelompok umur sebesar **0.97 %** dan **sudah mencapai** target SDGs tahun 2023 sebesar 14.05%. Penurunan ini menunjukkan perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk.

Persentase rumah tangga miskin dan rentan (40% terbawah) terhadap fasilitas dasar.

Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak



Tahun 2022 **98.96%**
Tahun 2023 **96.21%**

Terjadi penurunan persentase akses sumber air minum layak

Sumber : Dokumen Kesejahteraan Statistik

Akses Terhadap Sumber Penerangan



Persentase akses sumber penerangan tetap 100%, artinya seluruh tetangga miskin memiliki akses penerangan.

Persentase rumah tangga miskin dan rentan (40% terbawah) terhadap layanan sanitasi layak



Jenis Kloset Leher Angsa



Tangki Septik /IPAL/SPAL



Tempat BAB Sendiri

Semua mengalami peningkatan namun hanya **fasilitas tempat BAB sendiri yang melebihi target SDGs** yaitu 80.6%

Sumber : Dokumen Kesejahteraan Statistik

Proporsi Penduduk yang Menerima Perlindungan Sosial



Capaian Tahun 2023 **93,46%** ↑
Penduduk menerima perlindungan sosial
Cakupan perlindungan sosial meningkat 0,46% dari 2022 dan melampaui target SDGs 2023 sebesar 93%.

Sumber : Renstra Dinsos P3A

Proporsi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Capaian Tahun 2023 **25%** ↑
Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Adanya upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja seiring perluasan jaminan sosial.

Sumber : Data BPJS Ketenagakerjaan

3.1.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 1, tanpa kemiskinan diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 1

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	Data PK3KE Kabupaten Tuban Tahun 2022	Jiwa	422.336	Target Dari Bappeda	579.899	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	15,02	14,50	14,50	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/ melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	Renstra DinsosP3A	%	93	93	93,46	
1.3.1.a	Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	RPJMD	Jumlah	9.849	11.192	8.404	
1.3.1.b	Jumlah Penyandang Cacat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	Renstra DinsosP3A	Orang	25	29	216	
1.3.1.c	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						
	1. Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh santunan makanan siap saji	Renstra DinsosP3A	Orang	500	640	500	
	2. Jumlah lanjut usia yang memperoleh bantuan uang tunai	Renstra DinsosP3A	Orang	400	400	997	
1.3.1(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	75,9	79,5	83,33	
1.3.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Data BPJS Ketenagakerjaan	%	22,38	26,01	100	
1.3.1.(b)	Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	Data BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah	465.095	465.195	108.441	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Renstra DinsosP3A	%	90	100	94,30	

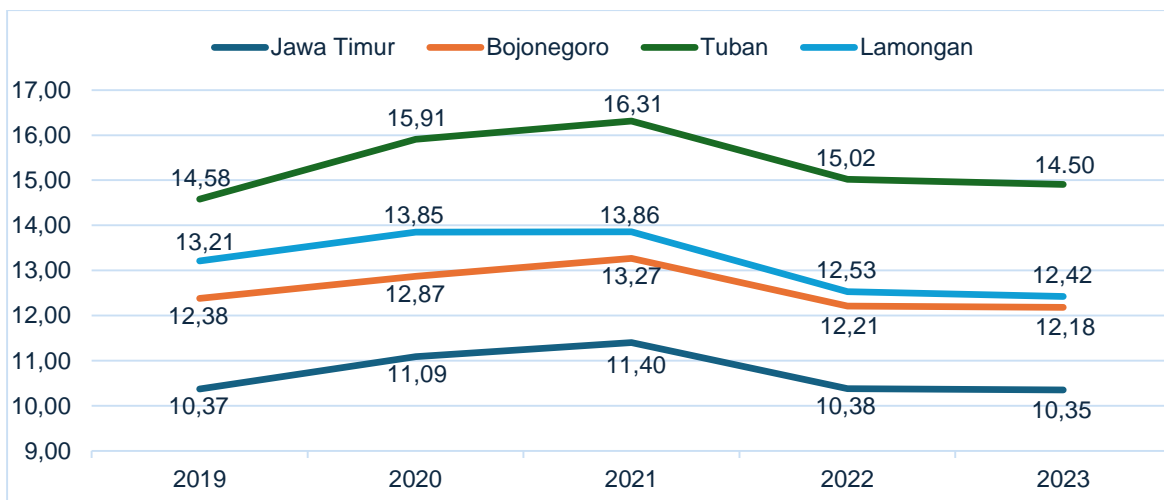
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	13,94	14,35	12,65	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (*kelompok penduduk 40% terbawah)	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	100	100	100	
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (*kelompok penduduk 40% terbawah)	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	61,89	63,71	53,20	
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (*kelompok penduduk 40% terbawah)	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	66,07	66,55	71,25	
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (*kelompok penduduk 40% terbawah)	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	98,96	100,00	96,21	
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (*kelompok penduduk 40% terbawah)						
	1. Persentase Rumah Tangga kelompok penduduk 40% terbawah yang menggunakan Jenis Kloset Leher Angsa	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	93,19	94,42	93,31	
	2. Persentase Rumah Tangga kelompok penduduk 40% terbawah dengan pembuangan limbah Tangki septik/IPAL/ SPAL	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	92,12	94,54	93,06	
	3. Persentase Rumah Tangga kelompok penduduk 40% terbawah yang menggunakan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	75,25	80,68	83,98	
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (*kelompok penduduk 40% terbawah)	DPUPR PRKP	Rumah Tangga	0,89	0,69	0,11	
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	99,84	99,85	99,22	
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	88,38	89,44	80,70	
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	56,78	56,85	56,82	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	87,44	87,48	95,50	
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	100	100	100	

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
	dari PLN dan bukan PLN. (*kelompok penduduk 40% terbawah)						
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan							
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial/ *Persentase korban terdampak bencana yang ditangani	Renstra DinsosP3A	%	0	100	100	●

Sumber: Hasil Analisis, 2024

A. Presentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan salah satu isu permasalahan yang menjadi perhatian utama bagi daerah dan nasional begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Tuban. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tuban menargetkan presentase jumlah penduduk miskin yaitu sebesar 14,50%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan komitmen dan usaha dari pemerintah daerah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Tuban. Melihat perkembangan presentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban dalam 5 tahun terakhir. Presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban terlihat adanya kecenderungan penurunan pada tahun 2022 – 2023. Pada tahun 2023 presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban terlihat mengalami penurunan dari 15,02% pada tahun 2022 menjadi 14,50%. Jika dibandingkan dengan dengan wilayah sekitarnya seperti Bojonegoro dan Lamongan, jumlah penduduk miskin Kabupaten Tuban masih tergolong tinggi dengan presentase diatas 14% sedangkan wilayah sekitarnya hanya sebesar 12% hingga 13%.



Gambar 3.2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tuban dan Wilayah Sekitar Tahun 2019-2023.

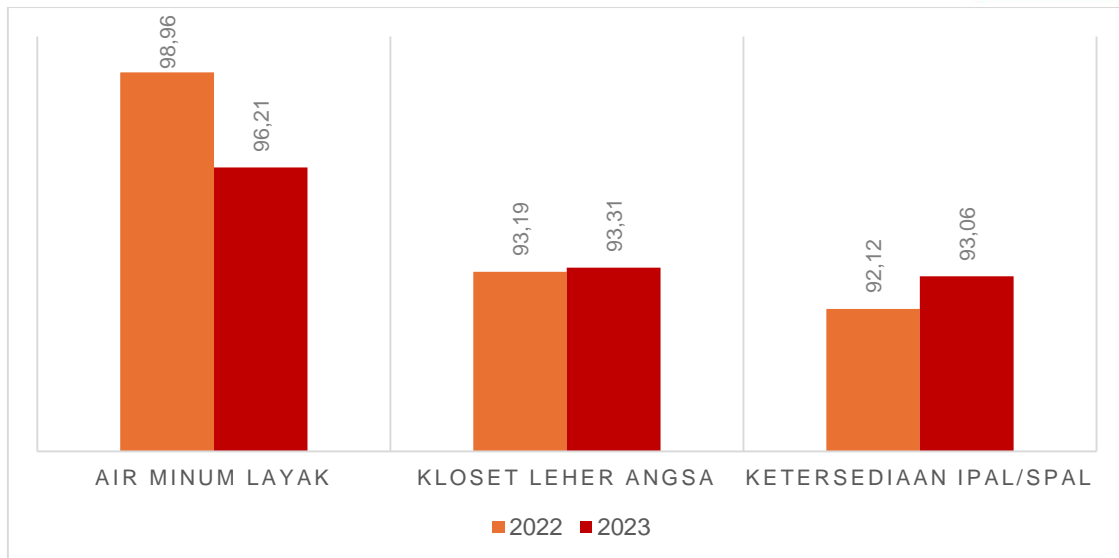
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Penurunan presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang diterapkan di Kabupaten Tuban cenderung mengalami keberhasilan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban.

B. Pembangunan Infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin

Salah satu upaya dalam mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan akses terhadap sanitasi layak bagi rumah tangga miskin dan rentan. Berdasarkan pada Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. 661/Dt.2.4/01/2019. Rumah tangga dengan akses air minum layak apabila sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Sedangkan, rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak apabila fasilitas sanitasi yang digunakan memenuhi syarat kesehatan yaitu dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Berdasarkan pada data yang telah diperoleh, pada tahun 2023 persentase rumah tangga dengan akses sumber air minum layak pada kelompok 40% terbawah yaitu sebesar 96,21%, angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 98,96%. Berbeda dengan sumber air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan, menjadi 88,66%. Dengan Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Jenis Kloset Leher Angsa sebesar 93,31% dan Persentase Rumah Tangga dengan pembuangan limbah Tangki septik/IPAL/ SPAL sebesar 93,06%.



Gambar 3.3 Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, Jenis Kloset dan Ketersediaan IPAL/SPAL pada kelompok 40% Terbawah Tahun 2022-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2024 (Diolah)

2 ZERO HUNGER



#TUJUAN 2

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Prevalensi Stunting pada Balita



Sumber: tubankab.go.id

Tahun 2022
24,9%



Tahun 2023
17,8%

Terjadi penurunan signifikan jumlah balita stunting, yang mencerminkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Tuban.

Sumber: Renstra Dinkes

Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada Balita



2022

19,20%



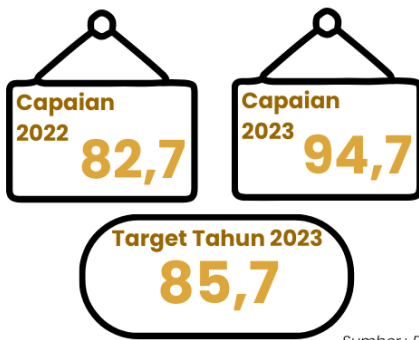
2023

15,50%

Terjadi penurunan yang signifikan dan sudah melampaui target tahun 2023 (16,90%). Penurunan ini menunjukkan adanya upaya oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk menurunkan angka balita yang kurang gizi sehingga mencapai tujuan SDGs 2.1 mengenai menghilangkan kelaparan

Sumber: Renstra Dinkes

Kualitas Konsumsi Pangan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)



Sumber: Renstra DKP3

Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif

2022

72,68%

2023

82,30%



Peningkatan pemberian ASI pada bayi menunjukkan kemajuan positif dalam kesehatan ibu dan anak, serta kesadaran yang lebih tinggi mengenai pentingnya ASI eksklusif untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

Nilai Tambah Pertanian per Tenaga Kerja (Indeks)



Sumber: BPS

Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman, peternakan, perikanan, dan kehutanan

2022

1.607.764,38 Ton

2023

1.617.269,75 Ton















Sumber: Renstra DKP3

3.1.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 2, tanpa kelaparan diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 2

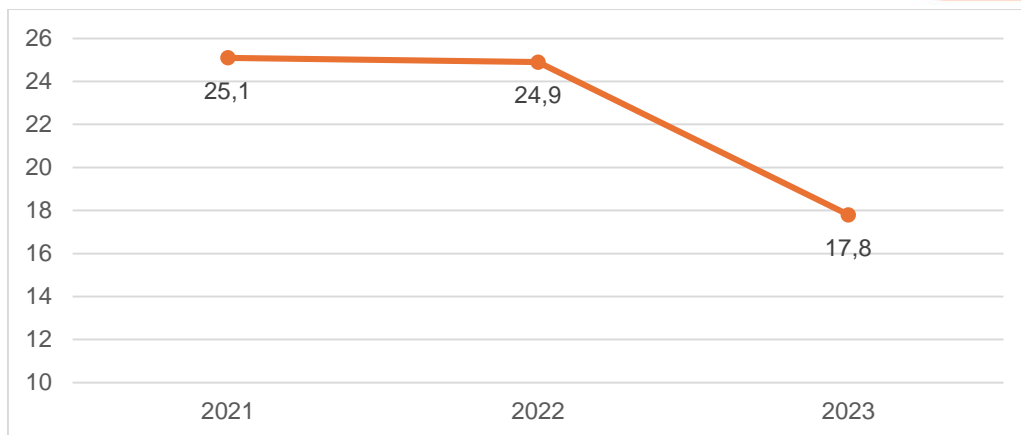
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Renstra Dinkes	%	19,2	16,90	15,50	
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Diskusi Bappeda	%	10,37	6,72	10,36	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah lima tahun/balita.	Renstra Dinkes	%	24,9	23,17	17,80	
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) pada balita	Renstra Dinkes	%	7,1	6,92	7,10	
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil. (***)	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	18,76	17,10	16,50	
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	72,68	74,98	82,30	
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Renstra DKP3	skor	82,7	85,70	94,70	
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.							
2.3.1	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	Indeks	106,82	113,00	113,13	
2.3.1.(a)	Volume produksi per tenaga kerja menurut	Renstra DKP3	Ton	1.617.269,75	1.683.365	1.607.764,38	

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
	kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan (***)						
2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat	BPS	Rp/Kap/ Thn	N/A	44.513.375,67	15.146.305.100.000,00	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Data DKP3	Persen (%)	77,06	77,06	58,09	
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.							
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Renstra DKP3	-	N/A	3	N/A	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Percepatan Penurunan Stunting

Definisi stunting telah mengalami perubahan seiring waktu. WHO (2015) mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan. Sementara itu, WHO (2020) mendeskripsikan stunting sebagai kondisi tubuh yang pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia, yang berada di bawah -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO. Kondisi ini disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak memadai dan/atau infeksi berulang atau kronis, yang terjadi selama periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dan bersifat irreversibel.



Gambar 3.4 Prevalensi Stunting Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2023

Percepatan penurunan angka stunting telah menjadi salah satu fokus utama dalam program prioritas nasional pemerintah di sektor kesehatan, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik balita, tetapi juga berdampak serius pada berbagai fungsi vital tubuh lainnya, seperti perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup anak di masa depan. Kabupaten Tuban menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya penurunan stunting. Pada tahun 2022, angka stunting di daerah tersebut berhasil turun sebesar 0,2%, dari 25,1% pada tahun 2021 menjadi 24,9%. Kemudian pada tahun 2023, upaya yang lebih intensif membuahkan hasil yang lebih signifikan, dengan penurunan sebesar 7,1%, sehingga angka stunting menjadi 17,8%. Capaian ini sudah melampaui target Sustainable Development Goals (SDGs) 2023 yang ditetapkan sebesar 23,17%, menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban dalam menangani masalah stunting secara berkelanjutan.

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



#TUJUAN 3

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 Ribu Kelahiran Hidup



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

Angka Kematian

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tuban



Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup



Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Infeksi Baru HIV per 1000 Penduduk



Tahun 2023 **95%** Penderita HIV mendapat ARV
 Angka pemberian ARV sudah sangat bagus, namun perlu ditingkatkan lagi agar semua penderita HIV mendapatkan ARV

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk



Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, sejalan dengan target SDGs 3, khususnya dalam mengurangi beban penyakit menular. Capaian ini mencerminkan efektivitas program kesehatan yang ada di Kabupaten Tuban.

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

Tahun 2023 **100%** Fasilitas kesehatan sudah dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan

Tahun 2023 **97,50%** Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

Indikator ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban telah mencapai ketersediaan yang tinggi dalam menyediakan obat dan vaksin, sesuai dengan komitmen SDGs untuk meningkatkan akses kesehatan.

Sumber : Renstra Dinkes dan Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

Kepadatan dan Distribusi Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk



Terjadi penurunan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan layanan kesehatan.

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Tuban

3.1.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 3, kehidupan sehat dan sejahtera diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 3

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) *per 100 ribu kelahiran hidup	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	jiwa	87,71	28	110,48	
3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Statistik Kesejahteraan Masyarakat (BPS)	%	100	100	100	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15- 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Statistik Kesejahteraan Masyarakat (BPS)	%	99,72	100	100	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.							
3.2.1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	angka	6,6	5,5	8,10	
3.2.2	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	angka	4,99	3,64	6,63	
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	angka	6,4	5,12	7,50	
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Renstra Dinkes	%	94,1	100	100,17	
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	Per 1000 penduduk	0,13	0,11	0,14	
3.3.1(a)"	Persentase penderita HIV yang mendapat ARV	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	74	75	95	
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	Per 100.000 penduduk	190	183,80	161,32	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	Per 1.000 penduduk	0	0	0	
3.3.3*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Profil Kesehatan	Jumlah	0	0	1	

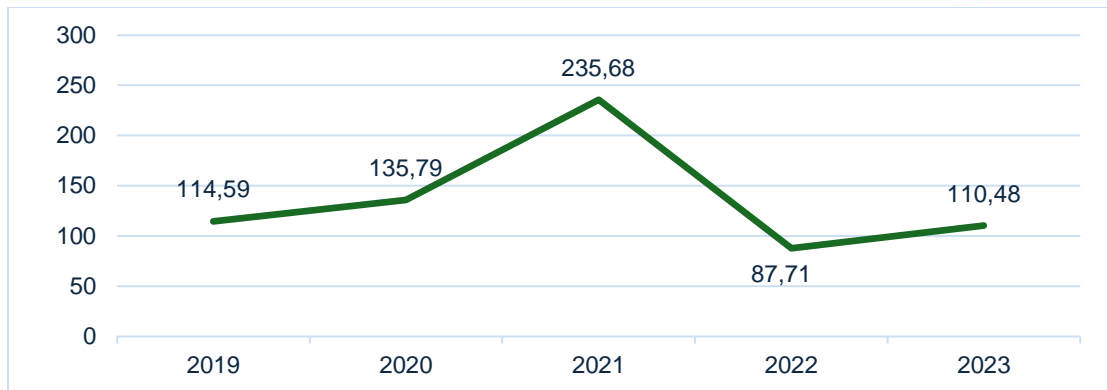
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
		Kabupaten Tuban					
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	Jumlah	98,1	100	93,20	
3.3.5	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	Jumlah	148	117	116	
3.3.5.(a)"	Persentase RFT Rate Kusta	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	98,85	44,92	93,25	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	25,72	24,66	87,00	
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Renstra Dinkes	Jumlah	33	33	33	
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1.(a) (***)	Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapat pelayanan rehabilitasi medis	Data BNN	Jiwa	20	21	17	
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	73,2	71,84	74,00	
3.7.1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	Data Dinkes	%	73,21	75,2	74,00	
3.7.1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Data Dinkes	%	10,8	10,5	7,20	
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	jiwa	26.525	67.335	28.850	
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Data Dinkes	angka	21	28	16,64	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Renstra Dinkes	angka	1,93	1,90	1,83	
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
3.9.3	Angka kematian akibat keracunan	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	Jumlah	1	0	0	
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS	%	29,69	29,7	28,25	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Renstra Dinkes	%	N/A	97,5	97,50	
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	100	100	100	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	per 1.000 penduduk	2,39	2,72	1,73	
3.c.1*	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Renstra Dinkes	%	100	100	73,42	
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	%	100	100	100	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Percepatan penurunan angka kematian ibu merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian. Angka kematian ibu merupakan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau dalam waktu 42 hari setelah persalinan. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tuban selama kurun waktu 5 tahun terakhir memiliki pola perkembangan yang fluktuatif. Dapat dilihat pada gambar berikut.

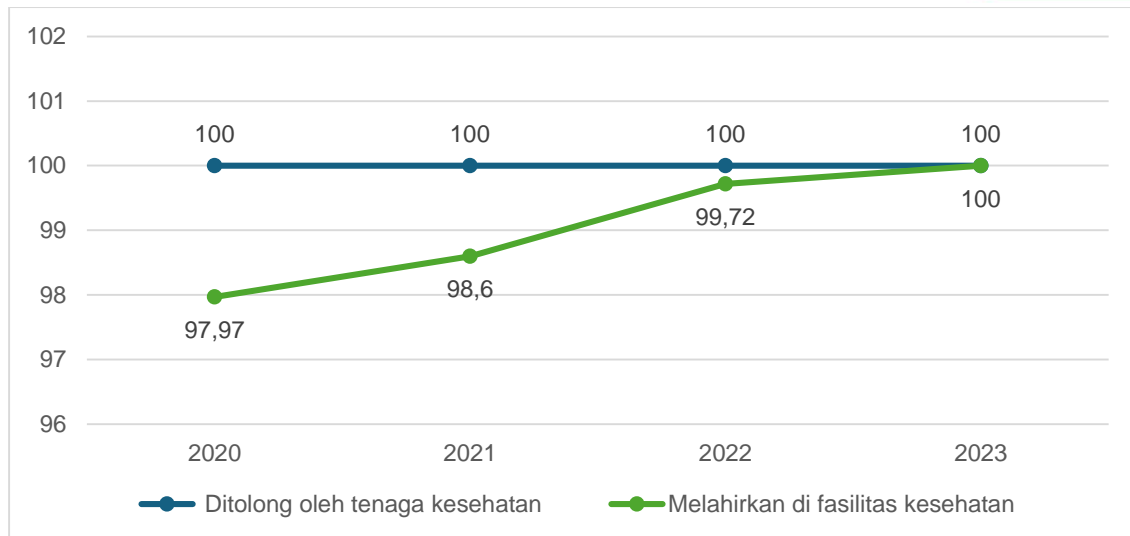


Gambar 3.5 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.

Sumber: Dinkes-P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Pada tahun 2021, Angka kematian Ibu di Kabupaten Tuban mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 99,89 dari 135,79 pada tahun 2020 menjadi 235,68. Pada tahun 2022, Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kondisi membaik dengan kembali mengalami penurunan menjadi 87,71. Hal ini mengindikasikan program-program terkait kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Tuban cukup efektif untuk menurunkan angka kematian ibu(AKI) di Kabupaten Tuban. Namun pada tahun 2023, Angka Kematian IBU (AKI) kembali meningkat menjadi 110,48 atau terdapat 110 kematian ibu pada 100.000 kelahiran. Peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI) ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah dan tantangan di Kabupaten Tuban, sehingga perlunya perhatian untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu yang dapat mempengaruhi penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah persalinan aman yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Persentase persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 sudah mencapai 100% begitu pula persentase persalinan di fasilitas kesehatan juga menunjukkan angka 100%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penanganan persalinan bagi ibu sudah baik.

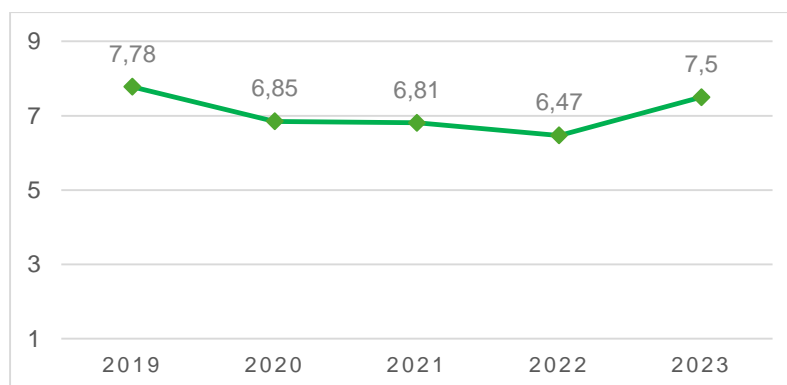


Gambar 3.6 Proporsi perempuan yang proses melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan di fasilitas kesehatan.

Sumber: Dinkes-P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi yang berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang didapat, perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2019 hingga tahun 2022 menunjukkan kondisi yang positif yaitu terus mengalami penurunan dari 7,78 pada tahun 2019 sampai 6,47 pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023, angka kematian bayi Kabupaten Tuban kembali mengalami peningkatan menjadi 7,50. Angka ini berarti bahwa terdapat 7 bayi yang mati dari 1.000 bayi lahir hidup di tahun tersebut. Kenaikan angka kematian bayi pada tahun 2023, menandakan bahwa masih perlu adanya perhatian pada kesehatan masyarakat terutama pada ibu dan bayi.

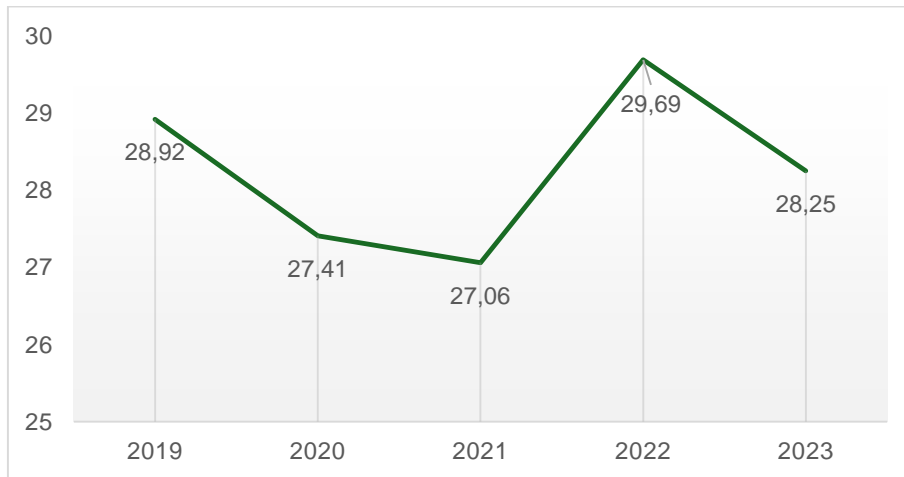


Gambar 3.7 Angka Kematian Bayi per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023.

Sumber: Dinkes-P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

C. Perilaku Merokok

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, Persentase merokok pada penduduk umur diatas 15 tahun di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 29,69% pada tahun 2022, menjadi 28,25%. Persentase jumlah perokok paling banyak ditemukan pada penduduk dengan kelompok pengeluaran 40% menengah yaitu 29,90% dan penduduk 40% terbawah sebesar 26,98%.



Gambar 3.8 Persentase merokok pada penduduk umur diatas 15 tahun di Kabupaten Tuban, tahun 2019 – 2023

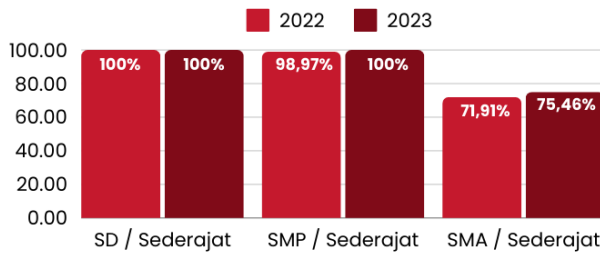
4 QUALITY EDUCATION



#TUJUAN 4

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Tiap Jenjang Sekolah Tahun 2023



Sumber : RPJMD, Renstra Disdik, dan Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, Kabupaten Tuban telah mencapai kemajuan pada pendidikan dasar dan menengah pertama, tetapi masih perlu fokus pada peningkatan partisipasi di jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) demi memastikan pendidikan menengah yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua anak.



Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur ≥15 Tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik

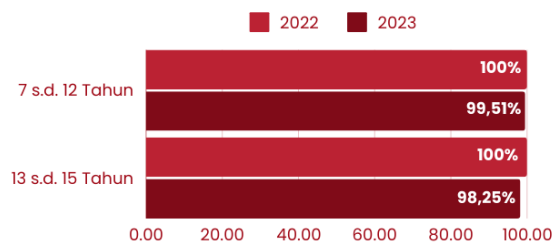
Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 7,4 tahun berarti rata-rata penduduk di atas usia 15 tahun telah menyelesaikan pendidikan hingga sekitar kelas 7 atau tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama), namun belum mencapai tingkat pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat).

Harapan Lama sekolah (HLS)



Sumber : RPJMD dan Renstra Disdik

Tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat



Sumber : RPJMD

Capaian pada jenjang SD/ sederajat tetap sangat baik, meskipun ada sedikit penurunan partisipasi di tahun 2023. Pada jenjang SMP/ sederajat, terdapat penurunan partisipasi yang lebih jelas, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih untuk memastikan semua anak di usia tersebut tetap bersekolah.

Persentase Angka Melek Aksara Penduduk Umur ≥15 Tahun



Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik 2023



Mayoritas guru di Kabupaten Tuban sudah memiliki kualifikasi resmi yang dibutuhkan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas.

Sertifikat pendidik adalah bukti bahwa seorang guru telah memenuhi standar kompetensi profesional yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk kemampuan mengajar, keahlian dalam bidang studi, dan keterampilan pedagogis.

Sumber : RPJMD dan Renstra Disdik

3.1.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 4, pendidikan berkualitas diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 4

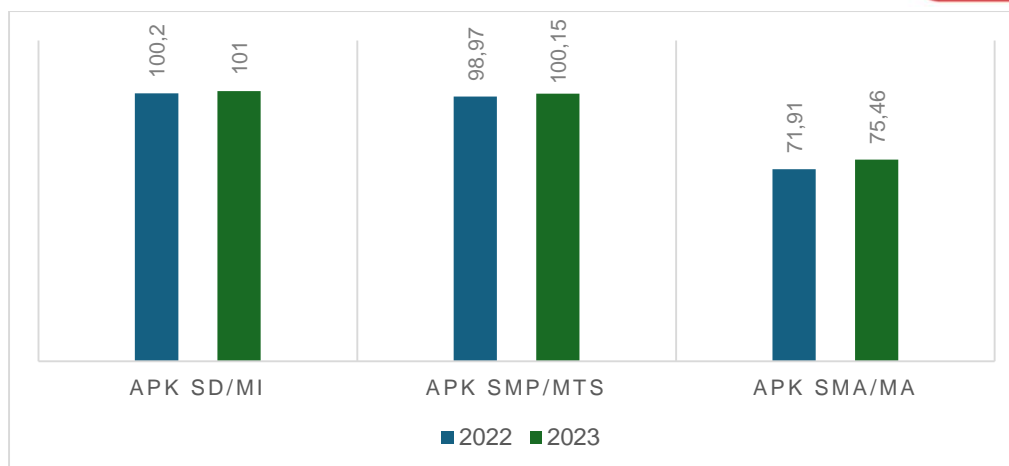
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	RPJMD dan Renstra Disdik	%	94,52	95,6	96,11	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	RPJMD dan Renstra Disdik	%	92,82	93,42	100	
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	RPJMD dan Renstra Disdik	%	100	100	100,82	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	RPJMD dan Renstra Disdik	%	98,97	99	100,18	
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	BPS	%	71,91	74,23	75,46	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	RPJMD dan Renstra Disdik	Tahun	7,37	7,37	7,40	
4.1.2	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat						
	Harapan Lama sekolah (HLS)	RPJMD dan Renstra Disdik	Tahun	12,24	12,29	12,27	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia 7-12 tahun	RPJMD	%	100	100	99,51	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia 13-15 tahun	RPJMD	%	100	100	98,25	
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang: SD/ Sederajat; SMP/ Sederajat; SMA/ Sederajat						
	Angka Putus Sekolah SD/MI	RPJMD	%	0,001	0,001	0,73	
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	RPJMD	%	0,027	0,027	4,61	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	RPJMD dan Renstra Disdik	%	100	100	100,28	
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	RPJMD dan Renstra Disdik	%	102,29	100,00	103,14	
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas							

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.						
	Rasio APM SD berdasarkan jenis kelamin	Dokumen Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kab. Tuban	%	102,19	100	100,34	
	Rasio APM SMP berdasarkan jenis kelamin	Dokumen Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kab. Tuban	%	116,73	100	98,08	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD Perempuan	Dokumen Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kab. Tuban	%	100	100	99,40	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD laki- laki	Dokumen Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kab. Tuban	%	97,86	97,87	99,06	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Perempuan	Dokumen Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kab. Tuban	%	88,74	89,98	79,89	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP laki- laki	Dokumen Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kab. Tuban	%	76,02	76,45	81,45	
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.(***)	BPS	%	91,23	91,65	91,11	
4.c Pada tahun 2030, secara substansial meningkatkan penyediaan guru-guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negaranegara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil							
4.c.1	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	RPJMD dan Renstra Disdik	%	97	97,99	97,60	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penduduk berpartisipasi dalam sistem pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, atau pendidikan tinggi. Pengukuran APK memiliki tujuan untuk mengukur akses pendidikan, kualitas layanan dan kemajuan pendidikan serta ketimpangan pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Tuban jenjang pendidikan SD/MI pada 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang stabil. Pada tahun 2023, nilai APK yaitu sebesar 101,15 angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2022. angka APK 101 ini menunjukkan bahwa jumlah siswa pada jenjang SD/MI melampaui jumlah anak yang seharusnya bersekolah pada tingkat tersebut.

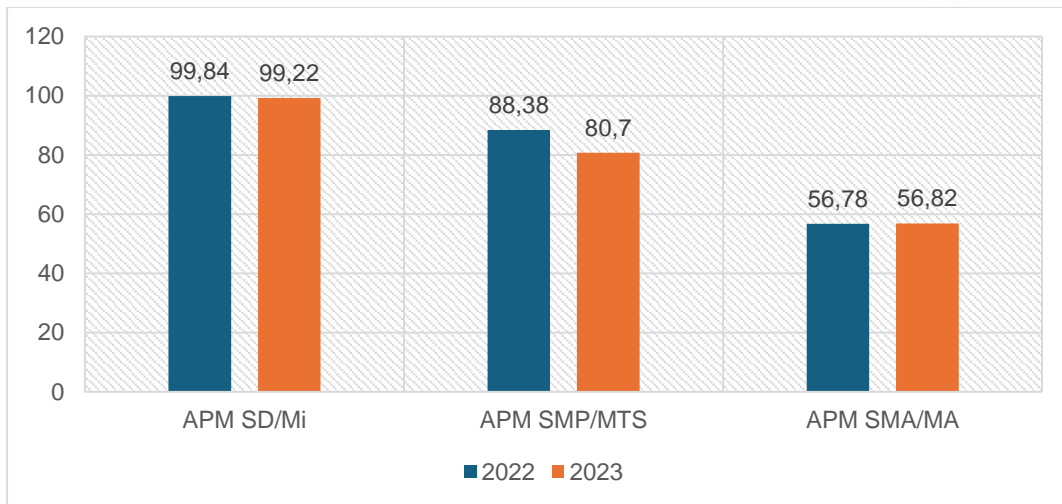


Gambar 3.9 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Sederajat (%) di Kabupaten Tuban Tahun 2022 - 2023.

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM atau Angka Partisipasi Murni dapat didefinisikan sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. APM merupakan salah satu indikator daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan, yang dianggap lebih akurat jika dibandingkan dengan APK. Perhitungan APK dilakukan dengan menghitung jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk pada usia yang sama. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka. Pada tahun 2023, nilai APM pada jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Tuban yaitu sebesar 99,22, angka ini mengalami penurunan 0,62 dari tahun sebelumnya yang sebesar 99,84. Selain Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD/MI, APM jenjang pendidikan SMP/MTs juga mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 7,68. Penurunan APM ini membuat perlunya perhatian khusus untuk dapat kembali meningkatkan angka tersebut.



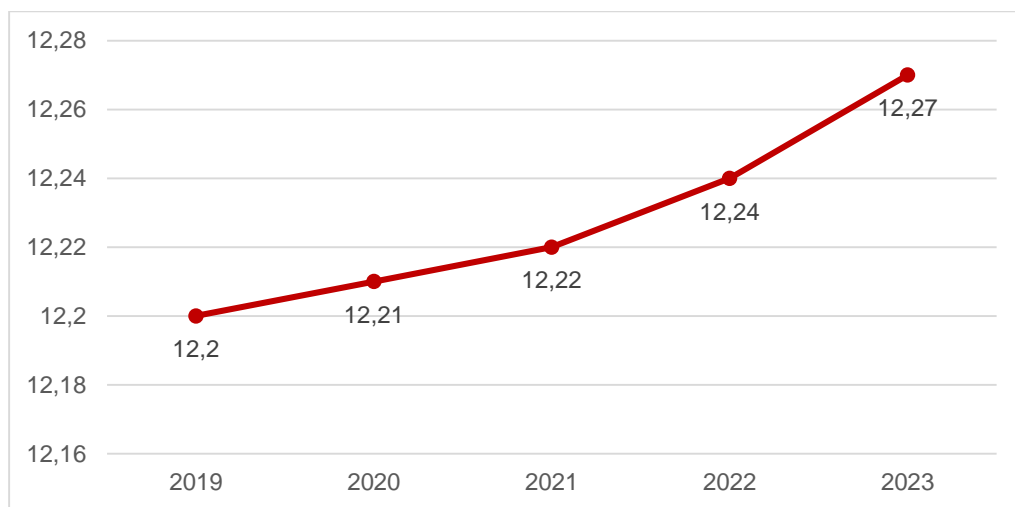
Gambar 3.10 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA Sederajat (%) di Kabupaten Tuban, Tahun 2022-2023

Sumber: Dinkes-P2KB Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Berbeda dengan APM jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS yang mengalami penurunan. Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMA/MA tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,04 dari 56,78 pada tahun 2022 menjadi 56,82 pada tahun 2023. Meski peningkatan ini tidak terlalu tinggi, tetapi angka capaian ini sudah mendekati target APM tahun 2023 dalam SDGs yang sebesar 56,85.

C. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain APK dan APM, salah satu indikator yang digunakan pada pengukuran tingkat pendidikan yaitu HLS atau Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan oada dat yang dimilii. Selama kurun wakru 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 sampai 2023, harapan lama sekolah Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan meski masih berada di bawah rata-rata provinsi jawa timur dan kabupaten sekitarnya.



Gambar 3.11 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023

Harapan lama sekolah Kabupaten Tuban pada tahun 2023 yaitu sebesar 12,27 yang berarti rata-rata anak usia 7 tahun diharapkan dapat bersekolah selama 12,27 tahun atau setara dengan diploma 1. Angka tahun 2023 ini mengalami peningkatan paling tinggi sejak tahun 2019-2023 yaitu 0,03, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 0,01% setiap tahunnya.

5 GENDER EQUALITY



#TUJUAN 5

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan

64

KEBIJAKAN

Sumber : Renstra DinsosP3A

Kebijakan responsif gender bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hak-hak sosial.

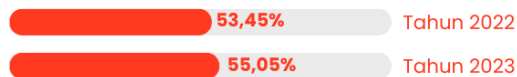
Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif

100%

Semua korban kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut telah menerima layanan yang mencakup berbagai aspek dukungan.

Sumber : Renstra DinsosP3A

Proporsi Perempuan yang Berada Di Posisi Manajerial



Sumber : Data Bappeda

Peningkatan proporsi perempuan di posisi manajerial di Kabupaten Tuban menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja. Ini mencerminkan peluang kepemimpinan yang lebih inklusif dan beragam, serta mendukung tujuan SDGs 5. Perempuan yang lebih banyak di posisi manajerial dapat berdampak positif pada pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun



Median usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Tuban yang berada di angka **21 tahun** menunjukkan bahwa banyak perempuan di wilayah tersebut menikah pada usia relatif muda.

Data ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk merancang program peningkatan kesadaran tentang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan perempuan, terutama jika mereka ingin menunda usia pernikahan demi kesejahteraan yang lebih baik.

Sumber : Renstra Dinkes

Jumlah Kebijakan yang Responsif Gender Mendukung Pemberdayaan Perempuan

14%



Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam representasi politik dan pengambilan keputusan, yang bisa mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong partisipasi perempuan dan memastikan keberagaman dalam pemerintahan dan lembaga legislatif.

Sumber : Data Bappeda

Proporsi Individu yang Menguasai / Memiliki Telepon Genggam

Tahun 2022 Tahun 2023 ↓
69,85% → **69,55%**

Penurunan 0,3% dalam proporsi individu yang memiliki telepon genggam di Kabupaten Tuban menunjukkan sedikit penurunan akses atau kepemilikan telepon genggam di daerah tersebut. Ini bisa berarti adanya penurunan dalam kemampuan atau minat masyarakat untuk memiliki telepon genggam, atau mungkin faktor-faktor lain yang memengaruhi kepemilikan perangkat tersebut.

Sumber : Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS


Infografis Pencapaian Sustainable Development Goals Kabupaten Tuban

3.1.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 5, kesetaraan gender diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.5.

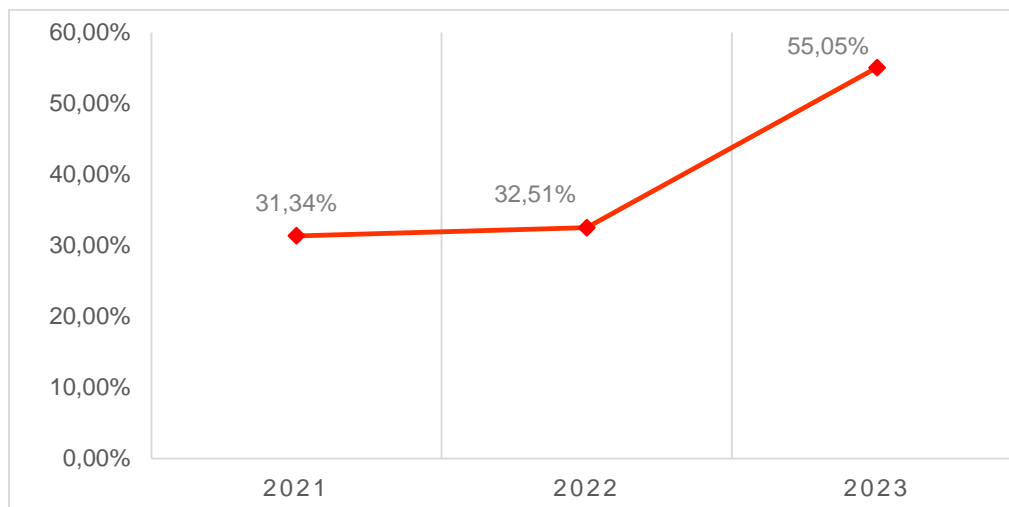
Tabel 3.5 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 5

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Renstra DinsosP3A	jumlah	64	64	64	
5.1.1**	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Renstra DinsosP3A	%	0,35	1	48,92	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya							
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Data DinsosP3A	%	0,00052	0,00043	0,00	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Data DinsosP3A	%	0,000073	0,000067	0,00	
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Renstra DinsosP3A	%(kasus)	100	100	100	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Renstra Dinkes	umur	N/A	21	16,5	
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	Data Bappeda	%	14	14,34	14,00	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.	BPS	%	53,45	54,09	55,05	
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS	%	69,85	71,83	69,55	
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
5.c.1	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Data DinsosP3A	-	Ada	ada	Ada	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Capaian kabupaten tuban dalam mendukung tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 5 mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini, terdapat kebijakan responsif gender yang telah diterapkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Presentase anggaran responsif gender (ARG) saat ini mencapai 48,92% menunjukkan komitmen yang kuat terhadap mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penganggaran daerah. Dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari kekerasan tercatat 0%, yang menunjukkan adanya penurunan insiden kekerasan dan peningkatan kesadaran serta perlindungan. Selain itu, 100% korban kekerasan terhadap perempuan mendapatkan layanan komprehensif.



Gambar 3.12 Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Pada Tahun 2023, proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial sebesar 55,05%. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,6% dibanding Tahun 2022. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di posisi manajerial di Kabupaten Tuban sudah cukup baik atau setara. Mempertahankan kesetaraan gender di posisi tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain itu, Kabupaten Tuban juga telah memiliki sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kehadiran sistem ini penting untuk memastikan transparansi dan

akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan terkait gender, serta untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas program-program yang ada. Semua langkah ini menunjukkan kemajuan nyata dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Tuban, serta komitmen untuk terus memperkuat upaya ini di masa mendatang.

3.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

TUJUAN 7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU



TUJUAN 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



TUJUAN 9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI

9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI



TUJUAN 10 MENGURANGI KETIMPANGAN

10 MENGURANGI KETIMPANGAN



TUJUAN 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN



7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY



#TUJUAN 7

Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Perkelanjutan, dan Modern Untuk Semua

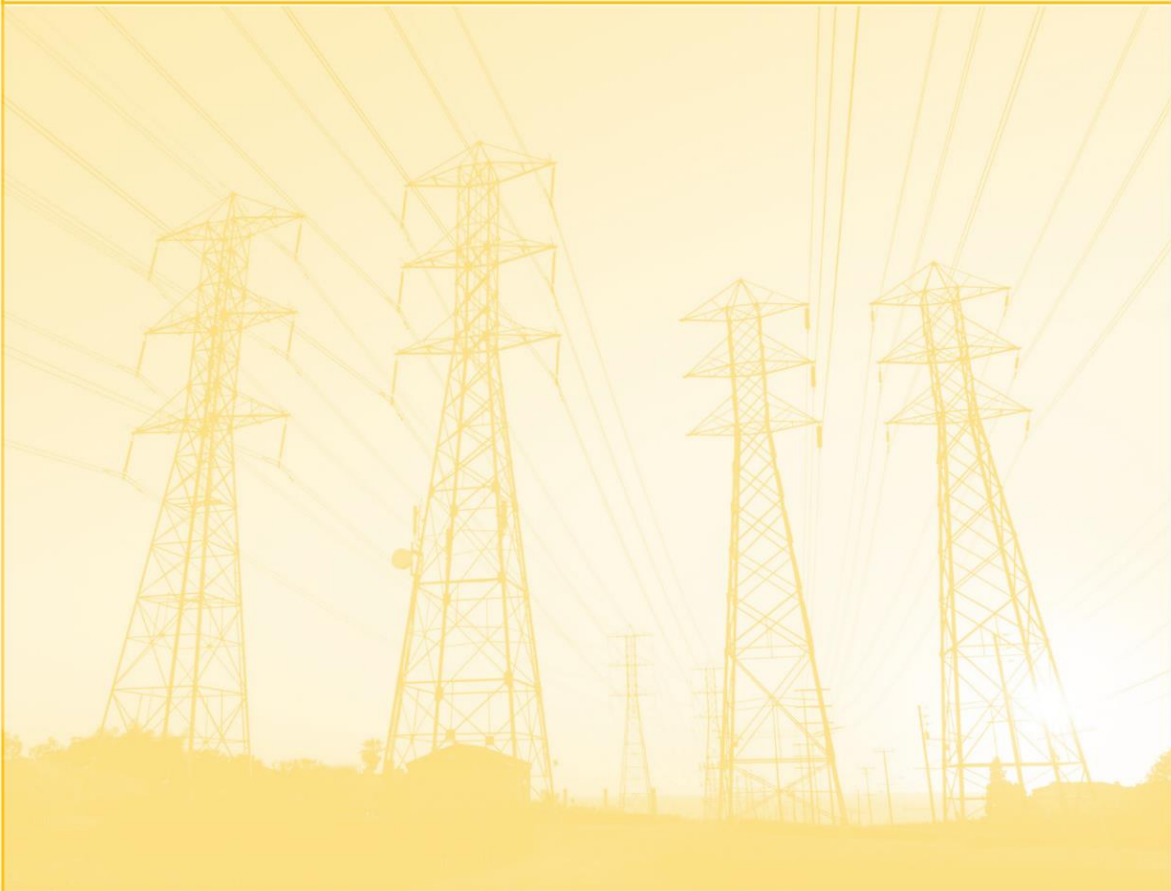
Rasio Elektrifikasi



SELURUH rumah tangga di Tuban sudah memiliki akses ke listrik.

Elektrifikasi penuh dapat **mengurangi ketimpangan** dalam akses energi, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.

Potensi ini dapat dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi yang **lebih efisien dan ramah lingkungan**.




Infografis Pencapaian Sustainable Development Goals Kabupaten Tuban

3.2.1 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

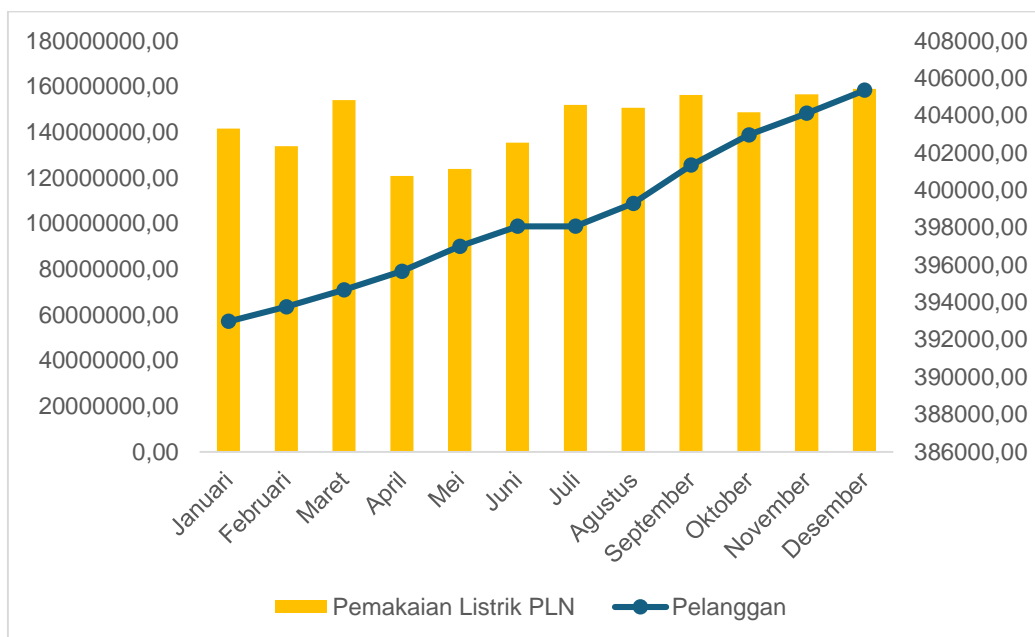
Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 7, Energi bersih dan terjangkau diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 7

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
7.1 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua							
7.1.1	Rasio elektrifikasi	Evaluasi RPJP	%	100	100	100	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pada tahun 2023, Kabupaten Tuban berhasil mencapai pencapaian signifikan dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tujuan 7, yaitu energi bersih dan terjangkau. Saat ini, rasio elektrifikasi di Kabupaten Tuban telah mencapai target 100%, yang berarti seluruh rumah tangga di daerah ini memiliki akses penuh ke listrik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar yang esensial dan menegaskan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 3.13 Jumlah Pelanggan dan Pemakaian Listrik PLN Menurut Bulan di Kabupaten Tuban, 2023

Sumber: Tuban dalam Angka, 2024 (Diolah)

Data jumlah pelanggan dan pemakaian listrik PLN di Kabupaten Tuban sepanjang Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam jumlah pelanggan, dari 392.976 pada Bulan Januari menjadi 405.348 pada Bulan Desember. Pemakaian listrik juga menunjukkan variasi yang mencerminkan pola

konsumsi energi masyarakat, dengan pemakaian tertinggi tercatat pada Bulan Desember sebesar 158.960.989,37 kWh dan terendah pada Bulan April sebesar 120.764.572,85 kWh. Pencapaian rasio elektrifikasi 100% ini telah membuka peluang lebih besar untuk pengembangan industri lokal, meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah, serta mendukung aktivitas sehari-hari yang lebih efektif dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Tuban. Dengan akses listrik yang merata, penduduk dapat menikmati manfaat yang luas, termasuk peningkatan dalam pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Secara keseluruhan, capaian ini merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap warga Kabupaten Tuban dapat merasakan manfaat dari kemajuan yang dicapai dalam menyediakan energi bersih dan terjangkau.

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



#TUJUAN 8

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Pertumbuhan Ekonomi Tuban

2022

Rp. 62,06 Juta/Kapita **5,63%**

Rp. 67,18 Juta/Kapita

2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban menunjukkan hasil positif sejalan dengan SDGs 8.1 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pencapaian ini mencerminkan perbaikan ekonomi daerah yang signifikan, didorong oleh upaya diversifikasi dan inovasi ekonomi lokal.

Sumber : BPS

Laju pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja

2022

9,44%

2023

0,31%

Produktivitas ekonomi di Kabupaten Tuban menunjukkan pencapaian sebesar 0,31% dari target 9,66% untuk laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, menyoroti perlunya inovasi dan fokus pada sektor bernilai tambah tinggi untuk mencapai target yang lebih optimal.

Sumber : BPS

Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin

2022 72,37%

Penurunan Lapangan Kerja Informal Sektor Non-pertanian

Target 2023 **72,70%**

2022 68,42%

Sumber : Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Tuban BPS

Upah Rata-rata per Jam Pekerja

2022 Rp. 15.870,16 per Jam

2023 Rp. 17.120 per Jam

Kenaikan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya mencapai pekerjaan layak dengan upah yang adil, sejalan dengan target SDGs 8.5



Sumber : Data Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang UMK

Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Capaian Tahun 2023

4,40%

Penurunan sebesar 0,10% dan sudah mencapai target tahun 2023 (4,4%)

Sumber : BPS

Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB



2022

1,22%



2023

2,30%

Jumlah Wisatawan Mancanegara

2022 35

2023 103

Jumlah Wisatawan Nusantara

2022 6.124.619








2023 6.817.182

Sumber : RPJMD BPS

3.2.2 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 8

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita	BPS	%	8,3	4,42	5,63	
8.1.1 (a)	PDB per kapita	BPS	Juta Rupiah	62058701,35	56.080.000	67.175.827,25	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	%	9,44	9,66	0,31	
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin	Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Tuban BPS	%	72,37	72,70	68,42	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Tuban BPS	%	27,63	28,64	31,58	
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Tuban BPS	%	39,77	39,53	39,52	
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.							
8.4.1 (a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan	Hasil diskusi dengan DKP2P	-	1	3	1	

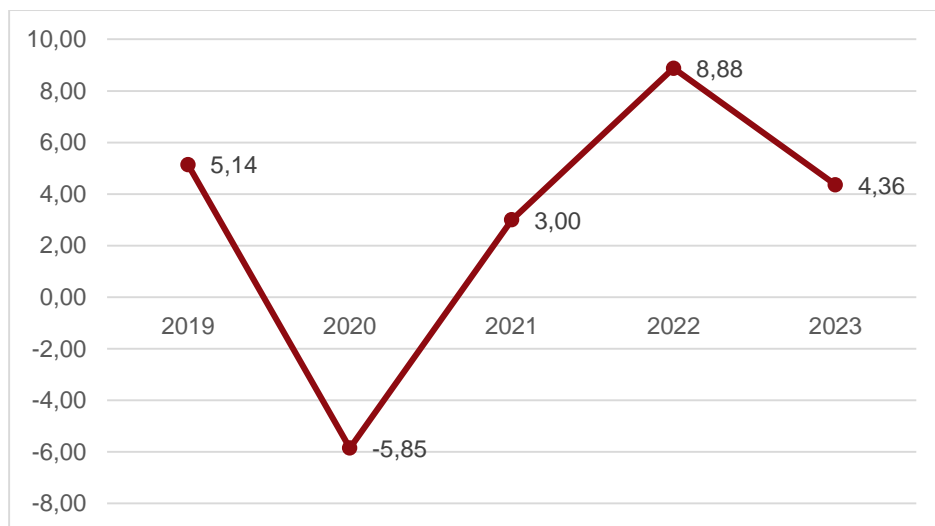
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
	Produksi Berkelanjutan						
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja	Data Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang UMK	Rupiah per jam	15.870,16	15.321,58	17.120,00	
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Data BPS	%	4,5	4,4	4,40	
8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
8.8.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	Data Disnakerperin	Jumlah	N/A	47	66	
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	%	1,22	1,23	2,30	
8.9.1 (a)	Jumlah wisatawan mancanegara	RPJMD BPS	Jumlah	35	53	103	
8.9.1 (b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	RPJMD BPS	Jumlah	6.124.619	7.186.928	6.817.182	
8.9.1 (c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	BPS	Juta Rupiah	578.497,5	582.297	109.492.250	
8.9.2"	Jumlah pekerja pada industri pariwisata atau Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Rentra Disbudporapar	%	N/A	39	96,23	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Laju Pertumbuhan PDRB

Kabupaten Tuban mengalami kontraksi dalam laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2020, dari 5,14% pada tahun sebelumnya menjadi -5,85%. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari pandemi Covid-19 yang tidak hanya membatasi

mobilitas masyarakat, tetapi juga menghambat berbagai sektor ekonomi. Pandemi menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi, baik di tingkat lokal maupun global, yang berdampak pada melemahnya daya tahan ekonomi di berbagai sektor. Pada tahun 2021, kondisi ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 mencapai 3%, didorong oleh perbaikan kondisi kesehatan masyarakat dan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas yang sebelumnya sangat ketat. Pemulihan ini berlanjut hingga tahun 2022, dengan PDRB Kabupaten Tuban melonjak menjadi 8,88%. Kenaikan signifikan ini mencerminkan kembalinya aktivitas ekonomi di berbagai sektor seiring dengan membaiknya situasi pandemi. Laju PDRB kembali mengalami perlambatan pada tahun 2023 hingga menjadi 4,36%. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa perlambatan ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas di beberapa sektor utama yang mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Tuban. Sektor-sektor seperti industri pengolahan, pertanian, kehutanan, perikanan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor mengalami perlambatan signifikan, yang turut berkontribusi pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban secara keseluruhan.



Gambar 3.14 Laju Pertumbuhan PDRB

Sumber: Tuban Dalam Angka, 2024 (Diolah)

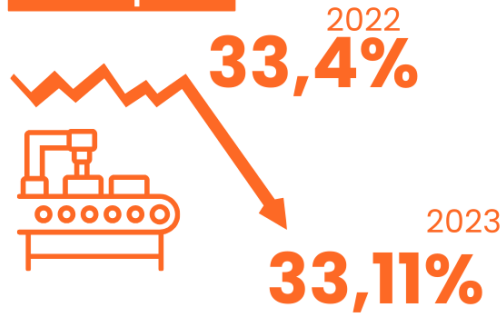
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE



#TUJUAN 9

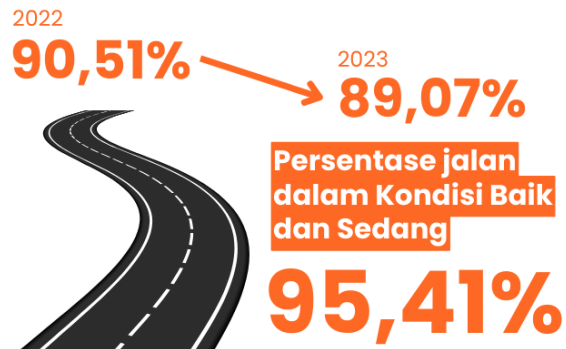
Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Distribusi Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB



Terjadi **penurunan** sebanyak 0,29% dan **tidak memenuhi target** sebesar **34,2%**

Persentase Desa Dengan Akses Jalan Tidak Rusak/Layak



Jalan layak desa justru menurun **1,44%** di saat persentase jalan baik-sedang meningkat sebesar **5,38%** dibandingkan dengan tahun 2022.

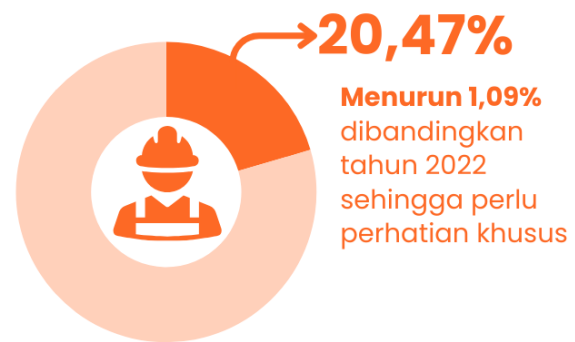
Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur per Kapita

No! Target 2023 sebesar **1,47%** tidak terpenuhi.

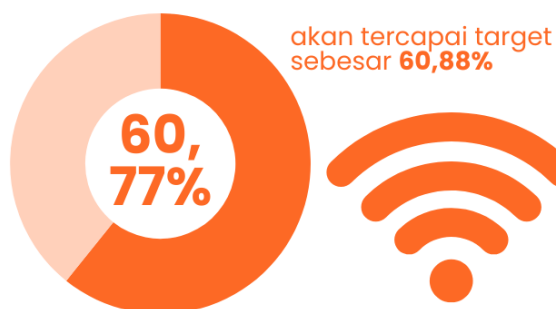


4/7 aspek yang perlu perhatian khusus

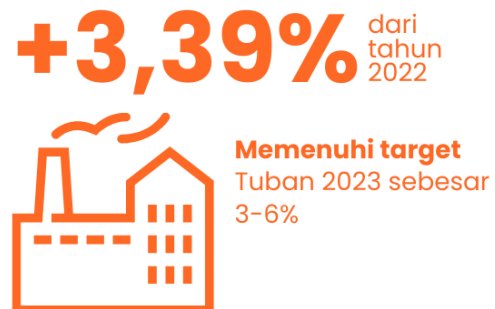
Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur



Proporsi Individu yang Menggunakan Internet










Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur



3.2.3 Tujuan 9 Infrastruktur, Industri dan Inovasi

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 9, infrastruktur, industri dan inovasi diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 9

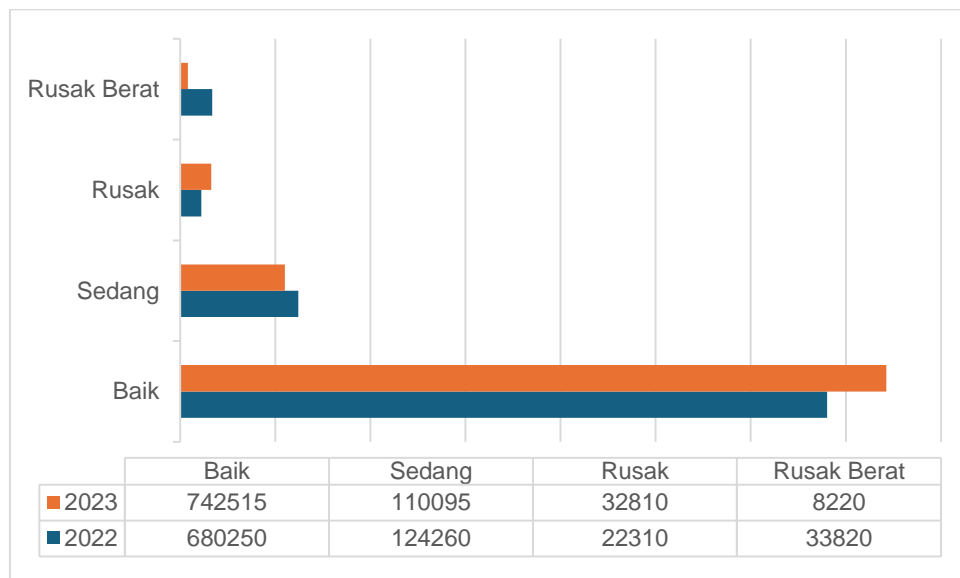
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua							
9.1.1 (a)	Kondisi mantap jalan nasional						
	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Kabupaten Tuban Dalam Angka 2023	%	90,03	90,87	95,41	
	Persentase Desa dengan akses jalan tidak rusak/ layak	Konfirmasi Data DPUPR PRKP	%	90,51	91,11	89,07	
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang							
9.2.1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita						
	Distribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB	RPJMD BPS	%	33,4	34,2	33,11	
	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita	RPJMD BPS	%	1,32	1,47	0,00	
9.2.1 (a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	RPJMD BPS	%	17,71	3 - 6	3,39	
9.2.2	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Laporan Eksekutif Keadaan Angkatan Kerja Kabupaten Tuban BPS	%	21,56	21,76	20,47	
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS	%	60,08	60,88	60,77	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

A. Kondisi mantap jalan Nasional

Kondisi mantap jalan nasional merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh. Infrastruktur ini, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Dalam konteks ini,

Kabupaten Tuban telah mencatat perkembangan signifikan dalam kondisi jalan selama periode 2022 hingga 2023. Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang di Kabupaten Tuban meningkat dari 90,03% pada tahun 2022 menjadi 95,41% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam memperbaiki dan menjaga kualitas jalan, yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat. Namun, meskipun ada peningkatan kualitas jalan secara keseluruhan, persentase desa dengan akses jalan yang tidak rusak atau layak mengalami sedikit penurunan dari 90,51% pada tahun 2022 menjadi 89,07% pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun banyak area telah mengalami perbaikan, masih ada tantangan dalam menyediakan akses jalan yang memadai di seluruh desa.



Gambar 3.15 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tuban (km), 2022-2023

Sumber : Tuban dalam Angka, 2024 (Diolah)

Secara rinci, panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari 680.250 km pada tahun 2022 menjadi 742.515 km pada Tahun 2023, sementara panjang jalan dalam kondisi sedang menurun dari 124.260 km menjadi 110.095 km. Di sisi lain, panjang jalan yang mengalami kerusakan meningkat dari 22.310 km menjadi 32.810 km pada Tahun 2023. Namun, kemajuan signifikan tercatat dalam pengurangan jalan rusak berat, yang menurun drastis dari 33.820 km menjadi 8.220 km pada periode yang sama. Secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan kemajuan yang berarti dalam upaya Kabupaten Tuban untuk memperbaiki infrastruktur jalan, terutama dalam meningkatkan kondisi jalan yang rusak berat. Namun, untuk mendukung pembangunan yang tangguh dan inklusif

sesuai dengan SDGs Tujuan 9, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua desa memiliki akses jalan yang layak dan berkualitas.

B. Sektor Industri

Sektor industri manufaktur terus menjadi pilar utama perekonomian dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yakni 33,4% pada tahun 2022 dan sedikit menurun menjadi 33,11% pada tahun 2023. Namun, ketimpangan distribusi manfaat terlihat dari perbedaan nilai tambah per kapita, dengan angka 1,32 di tahun 2022 dan 0,00 di tahun 2023, yang menunjukkan ketidakmerataan manfaat sektor ini di antara penduduk. Pertumbuhan PDB sektor manufaktur menunjukkan dinamika yang bervariasi, dengan laju 17,71% pada tahun 2022, mencerminkan adanya lonjakan permintaan atau inovasi, sementara pada tahun 2023 pertumbuhan melambat menjadi 3,39%, mungkin karena meningkatnya persaingan atau faktor eksternal. Proporsi tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini juga mengalami penurunan, dari 21,56% pada tahun 2022 menjadi 20,47% pada tahun 2023, yang bisa jadi akibat otomatisasi atau peralihan tenaga kerja ke sektor lain. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketimpangan manfaat dan perubahan dalam struktur tenaga kerja, industri manufaktur tetap menjadi sektor yang esensial dalam mendukung perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

10 REDUCED INEQUALITIES



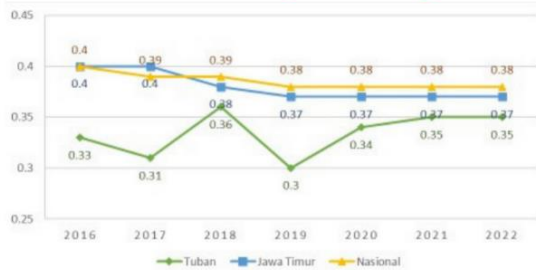
#TUJUAN 10

Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Koefisien Gini

2022 **0,345** 2023 **0,39**

Tingkat ketimpangan pendapatan Tuban tertinggi dalam **7 tahun terakhir**. Termasuk dalam kategori **sedang**.



Desa Tertinggal

TIDAK ADA desa yang tertinggal di Kabupaten Tuban pada tahun 2023



Desa Mandiri

2022 **73**

2023 **125**

Peningkatan jumlah desa mandiri dari **73 desa** di tahun 2022 ke **125 desa** di tahun 2023.

Penanganan HAM



48





penanganan **pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)** perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.



3.2.4 Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan

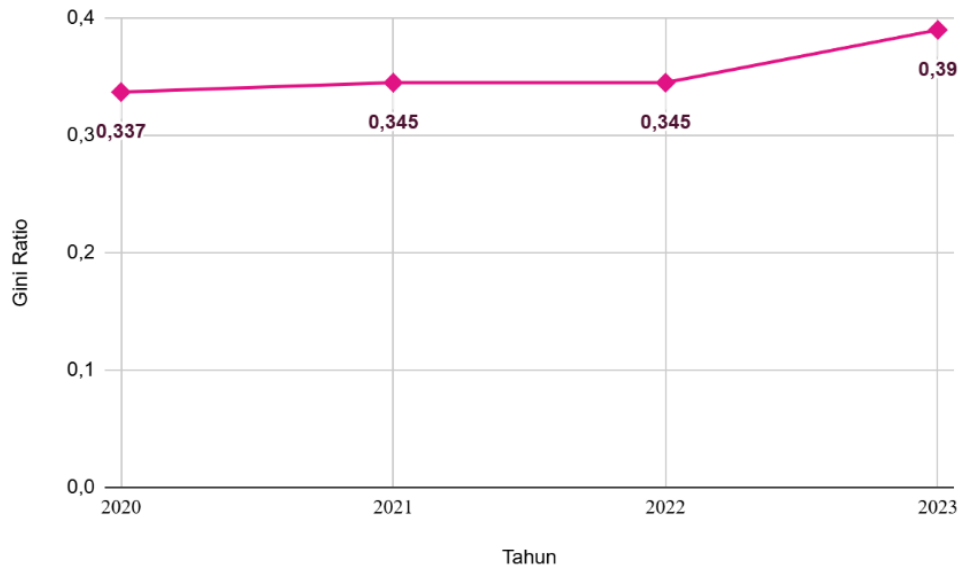
Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 10, mengurangi kesenjangan diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 10

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1*	Koefisien Gini.	RPJMD dan BPS	rasio	0,345	0,345	0,39	
10.1.1 (b)	Jumlah desa tertinggal.	Data DinsosP3A	Desa	0	0	0	
10.1.1 (c)	Jumlah Desa Mandiri.	RPJMD Renstra DinsosP3A	jumlah	73	125	125	
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut							
10.3.1 (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan	Renstra DinsosP3A	Kasus	N/A	<50	48	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Ketimpangan pendapatan dan pembangunan desa di kabupaten Tuban merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022, Kabupaten Tuban mencatat peningkatan nilai Gini Ratio dari 0,345 menjadi 0,39 di Tahun 2023 seperti yang disajikan pada Gambar 3.9, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut cenderung meningkat. Selain itu, jumlah desa mandiri di Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yang signifikan, dari 73 desa pada tahun sebelumnya menjadi 125 desa pada tahun berikutnya. Meskipun tidak ada desa yang tergolong tertinggal, peningkatan ketimpangan pendapatan ini tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam kemandirian desa, namun perhatian khusus diperlukan untuk mengatasi peningkatan ketimpangan yang terjadi.



Gambar 3.16 Gini Ratio Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024 (Diolah)



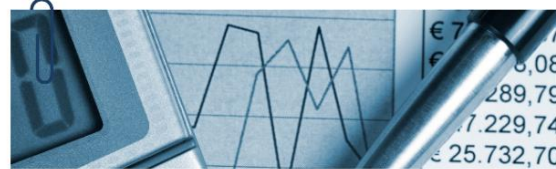
#TUJUAN 17

KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi Terhadap PDRB dan Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB



Sumber : BPS



Proporsi Anggaran Domestik yang Didanai oleh Pajak Domestik



Peningkatan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB dan proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak di Kabupaten Tuban mencerminkan perbaikan dalam pendanaan pembangunan lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan target SDGs 17.

Sumber : Dokumen LRA Kab. Tuban

Jumlah Pengunjung Eksternal yang Mengakses Data dan Informasi Statistik Melalui Website



Sumber : ppid.bps.go.id/app/statistik_website

Persentase Konsumen yang Puas terhadap Akses Data Badan Pusat Statistik (BPS)



Sumber : Dokumen Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Tuban 2019-2022



Secara keseluruhan, kedua indikator ini mengindikasikan peningkatan dalam penyebaran dan aksesibilitas data publik yang penting untuk mendukung transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data di tingkat lokal, sejalan dengan tujuan SDGs 17 untuk memperkuat cara pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Persentase Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik (Kumulatif)



Seluruh kecamatan di Kabupaten Tuban memiliki akses jaringan serat optik, memungkinkan warga menikmati internet cepat dan stabil, yang mendukung kemajuan ekonomi dan pendidikan.

Sumber : Renstra Diskominfo



Indikator-Indikator Statistik untuk Pemantauan SDGs

Kabupaten Tuban memiliki indikator statistik untuk memantau pencapaian SDGs, yang penting untuk menilai kemajuan pembangunan di berbagai bidang dan memastikan kebijakan berjalan efektif.

Sumber : SUSENAS, SAKERNAS




3.2.5 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 17

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPS	%	7,82	8,02	0,83	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PAD	BPS	%	3,93	3,96	0,44	
17.1.2	Proporsi anggaran domestic yang didanai oleh pajak domestik	Dokumen LRA Kab. Tuban	%	10,87	10,98	22,15	
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global							
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)	Renstra Diskominfo	%	100	100	100	
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional							
17.18.1	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs	Data-data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik SUSENAS, SAKERNAS	Ketersediaan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	RPJMD Renstra Dukcapil	%	100	100	100	
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	website (ppid.bps.go.id/app/statistik_website)	Jumlah pengunjung	25.898	33.887	33.887	

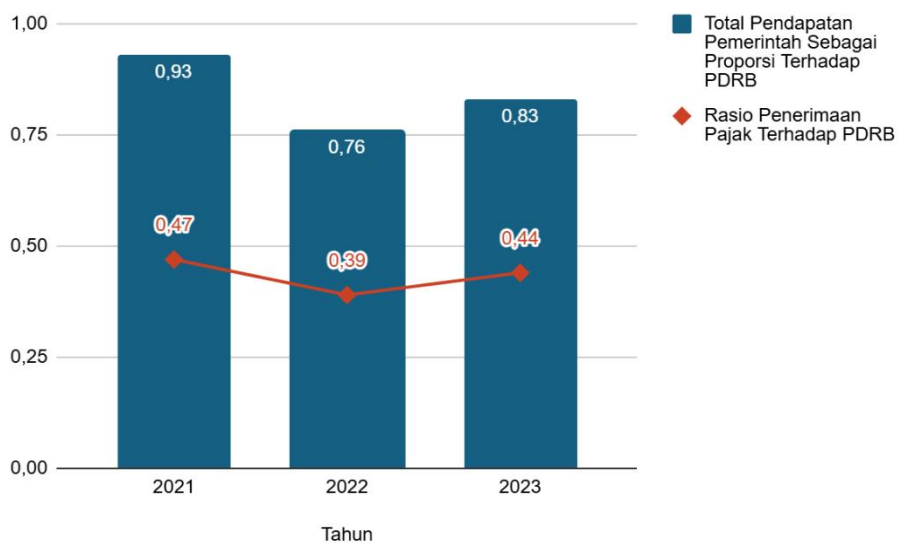
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Dokumen Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Tuban 2019-2022	%	100	100	100	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Tuban menduduki peringkat pertama se Provinsi Jawa Timur dengan mencapai angka 8,88% pada Tahun 2022 dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 5,34%. Capaian tersebut atas dasar program pemerintah Kabupaten Tuban yang mengencakan perekonomian dalam bidang UMKM dengan membuat satu misi untuk mencapai program *One Village One Product (OVOP)* dalam menggerakkan seluruh perekonomian rumah tangga yang ada di Kabupaten Tuban. Harapannya dari program tersebut semua rumah tangga yang menciptakan produk unggul dapat bersaing dengan UMKM lainnya dan memperoleh sertifikat halal, agar produk yang diproduksi terjamin mutunya dan lebih mudah untuk dipasarkan di Tuban maupun di luar Tuban hingga di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Dengan membangun program ini Bupati Tuban membawa dampak yang positif bagi masyarakat Tuban untuk terus berbenah dalam meningkatkan perekonomian khususnya di bidang UKMK meskipun pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban sebesar 4,36% angka tersebut sedikit melambat dibandingkan Tahun 2022 tetapi angka tersebut tetap menunjukkan tren yang positif. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban didominasi oleh sektor industri pengolahan yang mencapai angka 30,69%, capaian tersebut diikuti oleh sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta konstruksi, pertambangan dan penggalian serta informasi dan komunikasi. Program kerja pemkab Tuban dapat dikatakan berhasil untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari segala bidang di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

Keberhasilan angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2023 mencapai angka sebesar Rp 81.860,06 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 dan 2021. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Tuban meningkat karena di pengaruhi oleh program

pemkab Tuban yang berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Tuban dengan segala kebijakan dan program kerja yang diterapkan untuk mendorong kinerja ekonomi di Kabupaten Tuban. Berdasarkan analisis Tahun 2023 total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB yang merujuk pada indikator 17.1.1 dan rasio penerimaan pajak terhadap PDRB yang merujuk pada indikator 17.1.1.(a) mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.17 Total Pendapatan Pemerintah sebagai Proporsi terhadap PDRB dan Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB, Tahun 2021-2023

Sumber: BPKAD Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Keberhasilan pemkab Tuban untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tuban dibuktikan dengan total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB Tahun 2023 mencapai angka 0,83% yang mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022 meskipun hasil tersebut belum mencapai target ideal nasional sebesar 10,22 – 11,10%. Peningkatan tersebut didukung oleh rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Tahun 2023 yang mencapai angka 0,44% dibandingkan Tahun 2022 meskipun hasil tersebut belum mencapai target ideal nasional sebesar 8,41 – 8,87%. Meningkatnya total pendapatan daerah disebabkan oleh program kerja pemkab Tuban yang diluncurkan untuk memperbaiki perekonomian di sektor industri pengolahan oleh pemkab Tuban yang mengakibatkan pendapatan Kabupaten Tuban semakin membaik dengan selalu memperbaiki penerimaan pajak yang semakin membaik di Tahun 2023. Hasil

tersebut diharapkan masyarakat Tuban tetap mendukung program kerja pemkab Tuban agar selalu memperbaiki dan meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

3.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

**TUJUAN 6 AKSES AIR BERSIH DAN
SANITASI**

**6 AKSES AIR BERSIH
DAN SANITASI**



**TUJUAN 11 KOTA KOMUNITAS YANG
BERKELANJUTAN**

**11 KOTA DAN KOMUNITAS
YANG BERKELANJUTAN**



**TUJUAN 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI
YANG BERTANGGUNG
JAWA**

**12 KONSUMSI DAN
PRODUKSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB**



**TUJUAN 13 PENANGAN PERUBAHAN
IKLIM**

**13 PENANGAN
PERUBAHAN IKLIM**



TUJUAN 14 EKOSISTEM LAUTAN

**14 EKOSISTEM
LAUTAN**



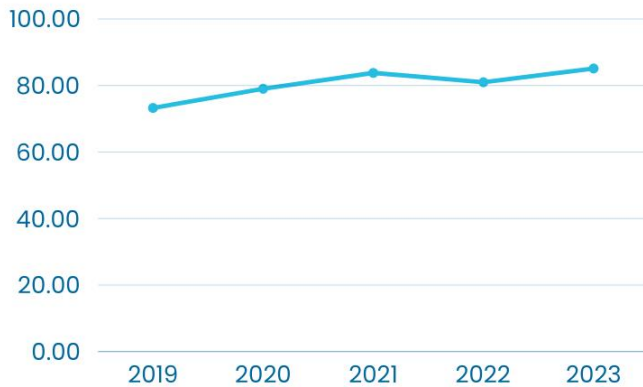
6 CLEAN WATER AND SANITATION



#TUJUAN 6

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak



Secara umum, akses rumah tangga terhadap layanan sanitasi layak mengalami peningkatan yang konsisten selama empat tahun terakhir, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun keempat. Namun, persentase akhir menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga sekarang memiliki akses yang lebih baik terhadap sanitasi layak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini mencerminkan kemajuan dalam penyediaan layanan sanitasi di Kabupaten Tuban.

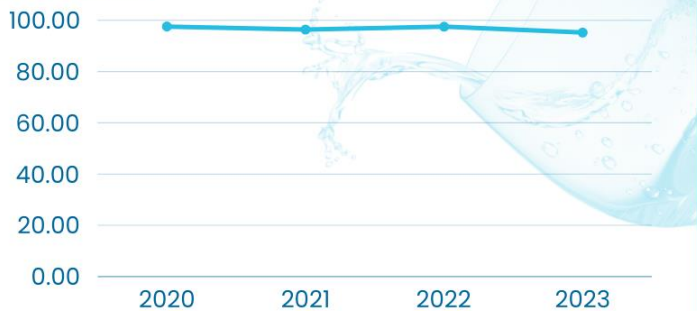
Sumber : RPJMD, Renstra DPUPR PRKP



Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Persentase rumah tangga di Kabupaten Tuban dengan akses terhadap sumber air minum layak menunjukkan angka tinggi dan relatif stabil: 97,58% hingga 95,22%. Ini menandakan sebagian besar rumah tangga masih memiliki akses yang baik, meski ada penurunan kecil yang perlu diperhatikan.

Sumber : RPJMD, Renstra DPUPR PRKP



Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku







Tahun 2022 **56,34%** → Tahun 2023 **59,76%** ↑







Peningkatan kualitas air permukaan sebagai air baku dari 56,34 menjadi 59,76 di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa kualitas air tersebut telah membaik. Angka ini menunjukkan bahwa air permukaan yang digunakan sebagai sumber air baku kini lebih memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang efektif dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya air di daerah tersebut.

3.3.1 Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua.

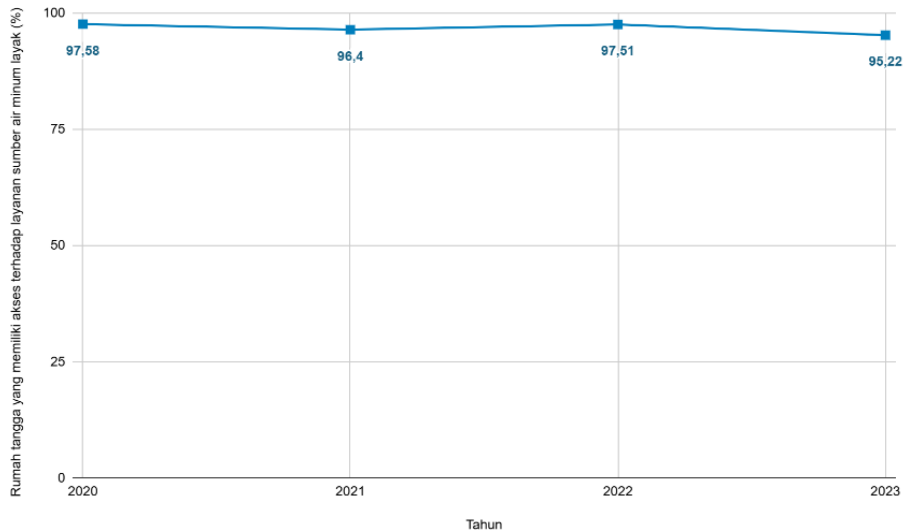
Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 6, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 6

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.						
	Persentase rumah tangga dengan jarak sumber air utama untuk minum ke tempat penampungan kotoran/limbah terdekat ≥ 10 meter	Konfirmasi Data DPUPR PRKP	%	67,20	74,24	77,10	
	cakupan akses air minum yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi	Renstra DPUPR PRKP	%	20,26	84,22	27,00	
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	RPJMD, Renstra DPUPR PRKP	%	90,86	87,82	91,52	
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. atau Persentase rumah tinggal bersanitasi	RPJMD, Renstra DPUPR PRKP	%	80,99	83,15	85,13	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan Kabupaten Tuban	Desa(%)	N/A	328 (100%)	328	
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Renstra Dinkes	Desa	193	328	328	

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat / *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T	Konfirmasi Data DPUPR PRKP	%	1,42	1,43	0,77	
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1 (a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman	Renstra DLHP	%	21,11	100	40,14	
6.3.2 (a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku	RPJMD, Renstra DLH	indeks	56,34	53,59	59,76	
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indek kualitas tutupan lahan dan gambut)	RPJMD Renstra DLH	indeks	50,2	50,8	50,92	
6.6.1(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.						
	Realisasi Reboisasi Kawasan Hutan	Kabupaten Dalam Angka	Ha	2852,24	tidak ditetapkan karena bukan kewenangan daerah	1.975,05	
	Persentase Realisasi Reboisasi Kawasan Hutan	diolah dari Kabupaten Dalam Angka	%	7,96	tidak ditetapkan karena bukan kewenangan daerah	3,63	

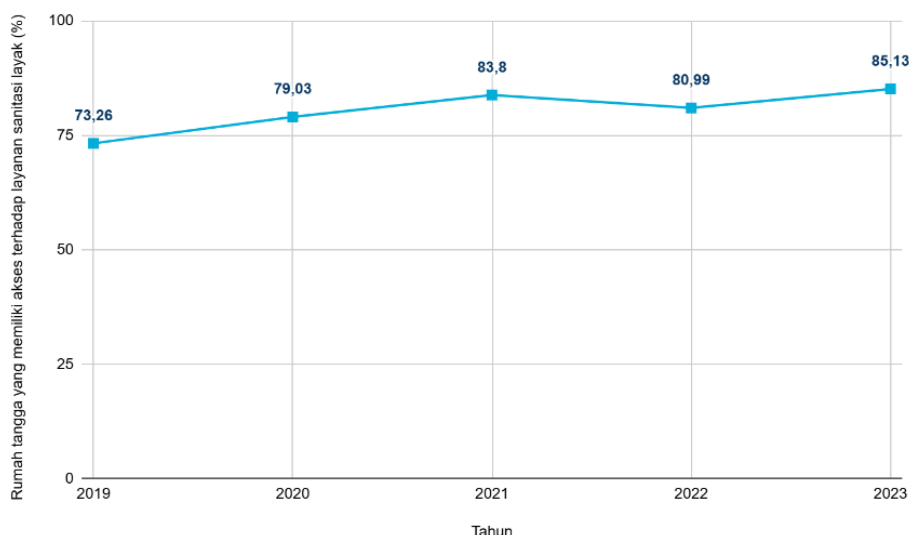
Sumber: Hasil Analisis, 2024



Gambar 3.18 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Kabupaten Tuban menunjukkan fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, cakupan akses air minum layak tercatat cukup tinggi, yaitu 97,58%. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,18% menjadi 96,4%. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan kembali hingga mencapai 97,51%, sebelum kembali mengalami penurunan pada 2023, di mana persentasenya turun sebesar 2,29%, menjadi 95,22%. Pergerakan data ini mencerminkan dinamika dalam upaya penyediaan air minum layak di Kabupaten Tuban. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2022, penurunan di tahun 2023 menunjukkan bahwa akses air minum layak belum stabil dan merata. Masalah ini masih menjadi perhatian karena beberapa desa di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya mendapatkan kemudahan akses air bersih. Pemerintah telah menetapkan target untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap air minum layak, sehingga dibutuhkan komitmen yang lebih kuat serta pendekatan yang lebih proaktif untuk memastikan seluruh masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau, dapat menikmati hak atas air bersih yang layak.



Gambar 3.19 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024 (Diolah)

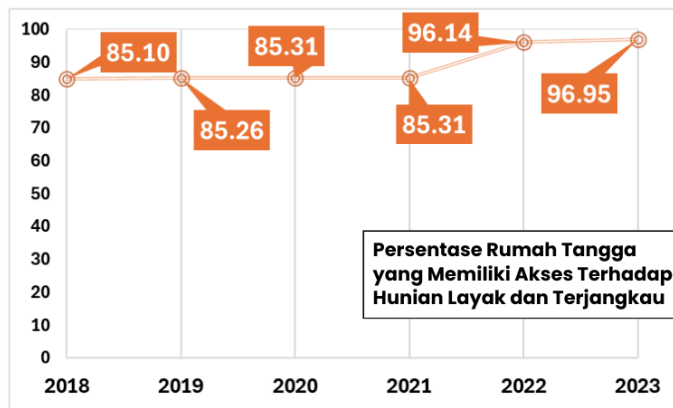
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Tuban menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak berada di angka 73,26%. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020, dengan kenaikan sebesar 5,77%, sehingga persentasenya meningkat dari 73,26% menjadi 79,03%. Selanjutnya, persentase ini terus naik hingga mencapai 83,8% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan sebesar 2,81%, sehingga persentase turun menjadi 80,99%. Meskipun demikian, pada tahun 2023, persentase kembali meningkat sebesar 4,14%, mencapai 85,13%, mencerminkan pemulihan dan perbaikan dalam akses terhadap sanitasi layak di wilayah tersebut. Pencapaian pada tahun 2023 ini sudah melampaui target SDGs Kabupaten Tuban yang ditetapkan sebesar 83,15% untuk akses sanitasi layak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas sanitasi tidak hanya berhasil memulihkan penurunan di tahun sebelumnya, tetapi juga memenuhi dan melampaui target pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan untuk Kabupaten Tuban. Hal ini tentu merupakan perkembangan positif dalam upaya mencapai standar sanitasi yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tuban.



#TUJUAN 11

Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

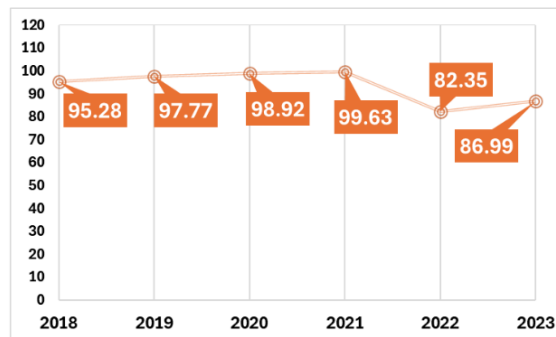
Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau



Pemerintah Tuban telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses rumah tangga terhadap perumahan yang layak. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan lebih banyak keluarga yang dapat menikmati tempat tinggal layak sehingga mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Sumber : RAD Jatim 2020, RPJMD, Renstra DPUPR PRKP

Indeks Kualitas Udara



Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tuban dari tahun ke tahun umumnya berada dalam kategori **kualitas udara sedang**.

Dalam kategori ini, individu yang sensitif disarankan untuk membatasi aktivitas luar ruangan yang berkepanjangan.

Penurunan IKU yang signifikan hanya terjadi pada tahun 2022, yang dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19.



Sumber : RAD Jatim 2020, RPJMD, Renstra DPUPR PRKP

Akses Pelayanan Pengelolaan Sampah

69,23 %

Rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah

Sebagian besar rumah tangga memiliki akses layanan pengelolaan sampah yang memadai.



Sumber : RAD Jatim 2020, RPJMD, Renstra DPUPR PRKP

Akses Pelayanan Transportasi Umum

45,12 %

Penduduk terlayani transportasi umum.



Hampir setengah dari populasi memiliki akses ke layanan transportasi umum, yang penting untuk mobilitas dan kesejahteraan masyarakat.




Sumber : RPJMD, Renstra DLHP

3.3.2 Tujuan 11 Perkotaan dan Permukiman yang Berkelanjutan

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 11, perkotaan dan permukiman yang berkelanjutan diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 11

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh							
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Konfirmasi Data DPUPR PRKP	%	4,12	3,90	3,36	
11.1.1 (a)	Proporsi/Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	RAD Jatim 2020, Konfirmasi Data DPUPR PRKP	%	96,14	96,21	96,95	
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua							
11.2.1 (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	RPJMD, Renstra DLHP	%	N/A	36,41	45,12	
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia							
11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil	Data Disbudpar	desa	2	2	2	
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan							
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Data BPBD	Jumlah per 100.000 orang	3,97	2,73	N/A	
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana (IRB) Indonesia	Renstra BPBD	Indeks	139,87	137,92	114,78	
11.5.1.(b)	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	RAD Jatim 2020	Desa	119	139	119	
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	RAD Jatim 2020	Jumlah	N/A	4	3	

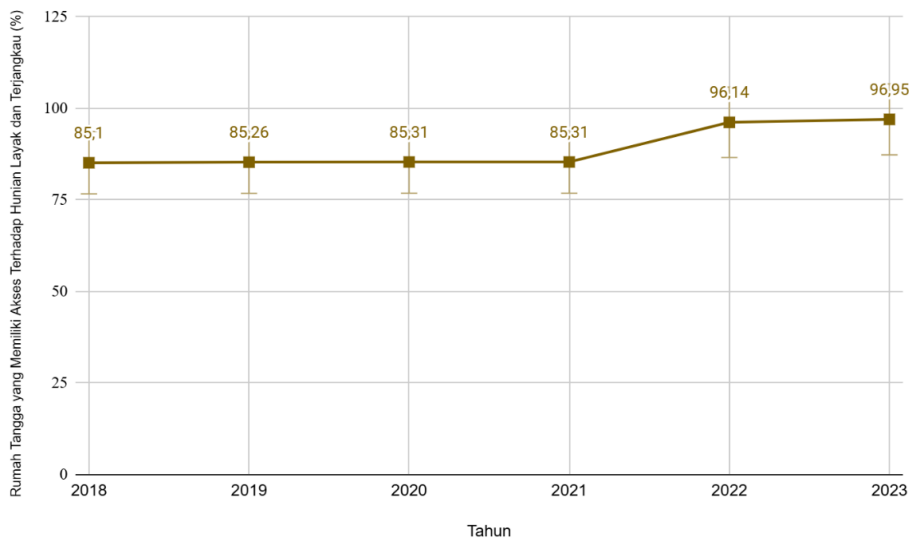
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
11.5.2 (a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	-	Persen (%)	0,009	0,01	N/A	—
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	-	Juta Rupiah	4.278,2	49.157,50	N/A	—
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
11.6.1 (a)	*Persentase sampah perkotaan yang tertangani / Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah	RAD Jatim 2020, RPJMD, Renstra DPUPR PRKP	Persen (%)	N/A	15,64	69,23	
11.6.2 (b)	Indeks kualitas udara	RPJMD, Renstra DLHP	Indeks	82,35	79,42	86,99	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
11.7.1 (a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	RPJMD, Renstra DPUPR PRKP	Persen (%)	12,19	4,92	12,19	
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030							
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	-	Jumlah	2	2	N/A	—

Sumber: Hasil Analisis, 2024

a. Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Kualitas hidup masyarakat disuatu daerah salah satunya dapat dilihat dari hunian yang layak dan terjangkau. Fondasi utama untuk membangun kualitas hidup yang sejahtera ialah semua aspek yang dibutuhkan harus terpenuhi seperti rumah layak huni, sanitasi layak, dan air bersih. Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya sinergi SDGs dengan rancangan pembangunan jangka

menengah nasional dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28(h) tentang perumahan dan permukiman yang layak adalah salah satu kebutuhan dasar seperti halnya pendidikan dan kesehatan yang pemenuhannya dijamin. Aksi global untuk melindungi lingkungan, mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan salah satu komitmen dunia internasional untuk memenuhi hak atas perumahan yang layak tertuang dalam SDGs Tuban yang merujuk pada indikator 11.1.1 (a).



Gambar 3.20 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Sumber: DPRKP Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Capaian pemkab Tuban untuk menyejahterakan kualitas hidup masyarakat Tuban mencapai angka diatas 80% capaian tersebut dapah dilihat pada Gambar 3.10 dari Tahun 2018 hingga 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan bahwa pemkab tubah selalu berbenah dalam memajukan Kabupaten Tuban baik dari segi perekonomian maupun kualitas hidup masyarakat Tuban yang dipastikan kesejahteraannya sudah terpenuhi atau layak untuk hidup atas garis kemiskinan. Tahun 2022 dan 2023 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau mencapai angka 95% lebih, yang berarti dari tahun ke tahun pemkab Tuban selalu memperhatikan kesejahteraan hidup masyarakat Tuban baik dari kalangan menengah keatas hingga menengah kebawah. Capaian tersebut dapat dibuktikan dengan rumah tangga yang memiliki

akses terhadap hunian layak yang terjangkau per kecamatan di Kabupaten Tuban yang disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.13 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tuban Tahun 2023

No	Lokasi Kecamatan	Jumlah Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah
1	Kec. Parengan	16.214	154	16.368
2	Kec. Bancar	16.242	416	16.658
3	Kec. Singgahan	11.962	411	12.373
4	Kec. Rengel	17.588	1.703	19.291
5	Kec. Kenduruan	9.145	963	10.108
6	Kec. Plumpang	20.453	332	20.785
7	Kec. Widang	10.139	275	10.414
8	Kec. Tuban	22.815	157	22.972
9	Kec. Bangilan	13.341	391	13.732
10	Kec. Montong	14.451	721	15.172
11	Kec. Grabagan	12.007	1.410	13.417
12	Kec. Palang	23.841	768	24.609
13	Kec. Senori	12.710	669	13.379
14	Kec. Merakurak	17.575	957	18.532
15	Kec. Soko	23.106	356	23.462
16	Kec. Tambakboyo	10.720	1.012	11.732
17	Kec. Jenu	16.323	368	16.691
18	Kec. Semanding	33.649	1.222	34.871
19	Kec. Jatirogo	14.245	734	14.979
20	Kec. Kerek	8.867	1.793	10.660
Kab. Tuban		325.393	14.812	340.205

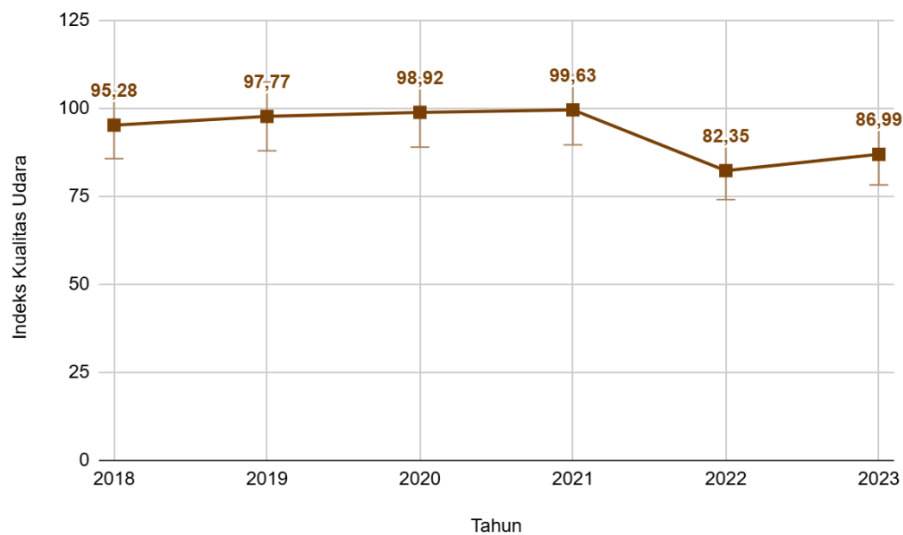
Sumber: DPRKP Kabupaten Tuban, 2024

Perbandingan jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni pada Tahun 2023 dengan jumlah rumah keseluruhan di Kabupaten Tuban sebanyak 340.205 dan jumlah rumah layak huni sebanyak 325.393 serta jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 14.812. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut cukup membuktikan bahwa angka rumah tangga layak huni di Kabupaten Tuban mencapai angka 95% yang berarti Pemkab Tuban harus memberikan perhatian khusus terhadap 5% sisanya yang masih belum memperoleh kehidupan layak huni terutama di Kecamatan Kerek dan Rengel dengan jumlah rumah tidak layak huni paling banyak sekitar 1.700 lebih. Meskipun Pemkab Tuban sudah dapat dikatakan berhasil dalam mendorong kualitas hidup masyarakat Tuban menjadi lebih sejahtera namun sebagian kecil masyarakat Tuban masih membutuhkan perhatian khusus pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat Tuban yang masih hidup

di bawah garis kemiskinan. Hasil capaian ini diharapkan Pemkab Tuban terus berbenah dalam meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian Kabupaten Tuban agar menjadi kabupaten yang lebih sejahtera kedepannya tanpa ada ketimpangan antar masyarakatnya.

b. Akses pada Kualitas Udara

PM 2.5 dengan konsentrasi sekitar $24.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ merupakan angka polutan utama yang mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Tuban, angka tersebut lebih tinggi 4,8 kali dari nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Kabupaten Tuban mempunyai 4 titik untuk memantau kualitas udara ambien yang mewakili area transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri. Pada titik transportasi di Kabupaten Tuban meningkatkan IKU didukung oleh uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh OPD terkait serta meningkatkannya kesadaran bersepeda (gowes) sebagai bagian dari pengurangan penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-hari (RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026). Hasil analisis IKU Tahun 2018 hingga 2023 di Kabupaten Tuban dapat disajikan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.21 Indeks Kualitas Udara

Sumber: DIKPLHD Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Tahun 2023 indeks kualitas udara yang merujuk pada indikator 11.6.2 (b) berada pada kategori baik dengan angka IKU sekitar 86,99 berdasarkan Gambar 3.11. Meskipun IKU di Kabupaten Tuban berada pada kategori baik, namun pada Tahun 2022-2023 kualitas udara di Kabupaten Tuban mengalami penurunan dari

Tahun sebelumnya dikarenakan berkembangnya wilayah Tuban dengan sektor Industri dan teknologi yang mempengaruhi polusi udara di sekitar wilayah Tuban. Seiring berkembangnya sektor industri yang menerapkan teknologi yang canggih, hendaknya Pemkab Tuban tetap mempertimbangkan polusi udara karena mempengaruhi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Tuban meskipun secara perekonomian sektor industri sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Tuban seharusnya kesadaran akan polusi udara harus diperhitungkan untuk wilayah di sekitar Kabupaten Tuban karena sektor industri salah satu sektor yang mempengaruhi kualitas udara.

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION



#TUJUAN 12

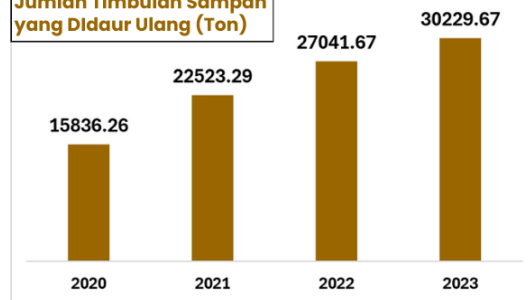
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan



Dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-12, Pemerintah Tuban berkomitmen untuk memastikan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan ini berfokus pada mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mempromosikan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Sampah yang Didaur Ulang

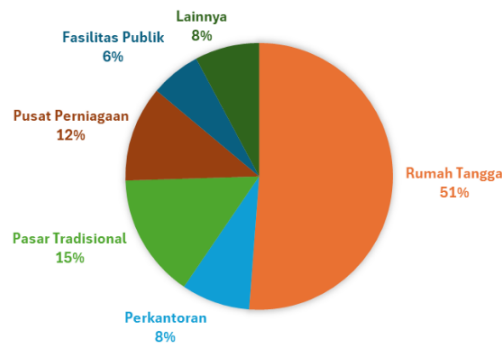
Jumlah Timbulan Sampah yang Didaur Ulang (Ton)



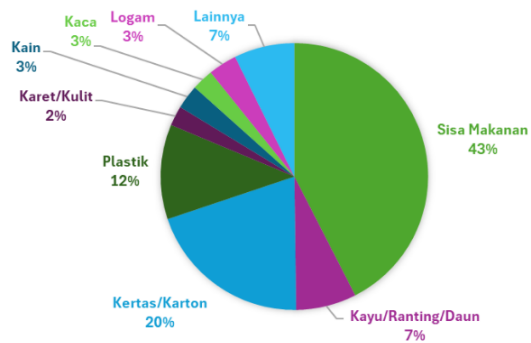
Peningkatan aktivitas daur ulang timbulan sampah tiap tahun menunjukkan pengelolaan sampah yang semakin baik di Kabupaten Tuban.

Sumber : Renstra DLHP

Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah

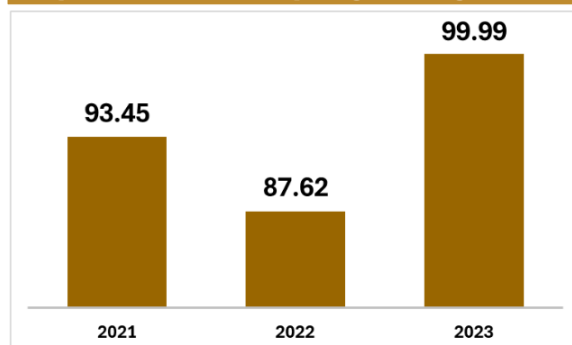


Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah



Sumber : SIPSN

Proporsi Limbah B3 yang Ditangani/Diolah







Proporsi pengolahan limbah B3 di Kabupaten Tuban **sangat baik**, mencapai 99,99% pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan komitmen serius Pemerintah Kabupaten Tuban dalam menangani limbah dan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola sampah secara efektif.

Sumber : DLHP

3.3.3 Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 12, Pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.14 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 12

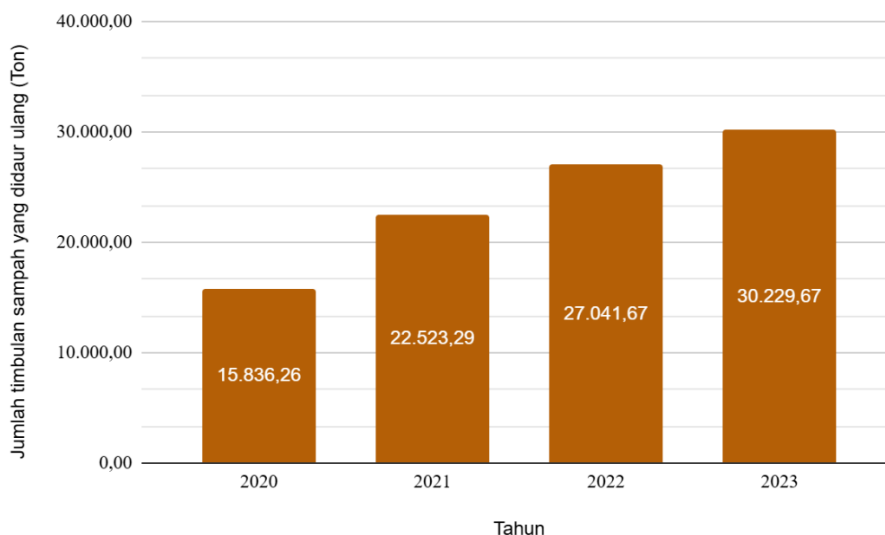
Indikator SDGs	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang							
12.1.1	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Hasil diskusi dengan DKP2P	dokumen	1	3	1	
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan							
12.4.2	(a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya	Konfirmasi Kuisisioner DLHP	%	100	100	99,99	
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Renstra DLHP	ton/tahun	27.041,67	6.013,39	30.229,67	
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal							
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.	LKPJ Kabupaten Tuban	-	Ada	Ada	Ada	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Menuju lingkungan sehat dan bersih harus mempunyai kesadaran tersendiri baik dari masyarakat maupun pemerintah. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih tentu tidak mudah bahkan menjadi tantangan sendiri untuk pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga

lingkungan agar mempunyai lingkungan yang lebih bersih untuk menuju Indonesia hidup sehat dari timbunan sampah yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Kesadaran menuju Indonesia bebas sampah tentu tidak mudah, jika tidak di dukung oleh masyarakat dan pemerintah, meskipun pemerintah sudah menetapkan bahwa 21 Februari merupakan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).

Peringatan HPSN harus menjadi milik masyarakat karena dengan adanya HPSN masyarakat dapat lebih peduli terhadap sampah dilingkungan sekitarnya. Pemerintah daerah telah berusaha mengaplikasikan hal tersebut dengan caranya masing-masing agar tercipta lingkungan yang sehat dan bersih. Sebagai contoh Kabupaten Tuban yang terpilih sebagai lokasi dengan pengolahan sampah menggunakan teknologi *Refused Derived Fuel* (RDF). Fasilitas teknologi tersebut cukup berhasil diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban dengan capaian paling tinggi yaitu Tahun 2023 Pemkab Tuban memperoleh penghargaan adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhubungan (LHK). Penghargaan tersebut dibuktikan dengan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang oleh pemerintah Kabupaten Tuban dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Program tersebut merujuk pada indikator 12.5.1.(a) tentang timbulan sampah yang didaur ulang disajikan pada Gambar 3.12.

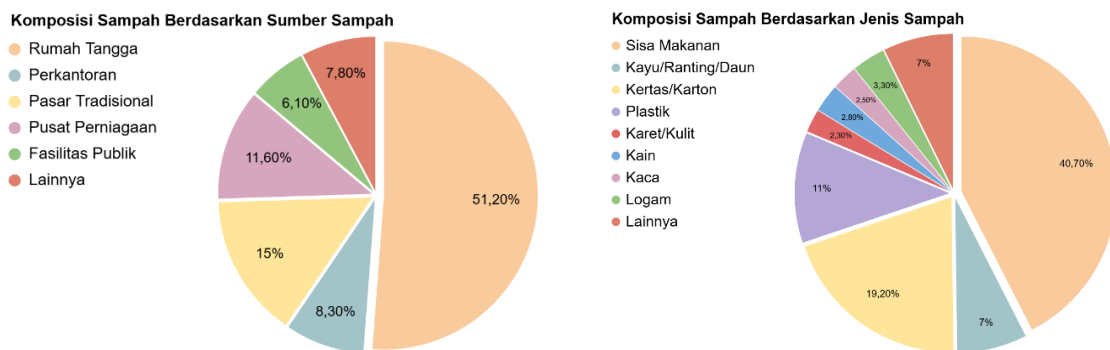


Gambar 3.22 Jumlah Timbulan Sampah yang di Daur Ulang di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023

Sumber: SIPSN Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Keberhasilan Kabupaten Tuban dalam mendaur ulang sampah dengan diterapkan teknologi RDF yang dibuktikan dengan jumlah timbulan sampah yang di

daur ulang pada Gambar 3.12 semakin meningkat dari Tahun 2020 hingga 2023 yang mencapai angka 30229,67 ton/tahun. Hasil tersebut di dukung dengan berdirinya 107 bank sampah dari 328 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Tuban. Dengan demikian, pemkab Tuban berharap kepada masyarakat Tuban untuk lebih peduli akan partisipasi aktif untuk mewujudkan Kabupaten Tuban menjadi salah satu kabupaten yang ramah lingkungan, bersih dan bebas dari segala macam sampah yang ada di sekitar Tuban. Sementara sampah rumah tangga masih menjadi faktor terbesar akan timbulan sampah yang ada di Kabupaten Tuban, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.13 bahwa masyarakat Tuban kurang perhatian akan sampah yang ada disekitarnya.

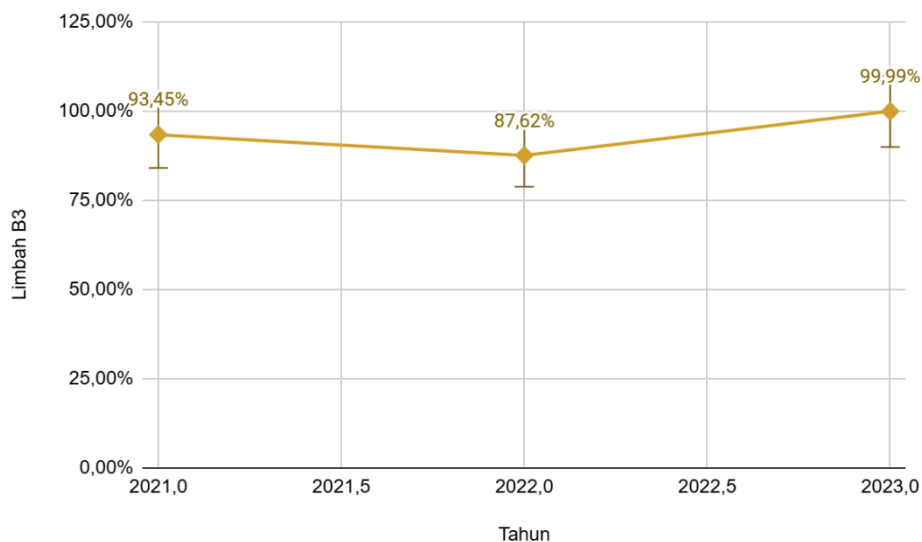


Gambar 3.23 Persentase Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah dan Jenis Sampah di Kabupaten Tuban Tahun 2023

Sumber: SIPSN Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Pada Tahun 2023 komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dan jenis sampah di Kabupaten Tuban dapat dijelaskan pada Gambar 3.13 yaitu sampah rumah tangga mencapai angka 51,20% dan sampah sisa makanan mencapai angka 40,70%. Hampir separuh timbulan sampah disebabkan oleh masyarakat Tuban sendiri yang kurang memperhatikan sampah yang ada disekitarnya sehingga perlu perhatian khusus kepada pemkab Tuban untuk terus mengedukasi masyarakat Tuban khususnya yang kurang mengenal tentang teknologi RDF yang sudah diterapkan di Kabupaten Tuban. Hal tersebut selaras dengan program kerja RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 salah satunya ialah program pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Program kerja tersebut membahas tentang memulihkan, membangun dan memantapkan lingkungan yang partisipatif dalam perencanaan pembangunan berwawasan serta selaras dengan lingkungan alam dan sosial.

Teknologi RDF yang diterapkan di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 hingga saat ini diprediksi dapat mengelola sampah lebih dari 90% sampah, dari teknologi tersebut pemkab Tuban tidak hanya mengelola sampah rumah tangga namun juga mengelola pembakaran limbah B3 beracun yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif untuk menggantikan penggunaan batu bara. Penerapan teknologi tersebut cukup efektif dilakukan di Kabupaten Tuban karena berdasarkan Gambar 3.14 yang merujuk pada indikator 12.4.2, Tahun 2023 limbah B3 yang dihasilkan per kapita dan proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya/pengelolaannya mendekati angka 100%. Pada Tahun 2021 hingga 2022 teknologi RDF belum diterapkan di Kabupaten Tuban sehingga proporsi limbah B3 mengalami penurunan di Tahun 2022 sebesar 87,62%, namun setelah teknologi tersebut diterapkan proporsi limbah B3 meningkat sebesar 99,99% di Tahun 2023. Hasil tersebut selaras dengan keinginan pemkab Tuban yang berharap pengelolaan sampah ataupun limbah B3 mencapai angka lebih dari 90% dan hasil indikator ini juga selaras dengan RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026 yang membahas tentang pengendalian bahan berbahaya dan beracun limbah B3.



Gambar 3.24 Limbah B3 yang Dihasilkan Per Kapita dan Proporsi Limbah B3 yang Ditangani/Diolah Berdasarkan Jenis Penanganannya/Pengelolaannya di Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023

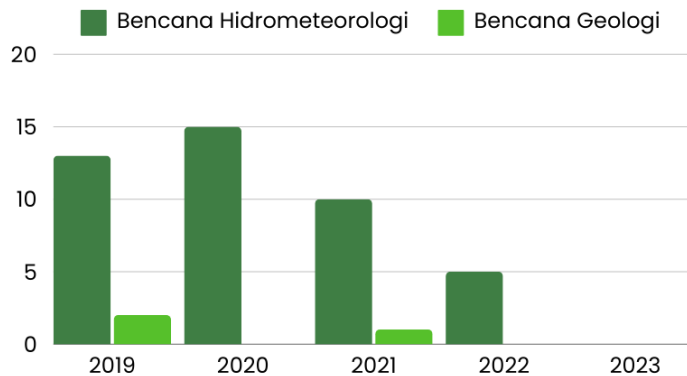
Sumber: DLHP Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)



#TUJUAN 13

Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Tren Penurunan Bencana Hidrometeorologi dan Geologi di Kabupaten Tuban



PENGERTIAN

Indikator yang ditampilkan dalam grafik dan tabel ini menunjukkan jumlah kejadian bencana Hidrometeorologi dan Geologi di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2023, yang merupakan salah satu indikator terkait SDG (Sustainable Development Goal) 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim.

Sumber : BPS Jatim

Bencana Hidrometeorologi

- Terjadi penurunan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi dari 2019 hingga 2023.
- Pada 2019 terjadi 13 bencana, meningkat menjadi 15 pada 2020, tetapi menurun menjadi 10 pada 2021, 5 pada 2022, dan akhirnya 0 pada 2023.
- Penurunan ini dapat menjadi indikasi peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim atau hasil dari intervensi terkait mitigasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, hujan lebat, atau badai yang sering dikaitkan dengan perubahan iklim.

Bencana Geologi

- Jumlah bencana geologi relatif kecil dan fluktuatif selama periode tersebut.
- Pada 2019 terjadi 2 bencana, namun tidak ada kejadian pada 2020, 1 bencana pada 2021, dan 0 kejadian pada 2022 dan 2023.
- Bencana geologi (seperti gempa bumi atau tanah longsor) mungkin tidak secara langsung terkait dengan perubahan iklim, tetapi penting dalam konteks kerentanan alam yang juga dapat diperparah oleh perubahan lingkungan.




Secara keseluruhan, tren penurunan kejadian bencana ini bisa menjadi sinyal positif bahwa ada peningkatan dalam pengelolaan risiko bencana, terutama bencana yang terkait dengan iklim. Namun, perlu juga dianalisis lebih dalam apakah penurunan ini akibat pengurangan risiko bencana yang efektif atau karena faktor lain seperti perubahan pola cuaca alami. Data ini penting dalam menilai keberhasilan upaya mitigasi bencana sesuai dengan tujuan SDG 13.

3.3.4 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

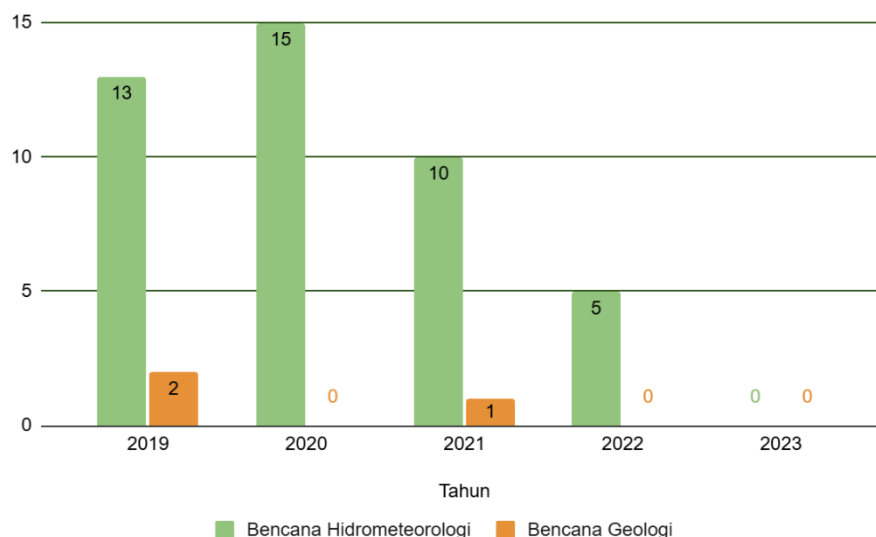
Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 13, penanganan perubahan iklim diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.15 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 13

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	-	Jumlah per 100.000 orang	tidak ada korban bencana hidrometeorologi/ bencana iklim	0,2	0	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Bencana yang disebabkan oleh proses geologis bumi dan perubahan iklim dan cuaca mempunyai nilai kerugian yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, jika sudah terjadi bencana seperti banjir dan gempa bumi dampaknya kepada masyarakat mempunyai tingkat kerugian yang sangat signifikan. Namun, masyarakat juga harus perlu tahu bahwa bencana terjadi karena beberapa faktor seperti ulah tangan manusia yang membuang sampah sembarang hingga faktor alam dan non alam. Oleh sebab itu, bupati Tuban membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan tersebut dengan melakukan pemetaan dari hulu ke hilir untuk mencegah bencana yang ada di Kabupaten Tuban khususnya bencana banjir yang sering terjadi di Tuban. Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan Gambar 3.14 yang memberikan informasi mengenai di Tahun 2020 terjadi bencana hidrometeorologi sebanyak 15 bencana yang terjadi di Kabupaten Tuban. Bencana hidrometeorologi diantaranya seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, gelombang pasang/abrasi, dll. Hal tersebut selaras dengan program bupati Tuban yang membuat tim khusus terkait pencegahan bencana di Kabupaten Tuban.



Gambar 3.25 Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024 (Diolah)

Acuan yang selaras dengan TPB/SDGs tentang upaya penanggulangan bencana ialah rencana induk penanggulangan bencana (RIPB) Tahun 2020-2044. Satu-satunya indikator SDGs yang berhubungan dengan bencana ialah indikator 13.1.1* tentang jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Jika dilihat dari frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 tidak terjadi bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi, yang berarti bahwa tidak terdapat korban jiwa akibat bencana pada Tahun 2023 di Kabupaten Tuban. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian dari program bupati Tuban yang membentuk tim khusus mengenai bencana diantaranya ialah BPBD, DLHP, Perhutani, dan Tim BBWS untuk membuat solusi yang tepat mengenai antisipasi terjadi bencana di Kabupaten Tuban, dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya karena BPBD telah mengkonfirmasi terkait capaian dari indikator 13.1.1* bahwa tidak ada korban bencana per 100.000 orang di Tahun 2023.

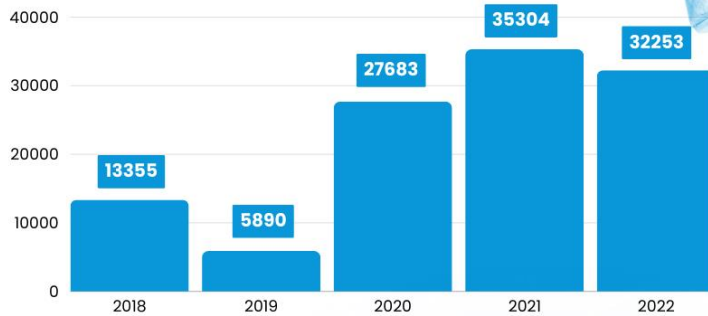
14 LIFE BELOW WATER



#TUJUAN 14

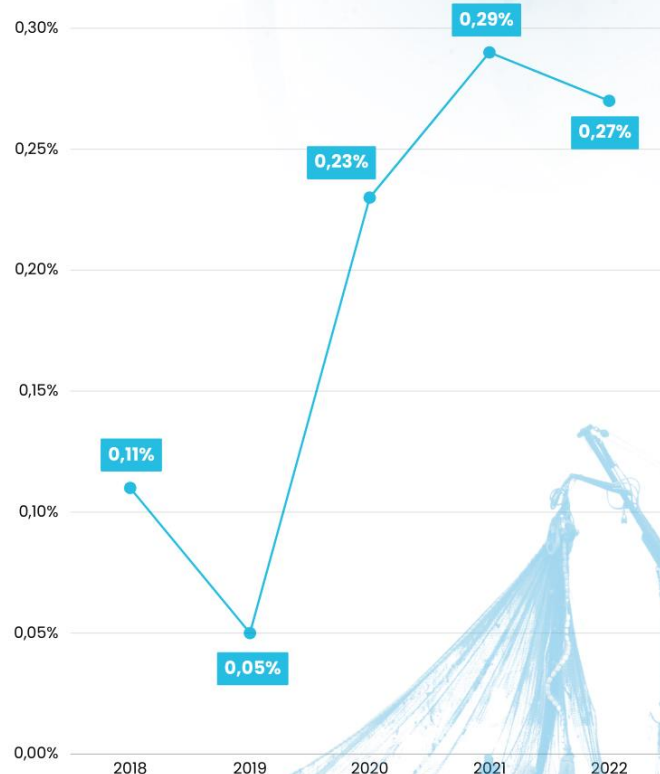
Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)



Data menunjukkan tren produksi komoditas tangkap di laut di Kabupaten Tuban dari tahun 2018 hingga 2022, dengan fluktuasi signifikan, mencapai puncaknya pada tahun 2021. Ini terkait dengan SDGs 14 yang berfokus pada kehidupan di bawah air. Tren ini mencerminkan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan komunitas nelayan lokal di Tuban.

Proporsi Tangkapan Ikan Laut (Ton)



Potensi Sumber Daya Ikan dan JTB di WPPNRI

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022, estimasi potensi sumber daya ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) adalah 12,01 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) adalah 8,6 juta ton per tahun.

Sumber: KPP

3.3.5 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 14, ekosistem lautan diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.16 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 14

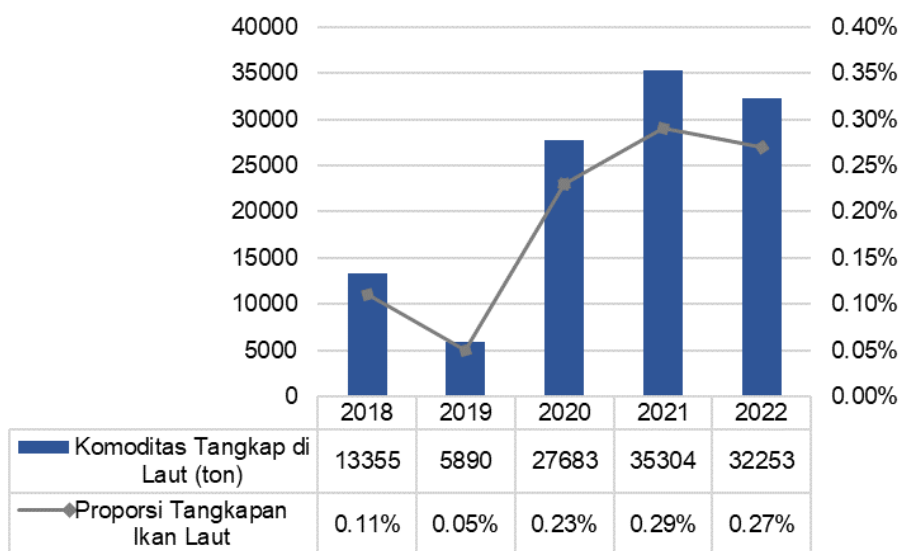
Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi							
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	FGD dengan perwakilan DKP3	nelayan	62,9	80,65	17,65	

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Hasil tangkapan ikan laut memberikan potensi ketahanan pangan dan penggerak ekonomi lokal bagi masyarakat yang hidup di sekitar pesisir. Namun, penangkapan ikan laut secara berkala harus mengikuti aturan sesuai batasan biologis yang sudah ditetapkan, karena jika penangkapan ikan dilakukan secara ilegal maka akan mengancam populasi ikan laut sehingga berpotensi mengalami kerugian bagi keberlangsungan nelayan lokal. Berdasarkan Kepmen KP no.19 Tahun 2022 ditetapkan oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penerapan perikanan berkelanjutan dengan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pada peraturan tersebut didalamnya juga ditetapkan 11 WPP tentang estimasi potensi sumber daya ikan mencakup 9 kelompok jenis ikan namun tidak termasuk ikan tuna sebesar 12.011.125 ton/tahun. Adanya peraturan tersebut diharapkan dapat melestarikan biota laut agar tetap terjaga pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan dan menjaga kekayaan laut untuk keberlanjutan tangkap ikan laut.

Sektor perikanan laut di Kabupaten Tuban berpotensi besar dalam penggerak ekonomi lokal pada penangkapan ikan laut karena sekitar 60% ikan yang di konsumsi oleh masyarakat Tuban berasal dari daerah pesisir Tuban yang memiliki potensi mata pencaharian dan penghasilan dari tangkapan ikan. Penting bagi masyarakat Tuban yang memilih mata pencaharian sebagai nelayan untuk tetap melestarikan laut agar tetap terjaga keberlangsungan nelayan lokal untuk menangkap ikan laut secara berkelanjutan. Tentu saja nelayan harus tetap menjaga proporsi penangkapan ikan secara terukur sesuai dengan batas biologi

yang aman sesuai peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah sehingga laut sekitar pesisir Tuban terus terjaga kelestarian dan kehidupan biota laut yang secara berkala bisa di tangkap oleh nelayan lokal yang ada di sekitar pesisir Tuban. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban telah mengkonfirmasi jumlah nelayan yang terlindungi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023 sebanyak 17,65 nelayan sedangkan Tahun 2022 sebanyak 62,9 nelayan. Hasil capaian yang merujuk pada indikator 14.b.1.(b) tentang jumlah nelayan yang dilindungi di Kabupaten Tuban mengalami penurunan dari tahun lalu namun untuk proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis di Kabupaten Tuban disajikan pada Gambar 3.15.



keterangan:

- Formula perhitungan proporsi tangkapan ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) = jumlah tangkapan ikan laut/MSY
- MSY 2022 mengacu pada Kepmen KP No.19/2022 = 12.010.000 ton

Gambar 3.26 Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Laut yang Berada dalam Batasan Biologis di Kabupaten Tuban Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Jawa Timur dan KPP, 2024 (Diolah)

Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis Kabupaten Tuban Tahun 2018 hingga 2022 mencapai angka dibawah 1% dengan jumlah komoditas tangkap ikan laut di Kabupaten Tuban Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya sebanyak 32253 ton. Hasil tersebut membuktikan bahwa Kabupaten Tuban masih berada dalam batas biologis yang aman dalam tangkapan ikan yaitu dibawah 80% dari potensi sumber daya ikan laut. Sehingga dengan hasil yang dicapai tersebut Kabupaten Tuban dapat tetap terus

menjaga kelestarian sumber daya ikan laut agar tetap terjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat Tuban pada bidang perikanan. Pemerintah Kabupaten Tuban hekdaknya tetap menjada kelestarian tersebut secara berkala dan berkelanjutan agar usaha di bidang perikanan terus terjaga untuk kepentingan perekonomian masyarakat pesisir Tuban.

3.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

**TUJUAN 16 PERDAMAIAN
Keadilan dan
Kelembagaan yang
kuat**

16 PERDAMAIAN
Keadilan dan
Kelembagaan yang kuat



16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS



#TUJUAN 16

PERDAMAIAN, KEADILAN, DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

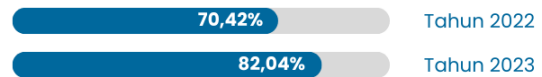
Indeks Penduduk yang Puas terhadap Pengalaman Terakhir atas Layanan Publik



Penurunan indeks ini bisa mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata kelola, transparansi, dan responsivitas lembaga daerah untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan dan harapan publik secara lebih efektif.

Sumber : RPJMD Data Bappeda

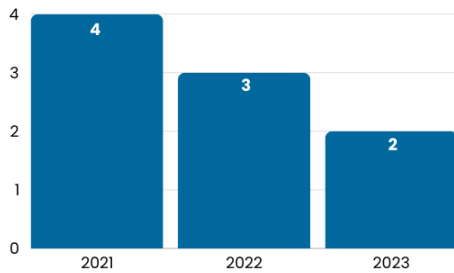
Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B



Pemerintahan Kabupaten Tuban telah mengalami peningkatan dalam hal kinerja reformasi birokrasinya. Secara spesifik, peningkatan ini berarti bahwa instansi tersebut menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sumber : RPJMD

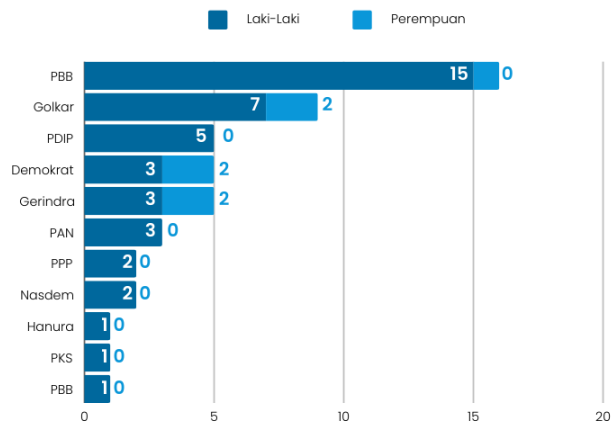
Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun



Kasus pembunuhan di Kabupaten Tuban yang semakin berkurang menandakan peningkatan efektivitas penegakan hukum dan keamanan serta kondisi sosial yang lebih stabil.

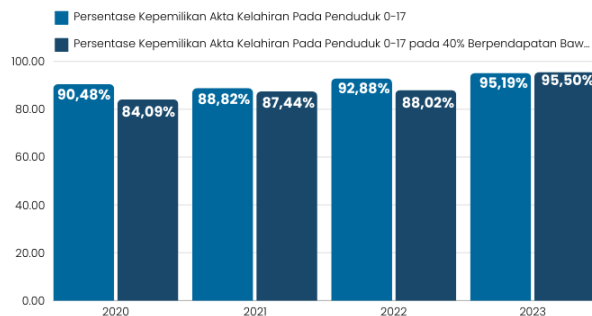
Sumber : BPS

Jumlah Anggota DPRD 2023



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban

Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 dan Kelompok 40% Berpendapatan Bawah



Sumber : Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)

Indeks kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun di kalangan 40% berpendapatan bawah mencerminkan akses dan kesadaran terhadap pentingnya akta kelahiran di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik akses tersebut.

Peningkatan persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran menunjukkan bahwa lebih banyak anak memiliki akta kelahiran, mencerminkan perbaikan dalam pendaftaran kelahiran dan akses ke layanan administrasi dasar.

Infografis Pencapaian Sustainable Development Goals Kabupaten Tuban




3.4.1 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Hasil analisis evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan Tujuan 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh diantaranya ialah target dan capaian SDGs 2023 serta *trend* capaian, status dan keterangan, disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.17 Evaluasi Capaian SDGs Kabupaten Tuban Tujuan 16

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS	orang	3	3	2	
16.1.3	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	Data DinsosP3A	%	0,000070	0,000067	0,00	
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Data DinsosP3A	%	0,009	0,009	0,00	
	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Data DinsosP3A	%	0,00017	0,00016	0,00	
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak							
16.2.3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Data DinsosP3A	%	0,00022	0,00020	0,00	
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Data Evaluasi TPB Kabupaten Tuban	%	3	3	0,01	
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Data LRA BPKAD	%	84	85,32	95,13	
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	RPJMD Renstra BPKAD	-	WTP	WTP	WTP	

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
16.6.1.(b)	*Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B / Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Jawa Timur	Indikator Program (IP)	%	97,62	100,00	100,00	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B	RPJMD	Indeks	70,42	72	82,04	
16.6.2	Indeks penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik	RPJMD Data Bappeda	Indeks	4,42	4,41	3,47	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Bappeda	%	14	15	14,00	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Bappeda	%	13,79	14,29	13,63	
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan						
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	BPS Renstra DinsosP3A	%	88,39	88,65	88,52	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	BPS Provinsi Jawa Timur	%	0,417	0,397	0,36	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1.	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirnya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur	Renstra Dukcapil	%	39,09	47,23	94,46	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	Dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat (BPS)	%	87,44	89,46	95,50	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	Dokumen Statistik Kesejahteraan	%	92,88	99,00	95,19	

Kode Indikator	Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar 2022	Target SDGs 2023	Capaian SDGs 2023	Status
		Rakyat BPS					
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional							
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif	Renstra Diskominfo	%	0	65	0,00	
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi	Data Evaluasi TPB Kabupaten Tuban	Kasus	0	1	0	
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Renstra Diskominfo	%	83,53	81,49	81,49	

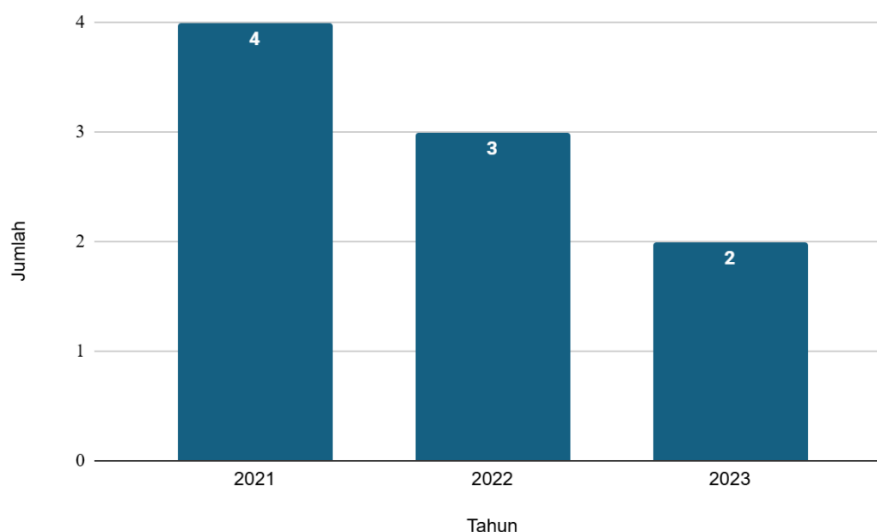
Sumber: Hasil Analisis, 2024

a. Mengurangi Bentuk Kekerasan

Kasus kriminalitas menyebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga kasus seperti kejahatan pembunuhan, perampokan, dan lain-lain membutuhkan perhatian khusus dan tindak tegas dari pemerintah setempat untuk meminimalisir hal tersebut. Faktor-faktor yang mendukung untuk kasus kejahatan membutuhkan keterbukaan informasi yang jelas terkait kasus tersebut dan teknologi yang memadai. Hal tersebut dapat membantu aparat setempat untuk lebih mudah dalam memproses kasus-kasus yang terjadi di suatu daerah, tentu tidak mudah untuk melakukan hal tersebut tetapi dengan adanya informasi dan teknologi yang memadai kasus-kasus yang terjadi dapat lebih mudah ditangani oleh aparat setempat. Namun, pemerintah setempat harus terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman dari kasus kejahatan dengan berupaya memperbaiki seluruh komponen yang dibutuhkan oleh aparat setempat dalam memberantas semua kasus kejahatan.

Tingginya kasus kriminalitas di Kabupaten Tuban membuat Pemkab Tuban harus bekerja keras dalam meminimalisir kasus kejahatan yang terjadi di seluruh wilayah Tuban. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Pemkab Tuban

agar lebih memperhatikan keamanan masyarakat Tuban dari segala jenis tindak kriminalitas yang sedang marak terjadi di Kabupaten Tuban. Berdasarkan informasi dari Kapolres Kabupaten Tuban Tahun 2023 kasus kriminalitas di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebanyak 424 dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 592. Informasi tersebut juga dijelaskan dalam hasil analisis pada Gambar 3.16 yang mendukung indikator 16.1.1.(a) ialah jumlah kasus kejahatan pembunuhan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.



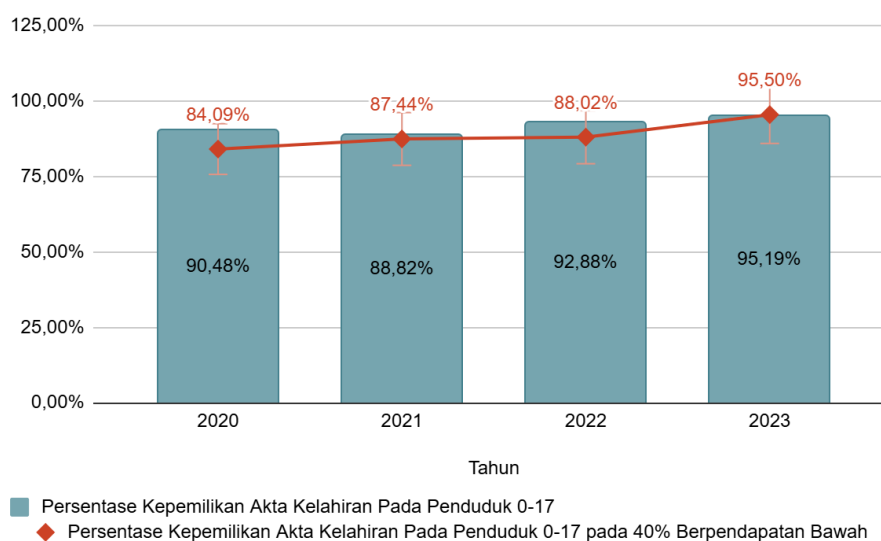
Gambar 3.27 Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir Periode 2021-2023

Sumber: Polres Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Upaya pemerintah Tuban dalam meminimalisir tidak kejahatan dalam satu tahun terakhir menunjukkan keseriusan untuk melindungi masyarakat Tuban agar memperoleh kehidupan yang lebih aman, salah satu tindakan yang dibuktikan ialah menurunnya jumlah kasus kejahatan pembunuhan dalam satu terakhir dari tahun sebelumnya. Gambar 3.16 menunjukkan jumlah kasus kejahatan dalam satu tahun terakhir mengalami penurunan ialah sebanyak 2 kasus terjadi di Tahun 2023 sedangkan sebanyak 3 Kasus terjadi di Tahun 2022. Hasil tersebut menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di Tuban sehingga menurunnya jumlah kasus kejahatan pembunuhan menjadi salah satu upaya penting untuk menjaga lingkungan yang aman dari segala kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah sekitar Tuban.

b. Akses pada Registrasi

Hak seseorang untuk diakui secara formal oleh negara harus mempunyai catatan sipil seperti akta kelahiran dimana akta tersebut sebagai landasan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhan dalam kehidupannya seperti memperoleh pendidikan formal yang membutuhkan identitas secara negara untuk keberlangsungan hidup. Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menegaskan tentang resiko seseorang jika tidak memiliki akta kelahiran akan kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal, memicu terjadinya perkawinan anak, meningkatkan angka kerja anak, hak memperoleh bantuan sosial dan adopsi ilegal karena anak tidak memiliki identitas yang jelas. Resiko-resiko seperti itu tentu harus diperhatikan agar tidak terjadi kesenjangan terhadap anak baru lahir khusus yang membutuhkan semua identitas atas hidupnya. Akta kelahiran adalah hak bagi semua orang untuk memperoleh jati diri sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan hal tersebut dikarenakan telah diberlakukan administrasi kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam UU Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006. Pemkab Tuban menunjukkan kerja keras dalam membangun keadilan bagi semua masyarakatnya untuk memperoleh keadilan dalam hidupnya yang dibuktikan dengan perkembangan jumlah kepemilikan akta kelahiran yang semakin tahun semakin meningkat yang disajikan dalam Gambar 3.17 yang merujuk pada indikator 16.9.1.(a) dan 16.9.1.(b).



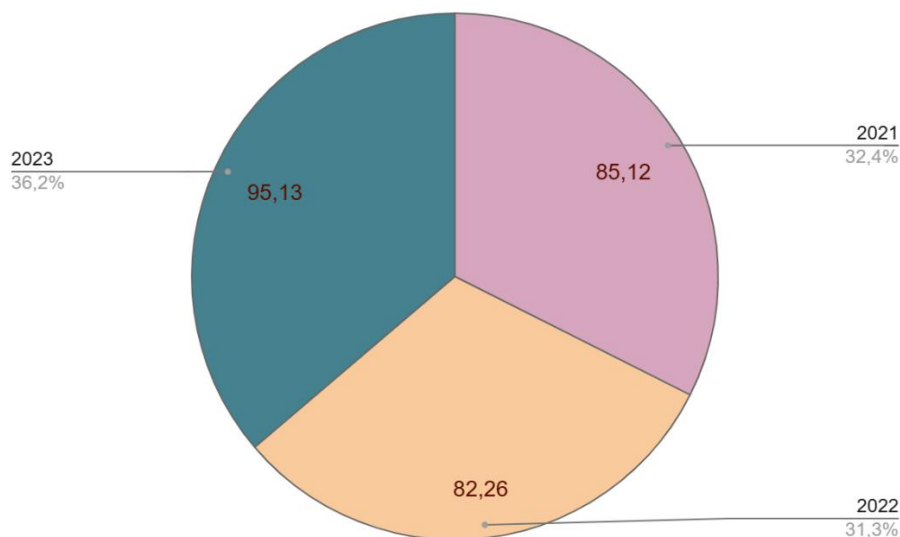
Gambar 3.28 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk 0-17 dan Kelompok 40% Berpendapatan Bawah

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Capaian Kabupaten Tuban atas perkembangan persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-17 dan kelompok 40% berpendapatan bawah melebihi ambang batas target nasional yang masing-masing mencapai angka 88,11% dan 83,47%. Tahun 2023, persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk 0-17 dan kelompok 40% berpendapatan bawah mengalami peningkatan yang mencapai angka di atas 95% yang menunjukkan angka keberhasilan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tuban selalu berbenah dan berupaya dalam meningkatkan keadilan bagi kelangsungan hidup masyarakatnya. Angka 5% yang belum tercapai, permasalahannya ialah dari kualitas aparatur administrasi kependudukan, namun permasalahan yang paling utama disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Tuban yang belum optimal dalam mengurus dokumen administrasi kependudukan. Penting untuk Pemkab Tuban dalam memprioritaskan dan meningkatkan layanan administrasi kependudukan agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat Tuban yang tidak mengerti tentang alur penyelenggaraan pelayanan administrasi yang sudah disediakan oleh Pemkab Tuban sehingga masyarakat yang minim pendidikan dan teknologi lebih mudah untuk mengakses semua alur pelayanan tersebut.

c. Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan

Transparansi anggaran dalam suatu pemerintahan perlu dilakukan untuk menunjukkan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk transparansi tersebut telah di atur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah diharapkan lebih bertanggung jawab dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap keuangan yang sudah direalisasikan oleh pemerintah pusat, bentuk aksi tersebut meminimalisir tindak kecurangan seperti korupsi dan penggelapan uang dalam suatu pemerintahan. Merujuk pada indikator 16.6.1 tentang proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui, dimana hasil analisis tentang indikator tersebut untuk Kabupaten Tuban disajikan pada Gambar 3.19.



Gambar 3.29 Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui

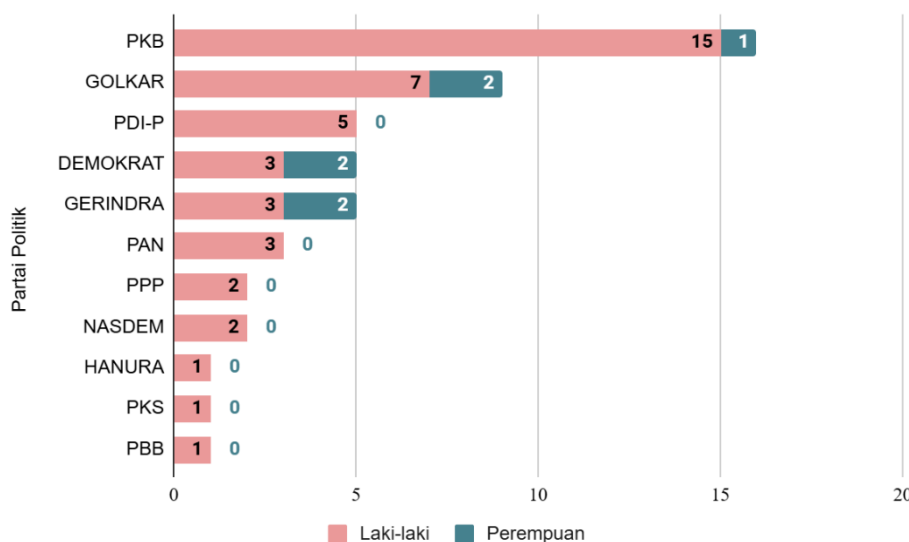
Sumber: BPKPAD Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Kabupaten Tuban telah berupaya sebaik mungkin dalam mengelola keuangan untuk menunjukkan rasa tanggung jawab kepada negara tentang pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan di Kabupaten Tuban sesuai dengan realisasi yang sudah di setujui sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan ialah proporsi pengeluaran utama pemerintah Kabupaten Tuban terhadap anggaran yang disetujui mencapai angka 95,13 di Tahun 2023, angka tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Hasil tersebut menunjukkan kebijakan penggunaan anggaran di Kabupaten Tuban semakin membaik dari tahun sebelumnya sehingga harapannya dari hasil tersebut pemkab Tuban terus mempertahankan capaian tersebut sesuai dengan anggaran yang sudah direalisasikan. Untuk mewujudkan akuntabilitas lembaga tidak hanya dilihat dari laporan keuangan, namun juga dilihat dari penilaian terhadap lembaga yang dipresentasikan dalam indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Merujuk pada indikator 16.6.1.(b) tentang persentase instansi pemerintah Kabupaten Tuban dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) \geq B (nilai SAKIP) pemerintah Kabupaten Tuban mencapai angka 100% di Tahun 2023. Hasil capaian tersebut Kabupaten Tuban telah mencapai indeks capaian nasional sebesar 80% lebih, yang berarti pemerintah Kabupaten Tuban mempunyai komitmen yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di wilayah Kabupaten Tuban sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang diinginkan di Tahun 2023. Berdasarkan

hasil target dan capaian di Tahun 2023 telah dipenuhi sebesar 100%, harapannya pemerintah Tuban terus memperhatikan capaian tersebut agar tahun-tahun berikutnya capaian yang diharapkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

d. Pengambilan Keputusan yang Responsif, Inklusif, Partisipatif dan Representatif

Keadilan atas perempuan dalam membantu keluarganya untuk bekerja tentu menjadi pilihan bagi setiap orang yang menjalin rumah tangga, namun keputusan perempuan untuk bekerja menjadi tolak ukur keberhasilan memberikan kebebasan bagi setiap orang. Pengambilan keputusan untuk kebebasan dalam berpendapat merupakan hak bagi setiap orang yang ingin mengutarakan semua pendapat atas kemampuannya sendiri tentu itu hal yang baik misal kebebasan memilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk merealisasikan pendapat yang kurang sesuai dengan hak yang diperoleh tentu itu hal bagus bagi masyarakat sekitar untuk mendukung kebebasan tersebut selain dapat membantu masyarakat sekitar juga dapat membantu pemerintah dalam memberikan keadilan. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tuban telah merealisasikan keadilan bagi setiap masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan DPRD, hasilnya disajikan dalam Gambar 3.19 yang merujuk pada indikator 16.7.1.(a).



Gambar 3.30 Jumlah Anggota DPRD di Kabupaten Tuban Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Tuban, 2024 (Diolah)

Kabupaten Tuban telah memenuhi capaian nasional tentang persentase keterwakilan perempuan dalam DPRD yaitu mencapai angka sebesar 15,75%. Keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tuban mencapai angka 17,5% dari 7 orang yang terlibat pada 4 partai politik diantaranya ialah PKB, Golkar, Demokrat dan Gerindra. Tentu hasil tersebut selaras dengan capaian yang diharapkan nasional dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tuban agar keadilan atas perempuan terpenuhi untuk berpendapat dan menuangkan gagasan yang selama ini belum terealisasi.

BAB IV

EVALUASI PROGRAM

Evaluasi program pada kegiatan ini merupakan kegiatan evaluasi pasca pelaksanaan atau *ex-post evaluation*, yaitu kegiatan evaluasi atau penilaian yang dilakukan setelah suatu program selesai dilaksanakan. Evaluasi pasca pelaksanaan bertujuan untuk menilai pencapaian, keberhasilan, efisiensi, efektivitas dan dampak maupun manfaat suatu program. Sumber data yang digunakan adalah dokumen-dokumen seperti RKPD, RPJMD dan LAKIP. *Impact evaluation* dilakukan melalui komparasi dan pemetaan secara deskriptif dan statistik. Evaluasi hasil pembangunan dilakukan pada program kerja dalam mendukung pelaksanaan SDGs di Kabupaten Tuban. Substansi yang menjadi perhatian dalam evaluasi program ini secara runtut mulai dari Target dan Indikator SDGs, program/kegiatan, capaian dan pendanaan.

Kegiatan evaluasi capaian kinerja program dan anggaran ini menggunakan dasar sesuai pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap target kinerja dan pagu anggaran yang dibandingkan dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Berikut merupakan tabel kriteria penilaian evaluasi kinerja dan anggaran.

Tabel 4.18 Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Evaluasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90,9%	Tinggi
3.	66% ≤ 75,9%	Sedang
4.	51% ≤ 65,9%	Rendah
5.	≤ 50,9%	Sangat rendah

Sumber : Permendagri No 86 tahun 2017

Hasil dari evaluasi capaian kinerja, dilakukan analisis lebih lanjut dengan melakukan persilangan dan pemetaan pada matriks. Matriks tersebut memiliki lima

(5) kategori yang terdiri dari Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang Baik (KB), dan Sangat Kurang Baik (SKB). Program dan kegiatan yang menjadi perhatian dalam peningkatan capaian SDGs Kabupaten Tuban yakni program dan kegiatan yang termasuk dalam kategori Kurang Baik (KB), dan Sangat Kurang Baik (SKB). Hasil evaluasi Kinerja Program dan Anggaran dapat dilihat selengkapnya pada lampiran. Berikut merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam kategori KB dan SKB berdasarkan pada tiap pilar:

1. Pilar Pembangunan Sosial, yang meliputi tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5

Pada pilar pembangunan sosial terdapat 5 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan yang termasuk dalam kategori kurang baik (KB)

- Program
 1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 3. Program Pengelolaan Pendidikan;
 4. Program Perlindungan Perempuan;
 5. Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS).
- Kegiatan
 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
- Sub Kegiatan
 1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK);
 2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 3. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB;
 4. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar;

5. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
6. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran.

Sedangkan terdapat 3 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang memiliki kategori sangat kurang baik (SKB)

- Program
 1. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 3. Program Pengelolaan Pendidikan.
- Kegiatan
 1. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Penolahan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
 3. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan.
- Sub Kegiatan
 1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
 2. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK).

2. Pilar Pembangunan Ekonomi, yang meliputi tujuan 7,8,9,10 dan 17

Pada pilar pembangunan ekonomi terdapat 1 program yang termasuk dalam kategori kurang baik (KB) yaitu program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sedangkan terdapat 1 program, dan 1 kegiatan yang termasuk dalam kategori sangat kurang baik (SKB) yaitu program pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup dan kegiatan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan, yang meliputi tujuan 6,11,12,13,14,dan 15

Pada pilar pembangunan lingkungan terdapat 2 program, dan 5 kegiatan yang termasuk dalam kategori kurang baik (KB)

- Program
 1. Program Penelitian dan Pengembangan;
 2. Program Pendaftaran Penduduk.
- Kegiatan
 1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
 2. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 4. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 5. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan hanya terdapat 2 kegiatan yang memiliki kategori sangat kurang baik (SKB) yaitu kegiatan penataan pendaftaran penduduk dan kegiatan penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, yang meliputi tujuan 16

Pada pilar pembangunan hukum dan tata kelola terdapat 2 program dengan kategori kurang baik (KB) dan 1 kegiatan dengan kategori sangat kurang baik (SKB).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan RAD pembangunan berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Tuban Tahun 2023-2029, terdapat 16 tujuan (kecuali Tujuan 15) dengan 188 indikator yang relevan dan sesuai di Kabupaten Tuban. Pembagian indikator menurut pilarnya adalah sebagai berikut: (1) Pilar 1: Sosial mencakup 100 indikator; (2) Pilar 2: Ekonomi mencakup 35 indikator; (3) Pilar 3: Lingkungan mencakup 32 indikator; dan (4) Pilar 4: Hukum dan Tata Kelola mencakup 21 indikator.
2. Sebagian besar data capaian SDGs telah tersedia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh OPD dan instansi di Kabupaten Tuban, terdapat 181 indikator yang dapat diukur dan memiliki data, yaitu sebesar 96,3% dari total 188 indikator yang ada di Kabupaten Tuban.
3. Berdasarkan status capaian SDGs di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023, dari total 188 indikator, dapat dirinci sebagai berikut: a) 106 indikator (56,4%) telah mencapai target SDGs, b) 20 indikator (10,6%) diproyeksikan akan tercapai, dan c) 55 indikator (29,25%) memerlukan perhatian khusus.
4. Terdapat 56 indikator yang menunjukkan status capaian yang kurang baik dan memerlukan perhatian khusus. Rinciannya adalah sebagai berikut: 32 dari 100 indikator (32%) pada Pilar Pembangunan Sosial, 10 dari 35 indikator (28,6%) pada Pilar Pembangunan Ekonomi, 9 dari 32 indikator (28,1%) pada Pilar Pembangunan Lingkungan, dan 4 dari 21 indikator (19%) pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
5. Berdasarkan pilar pembangunan SDGs, capaian indikator SDGs :
 - a. **Pilar Pembangunan Sosial** (Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5):
 - 53 indikator telah tercapai,
 - 13 indikator diperkirakan akan tercapai,
 - 33 indikator memerlukan perhatian khusus,
 - 1 indikator tidak tersedia (N/A) karena data belum ada.

- b. **Pilar Pembangunan Ekonomi** (Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17):
 - 23 indikator telah tercapai,
 - 10 indikator memerlukan perhatian khusus,
 - 2 indikator diproyeksikan akan tercapai.
 - c. **Pilar Pembangunan Lingkungan** (Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15):
 - 18 indikator telah tercapai,
 - 8 indikator memerlukan perhatian khusus,
 - 2 indikator diperkirakan akan tercapai,
 - 4 indikator tidak tersedia (N/A) karena data belum ada.
 - d. **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola** (Tujuan 16):
 - 15 indikator telah tercapai,
 - 3 indikator memerlukan perhatian khusus,
 - 3 indikator diperkirakan akan tercapai.
6. 33 indikator yang memerlukan perhatian khusus pada Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun

- 1) (1.1.1) Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari);
- 2) (1.3.1.a) Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh bantuan sosial dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 3) (1.3) Indikator 1. Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh santunan makanan siap saji;
- 4) (1.3.1 (b)) Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- 5) (1.3.1 (d)) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan;
- 6) (1.4.1 (b)) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (*kelompok penduduk 40% terbawah);
- 7) (1.4.1 (d)) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (*kelompok penduduk 40% terbawah);
- 8) (1.4.1 (g)) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat;
- 9) (1.4.1 (h)) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

- 1) (2.1.2*) Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan;
- 2) (2.3.1 (a)) Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/perikanan/ kehutanan (***)
- 3) (2.4.1 (a)) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

- 1) (3.1.1*) Angka Kematian Ibu (AKI) *per 100 ribu kelahiran hidup;
- 2) (3.2.1) Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup;
- 3) (3.2.2) Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup;
- 4) (3.2.2 (a)) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup;
- 5) (3.3.1) Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV
- 6) (3.3.3*) Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk;
- 7) (3.3.4 (a)) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B;
- 8) (3.4.1 (b)) Prevalensi tekanan darah tinggi;
- 9) (3.5.1 (a)(**)) Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapat pelayanan rehabilitasi medis;
- 10) (3.7.1 (b)) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern);
- 11) (3.c.1*) Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan;
- 12) (3.c.1*) Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar.

Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

- 1) (4.1) Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia 7-12 tahun;
- 2) (4.1) Indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Usia 13-15 tahun;
- 3) (4.1) Indikator Angka Putus Sekolah SD/MI;
- 4) (4.1)) Indikator Angka Putus Sekolah SMP/MTs;
- 5) (4.2.2 (a)) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6) (4.3) Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Perempuan;

- 7) (4.6.1 (a)) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.(***).

Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

- 1) (5.3.1.(a)) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun;
 - 2) (5.b.1) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
7. 10 indikator yang memerlukan perhatian khusus pada Pilar Pembangunan Ekonomi

Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua

- 1) (8.2.1) Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun;
- 2) (8.3.1*) Proporsi lapangan kerja informal sektor non- pertanian, berdasarkan jenis kelamin;
- 3) (8.4.1 (a)) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

- 1) (9.1) Indikator Persentase Desa dengan akses jalan tidak rusak/ layak;
- 2) (9.2) Indikator Distribusi sektor industri manufaktur terhadap PDRB;
- 3) (9.2) Indikator Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur per kapita;
- 4) (9.2.2) Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antarnegara

- (10.1.1*) Koefisien Gini.

Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

- 1) (17.1.1) Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya;
 - 2) (17.1.1 (a)) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB/PAD.
8. 8 indikator yang memerlukan perhatian khusus pada Pilar Pembangunan Lingkungan

Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

- 1) (6.1) Indikator Cakupan akses air minum yang aman melalui sistem jaringan perpipaan terlindungi;
- 2) (6.2.1 (f)) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat / *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T;
- 3) (6.3.1 (a)) Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman;
- 4) (6.6) Indikator Realisasi Reboisasi Kawasan Hutan;
- 5) (6.6) Indikator Persentase Realisasi Reboisasi Kawasan Hutan.

Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

(11.5.1 (b)) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.

Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

(12.1.1) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan.

Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

(14.b.1 (b)) Jumlah nelayan yang terlindungi

9. 3 indikator yang memerlukan perhatian khusus pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

- 1) (16.6.2) Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik;
 - 2) (16.7.1 (b)) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II);
 - 3) (16.10.2 (a)) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.
10. Evaluasi pendukung program SDGs Tahun 2023, capaian program SDGs:
 1. **Pilar Pembangunan Sosial** (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5):

- 1 program, 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan kategori kurang baik,
 - 3 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan kategori sangat kurang baik.
2. **Pilar Pembangunan Ekonomi** (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17):
- 1 program kategori kurang baik,
 - 1 program dan 1 kegiatan kategori sangat kurang baik.
3. **Pilar Pembangunan Lingkungan** (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14):
- 2 program dan 5 kegiatan kategori kurang baik,
 - 2 kegiatan kategori sangat kurang baik.
4. **Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola** (Tujuan 16):
- 2 program kategori kurang baik,
 - 1 kegiatan kategori sangat kurang baik.

5.2 Rekomendasi

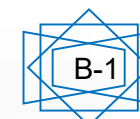
1. Upaya sinkronisasi antara RAD SDGs 2023-2030 dengan RPJMD terkini dan Renstra OPD terkini perlu ditingkatkan, sehingga evaluasi program/kegiatan pendukung SDGs bisa dilakukan dengan baik. *(Sebaiknya indikator RPJMD dan Renstra OPD inline atau selaras dengan indikator SDGs)*
2. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu berupaya untuk pencapaian indikator SDGs khususnya indikator yang tergolong kategori butuh perhatian khusus, melalui pengoptimalan implementasi program/kegiatan/subkegiatan pendukung SDGs yang telah disusun dalam RAD SDGs. *(Khususnya capaian kinerja program pendukung SDGs kategori sangat rendah, rendah dan sedang)*
3. Perlu optimalisasi linieritas antara program/kegiatan/subkegiatan pendukung SDGs dan indikator utama SDGs. Oleh karena itu program/kegiatan/subkegiatan pendukung SDGs yang tidak atau kurang mendukung indikator utama SDGs perlu di evaluasi, seperti: *(Khususnya capaian kinerja program pendukung SDGs kategori sangat rendah, rendah dan sedang, namun indikator SDGs termasuk kategori tercapai atau sebaliknya)*
 - a. (1.06.05) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan (1.06.05.202.03) Subprogram Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

- b. (1.02.02) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan (1.02.02.2.02.01) Subprogram Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
 - c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan (1.02.02.202.22) Subprogram Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza.
 - d. (1.03.05.201.12) Subprogram Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
 - e. (2.11.05) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
 - f. (02.09.03) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - g. (2.16.03) Program Aplikasi Informatika.
 - h. (2.12.02) Program Pendaftaran Penduduk.
4. Dalam upaya pengoptimalan proses monitoring dan evaluasi SDGs dalam pencapaian target pembangunan SDGs:
- a. Setiap OPD di Kabupaten Tuban lebih berkomitmen dalam menyiapkan data capaian SDGs yang lengkap, akurat dan update, termasuk capaian program/kegiatan/subkegiatan pendukung SDGs.
 - b. Perlu adanya database capaian indikator SDGs yang terintegrasi dengan seluruh OPD di Kabupaten Tuban.
 - c. Dibutuh system informasi yang terintegrasi dalam monitoring dan evaluasi (monev) capaian SDGs bersamaan dengan monev capaian RPJMD dan capaian Rentra oleh setiap OPD.
 - d. Sinergitas antar OPD untuk mengoptimalkan monev SDGs dan pencapaian target SDGs.
 - e. Dibutuhkan komitmen pimpinan daerah dalam menyukkseskan target capaian SDGs.

LAMPIRAN

B Pilar Pembangunan Sosial

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun							
1.2.1 Persentase Penduduk yang Hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
Program: 1.6.2 Program Pemberdayaan Sosial							
1.6.2.203 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS yang terbina	Jenis	100.0%	89.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Program: 1.6.4 Program Rehabilitasi Sosial							
1.6.4.201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	97.6%	97.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
1.6.4.202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Persentase pengaduan PMKS melalui Rumah	%	100.0%	92.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Perlindungan Sosial yang ditindaklanjuti						
1.3.1 Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan								
Program: 1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1.06.05.202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pemutakhiran Data untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100.0%	91.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
1.06.05.202.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	109.0%	91.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
1.06.05.202.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
Indikator: 1.3.1(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.								
Program: 1.6.4 Program Rehabilitasi Sosial								
1.6.4.201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas		Persentase Penyandang	%	97.6%	97.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya							
1.6.4.202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pengaduan PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang ditindaklanjuti	%	100.0%	92.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB	
Indikator: 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.								
Program: 1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial								
1.06.05.202 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.202.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	109.0%	91.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Target 1.4: Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
Indikator: 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan								

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
Program: 1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								
1.3.3.201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			% Rumah Tangga	-	-	-	-	
Indikator: 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.								
Program: 1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah								
1.3.5.201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.201.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	100.0%	96.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	1.03.05.201.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	104.0%	97.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	1.03.05.201.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
			Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara					
	1.03.05.201.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	96.0%	85.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
<p>Target 1.5: Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p> <p>Indikator: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial / *Persentase korban terdampak bencana yang ditangani</p> <p>Program: 1.06.06 Program Penanganan Bencana</p>								
1.06.06.201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pangan harian pasca bencana	%	100.0%		Sangat Tinggi		

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
1.06.06.202 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			Kelompok	50.0%	99.0%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	KB
Program Penanggulangan Bencana								
		Prosentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik	%	100.0%	-	Sangat Tinggi		
		Prosentase penanganan pemulihan sarana prasarana dasar pasca bencana	%	100.0%	-	Sangat Tinggi		
		Prosentase Penanganan Darurat Bencana dan Logistik	%	100.0%	-	Sangat Tinggi		
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
Target: 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun								
Indikator: 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.								
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
	1.02.02.202.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	100.0%	99.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

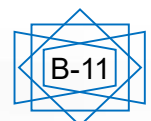
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
	Kesehatan Gizi Masyarakat							
Target: 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
Indikator: 2.1.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.								
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	104.7%	99.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	%	100.7%	92.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.								
Program: 2.9.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								
IKU Pemerintah Daerah		Indeks Ketahanan Pangan		0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
Program: 2.9.03 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	%	0.2%	98.4%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	KB
2.9.03.2.01 Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka		ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari)	(kkal/kap/hari)	121.7%	97.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
stabilisasi pasokan dan harga pangan								
2.9.03.2.02 Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota		Jumlah cadangan pangan daerah (kg)	kg	3156.8%	98.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.9.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		Jumlah regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	regulasi	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
2.9.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		konsumsi energi per kapita	kcal/kap/hari	112.5%	99.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 2.9.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan								
2.9.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah peta kerentanan pangan yang tersedia	Dokumen	100.0%	99.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.9.04.2.02 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		jumlah desa rentan pangan	Desa	135.3%	80.9%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Program: 2.9.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan								
Program: 2.9.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase keamanan pangan	%	105.3%	98.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
2.9.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			item	164.0%	98.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)								
Program: 3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian								
Program: 3.27.06 Program Perizinan Usaha Pertanian		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	%	125.0%	99.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahan dalam Daerah Kabupaten/Kota			rekomendasi	2850.0%	99.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian								
Program: 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian		PDRB Kateogri Pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	130.3%	98.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian		Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	102.6%	98.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	3.27.07.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		orang	100.8%	98.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 2.3.1.(a) Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan (***)								
Program: 3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Program: 3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktifitas pertanian per hektar per tahun (padi)	kuantial/ ha	100.0%	98.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang digunakan	%	111.8%	98.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian		Ha	100.0%	98.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.27.03.2.02 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		meter	135.4%	98.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							
Program: 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Peoduksi Perikanan Budidaya Kabupaten/Kota	ton	102.7%	99.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.25.04.2.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		IUP	100.0%	62.9%	Sangat Tinggi	Rendah	C
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		orang	100.0%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		dokumen	100.0%	99.5%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi (ekor)	ekor	100.0%	99.5%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan							
Program: 3.25.05 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan yang dipantau	kali	100.0%	99.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah SUNgai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten/kota		RTP	100.0%	99.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program 3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan							
3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	100.9%	96.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.25.06.2.01 Penebitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		Jumlah	140.0%	98.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Penolahan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		%	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan		kg/kap/ tahun	100.7%	96.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
dalam 1 daerah Kabupaten/Kota								
Indikator: 2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, jangka menengah atau jangka panjang								
Program: 3.27.02 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
3.27.02.202 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sumber daya genetik hewan yang dikelola (jenis)	jenis	100.0%	99.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB	
Tujuan 3 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk di Manapun								
Indikator: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) *per 100 ribu kelahiran hidup								
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Angka Kematian Ibu (AKI),	Jumlah	110,48/100.000 KH (15 Jiwa)	- APBD 92,92 % - DAK Non Fisik 44,29%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
		Persentase Keluarga Sehat	%	100.7%	92.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan								
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	Jumlah	93.0%	- APBD 98.26	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kesehatan Sesuai Standar			-DAK Non Fisik 11,68 %		
Indikator: 3.2.2 (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.							
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah	7,60/1000 (110 Jiwa)	72.3%	Sangat Tinggi	Sedang C
Indikator: 3.2.2 (b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi							
Program: 1.02.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							
1.02.02.2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Puskesmas yang mencapai 93,6% imunisasi dasar lengkap pada bayi (puskesmas)	%	81.8%	100.0%	Tinggi	Sangat Tinggi B
Indikator: 3.3.1 (a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.							
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
1.02.02.2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah	153.8%	99.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Indikator: 3.3.2 (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.							
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
1.02.02.2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.202.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan pelayanan sesuai standar	Jumlah	109.2%	99.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
Indikator: 3.4.2 (a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.							
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	puskesmas	100.0%	97.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
Indikator: 3.5.1.(a)(***) Jumlah penyalahgunaan napza yang mendapat pelayanan rehabilitasi medis							
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
	1.02.02.202.2 Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	orang	95.2%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
Indikator: 3.7.1 Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)							
Program: 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)							
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader	Persentase Pemakaian Konstrasepsi	%	100.0%	98.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.203.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	100.0%	9.3%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.02.203.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(DAK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	94.1%	77.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator : 3.7.1 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)								
Program: 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
Program: 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	68.6% 0.0% 93.4% 84.2%		Sedang	Sangat Rendah	KB
2.14.03.201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan	%			Sangat Tinggi	Tinggi	B

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		program KKBPK (advokasi dan KIE)						
	2.14.03.201.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK)		Laporan	-	-	-	-	-
	2.14.03.201.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang terpapar advokasi program KKBPK	Organisasi	100.0%	50,39%	Sangat Tinggi	Sedang	C
	2.14.03.201.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	100.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.201.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembanguna n	unit	100.0%	74.8%	Sangat Tinggi	Sedang	C

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana						
	2.14.03.201.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	unit	100.0%	83.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.14.03.202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.202.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK)		sarana	100.0%	74.8%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
	2.14.03.202.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	100.0%	99.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.14.03.203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.203.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	100.0%	9.1%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.203.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan	Jumlah	169.7%	77.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						
	2.14.03.203.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)	Laporan	33.3%	9.5%	Rendah	Sangat Rendah	SKB
	2.14.03.203.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (DAK)		Orang	-	-	-	-	-
	2.14.03.203.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran"		Orang	-	-	-	-	-
	2.14.03.203.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria (DAK)		Akseptor	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
2.14.03.204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.023.201.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK)	Dokumen	100.0%	46.7%	Sangat Tinggi	Rendah	C
	2.14.03.204.01 Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	100.0%	99.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	2.14.03.204.02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	100.0%	31.9%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.204.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK)	Kampung KB	100.0%	92.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		Berencana) di Kampung KB						
	2.14.03.204.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB		Laporan	-	-	-	-	-
Indikator: 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern								
Program: 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani KB MKJP	Unit	100.0%	9.3%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.203.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah	169.7%	77.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)								
Program: 2.14.201 Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga								
2.14.201 Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota		Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	Angka	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		(Age Specific Fertility Rate/ASFR)						
Indikator: 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR)								
Program: 2.14.02 Program Pengendalian Penduduk								
2.14.02.201 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Peerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Persentase pilar yang terdokumentasi grand design pembangunan kependudukan (GDPK)	%	125.0%	86.1%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.14.02.202 Pemetaan Perkiraan PEngendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pemetaan penduduk yang tersusun	Dokumen	100.0%	83.5%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas								
Program: 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman								
Program: 1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	97.5%	96.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
01.02.02.202 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1.02.02.201.16 Pengadaan obat, vaksin	Jumlah	100.0%	99.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	1.02.02.201.21 Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah DIdistribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman yang DIdistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	%	88.0%	88.3%	Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 3.b.1.* Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan								
Program: 1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
01.02.02.202 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase Puskesmas yang mencapai 93,6% imunisasi dasar lengkap pada bayi (puskesmas) (Renstra)	%	100.2%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 3.c.1.* Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar								
Program: 01.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
01.02.03 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan		Persentase faskes dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	98.7%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten	Persentase tenaga kesehatan di fasyankes dasar	Jumlah	104.4%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		dan rujukan yang memiliki izin praktik						
	1.02.03.2.01.2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Dokumen	-	-	-	-	-
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan terhadap dokumen perencanaan	Jumlah	269.0%	80.9%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
	1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Sehat	Dokumen	100.0%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah	37.5%	96.5%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	KB
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan	Persentase SDM yang ditingkatkan	Persentase	173.1%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		pengetahuan dan keterampilan teknisnya						
	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah	-	-	-	-	-
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua								
Indikator: 4.1.1 (a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B								
Indikator: 4.1.1 (b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B								
Indikator: 4.1.1 (d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat								
Indikator: 4.1.1 (e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat								
Indikator: 4.1.1 (a) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun								
Indikator: 4.2.2 (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)								
Indikator: 4.6.1 (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun								
Program : Merupakan Indikator Kinerja Daerah dengan Tujuan Meningkatnya Kualitas dan Minat baca masyarakat dengan Sasaran Terwujudnya aksesibilitas Pendidikan Dasar, Informal dan Non-formal yang bermutu dan Profesional.								
Indikator : 4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin								
Program: 1.01.2 Program Pengelolaan Pendidikan								
Program: 1.01.2 Program Pengelolaan Pendidikan		Tingkat partisipasi warga negara usia	%	102.4%	97.1%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	7-12 tahun dalam pendidikan dasar						
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah SD Negeri Terakreditasi	Lembaga	100.0%	24.2%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
Program: 1.01.2 Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah	%	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Negeri Terakreditasi	Lembaga/satuan pendidikan	100.0%	97.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 1.01.2 Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	142.7%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Lembaga	130.1%	98.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 1.01.2 Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	%	102.9%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	dalam pendidikan kesetaraan						
1.01.02.2.04 Jumlah satuan pendidikan kesetaraan Terakreditasi (negeri dan swasta)	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan Terakreditasi (negeri dan swasta)	Lembaga	100.0%	88.3%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.							
Program: 1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
Program: 1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase pendidik telah memiliki kualifikasi akademik sesuai ketentuan	97.6%	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	12189	4710.6%	65.2%	Sangat Tinggi	Sedang	C
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-	69 Orang	29.7%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	IV) atau sarjana (S1)						
	Jumlah kepala sekolah pada pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	15 Orang	42.9%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1750 Orang	94097.1%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon	349 Orang	4740.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB



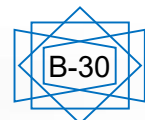
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah						
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1648 Orang	25110.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	94 Orang	2300.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4480 Orang	16964.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	(Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dan sertifikat pendidik						
	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	449 Orang	873.6%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	509 Orang	22.9%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (negeri dan swasta)	133 Orang	161.4%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	2527 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	288 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1648 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4610 orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1210 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	4613 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan	133 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB

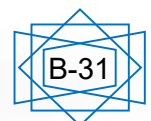


Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	kesetaraan (negeri dan swasta)						
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	2527 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1721 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD	541 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP	385 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang SMP yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	38 Orang	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB

Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Indikator: 5.1.1 Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Belanja ARG pada Belanja Langsung APBD	%	264.4%	90.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B	
Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan								
02.08.02.201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Program PUG pada Perangkat Daerah yang Dievaluasi di Tingkat Kabupaten/Kota	program	114.8%	86.4%	Sangat Tinggi	Tinggi	B	
	02.08.02.201.02 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	100.0%	81.5%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
	2.08.02.201.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	100.0%	95.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	Kewenangan Kabupaten/Kota						
Indikator: 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif							
Program: 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan							
Program: 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.	angka	1.4%	77.7%	Sangat Rendah	Tinggi	KB
2.08.03.201 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	orang	96.0%	96.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.08.03.202 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	orang	96.0%	77.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.08.03.203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten Daerah/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	kali	100.0%	89.2%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.							

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Program: 2.14.04 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)							
Program: 2.14.04 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP)	usia	104.8%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
Indikator: 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)							
Program: 2.14.04 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (KS)							
2.14.04.201 Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	angka	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
Indikator: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah							
Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							
Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	%	264.4%	90.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender	%	112.6%	83.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.08.02.202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Jumlah Kader Perempuan Terlatih	Orang	133.3%	96.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota								
Indikator: 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)								
Program: 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
Program: 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	66.7%	87.6%	Sedang	Tinggi	C	
2.14.03.201 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	93.4%	84.2%	Sangat Tinggi	Tinggi	B	
	2.14.03.201.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	100.0%	96.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	2.14.03.201.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana	Organisasi	100.0%	56.4%	Sangat Tinggi	Rendah	C

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		(Pembangunan Keluarga, pependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						
	2.14.03.201.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	100.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.201.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	100.0%	74.8%	Sangat Tinggi	Sedang	C
	2.14.03.201.08 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	100.0%	83.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
2.14.03.202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.202.02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Sarana	100.0%	98.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	2.14.03.202.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	100.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.202.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	100.0%	99.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.14.03.203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta	2.14.03.203.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat	Laporan	100.0%	9.1%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)	Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						
	2.14.03.203.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah	169.7%	77.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
	2.14.03.203.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	60.6%	9.5%	Rendah	Sangat Rendah	SKB
	2.14.03.203.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan (DAK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi Fasilitas Kesehatan	Orang	8310.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		dan Kelompok Kegiatan						
	2.14.03.203.12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	1994.4%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.203.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria (DAK)	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Akseptor	110.0%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.14.03.204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.023.201.04 Promosi dan KIE Program KKBP melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK)	(belum ditemukan)	Dokumen	100.0%	84.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
	2.14.03.204.01 Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	100.0%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	2.14.03.204.02 Integrasi	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi	Dokumen	100.0%	31.9%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						
	2.14.03.204.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	100.0%	90.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	2.14.03.204.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	100.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
Indikator: 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern								
Program: 2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)								
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	jumlah	100.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.03.202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pemakaian Konstrasepsi Modern (Modern Contraceptive	%	102.4%	98.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		Prevalence Rate/mCPR)						
2.14.03.203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.203.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusi an Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	100.0%	9.1%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
	2.14.02.203.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)(DAK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Orang	92.6%	77.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.14.03.203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.203.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	Orang	92.6%	77.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B

C Pilar Pembangunan Ekonomi

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua							
Indikator: 8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita							
Program: IKU Pemerintah Daerah							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	98.6%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
Indikator : 8.1.1.(a) PDB per kapita							
Program: IKU Pemerintah Daerah							
	PDRB Per Kapita	Rp	119.8%	110.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator : 8.4.1(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan							
Program: 2.09.03 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat							
Program: 2.09.03 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase ketersediaan pangan masyarakat	%	150.0%	98.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.09.03.2.01 Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	ketersediaan energi per kapita	kcal/kap/hari	121.7%	97.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.09.03.2.02 Kegiatan pengelolaan dan	Jumlah cadangan pangan daerah	kg	3156.8%	98.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota							
2.09.03.2.03 Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	regulasi	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	konsumsi energi per kapita	kcal/kap/hari	112.5%	62.0%	Sangat Tinggi	Rendah	C
Program : 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan							
Program : 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa tahan pangan	%	98.1%	95.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.09.04.2.01 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerentanan pangan yang tersedia	dokumen	100.0%	99.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.09.04.2.02 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota"	jumlah desa rentan pangan	desa	135.3%	80.9%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Program : 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan							
Program : 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase desa tahan pangan	%	98.1%	95.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
2.09.04.2.01 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah peta kerentanan pangan yang tersedia	dokumen	100.0%	99.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 8.5.1 Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur								
Program: 2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja								
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Pencari Kerja Terdaftar dapat Ditempatkan	%	104.3%	97.5%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Perencanaan Tenaga Kerja		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	714.3%	93.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.07.02.2.02 Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		Persentase Pencari Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	323.4%	98.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3								
Program: 2.07.05 Program Hubungan Industrial								
Program: 2.07.05 Program Hubungan Industrial		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100.1%	81.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
2.08.05.2.02 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	114.6%	79.2%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara							
Program: 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
Program: 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	1382.0%	99.5%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 8.9.1. (c) Jumlah devisa sektor pariwisata							
Program: 3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							
Program: 3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	121.3%	98.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 8.9.2" Jumlah pekerja pada industri pariwisata atau Jumlah pekerja pada sektor pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja							
Program: 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
Program: 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan kualitas SDM pariwisata	%	246.7%	89.6%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi							



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Indikator: 9.1.2 Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.							
Program: 2.15.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
2.15.02.201 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Yang Ditetapkan	%	100.0%	95.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.15.02.209 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase angkutan umum yang laik jalan (%)	%	100.3%	98.5%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 9.4.1 (a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri							
Indikator: 9.4.1.(a) Jumlah Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor limbah							
Indikator: 9.4.1 (b) Intensitas emisi sektor industri							
Program: 2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup							
Program: 2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	prosentase penurunan emisi gas rumah kaca	%	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
2.11.03.2.01 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian, Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup yang tersusun	Dokumen	125.0%	96.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



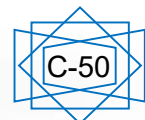
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara							
Indikator: 10.1.1* Koefisien Gini							
Program: 5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
Program: 5.01.02 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Indeks Gini	Indeks	97971.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah KB
Indikator: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
Program: 1.6.2 Program Pemberdayaan Sosial							
1.6.2.203 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PSKS yang Terbina	Jenis	100.0%	279.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
Program: 1.6.4 Program Rehabilitasi Sosial							
Program: 1.6.4 Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial sesuai Standar	%	100.3%	96.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
1.6.4.201 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	97.6%	97.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
1.6.4.202 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pengaduan PMKS melalui Rumah Perlindungan Sosial yang ditindaklanjuti	%	100.0%	92.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri							
Program: 2.13.02 Program Penataan Desa							
Program: 2.13.02 Program Penataan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	160.8%	92.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 2.13.02 Program Penataan Desa	Persentase desa yang statusnya meningkat	%	110.7%	149.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.13.02.201 Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa maju	Desa	85.7%	70.1%	Tinggi	Sedang	C
Program: 2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa							
Program: 2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama desa tahun N dibagi jumlah kerjasama tahun N- 1 dikali 100 % 10 16.67 Rp200,000,000 Rp172,894,490 166.7% 86.4% Sangat Tinggi Tinggi	%	166.7%	86.4%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.13.03.201 Fasilitasi Kerja sama antar Desa		desa	140.0%	86.4%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Program: 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa							



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Program: 2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang sesuai tahapan yang sudah ditentukan, sesuai perencanaan dan akuntabel	%	98.6%	92.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.13.04.201 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan administrasi baik	%	99.2%	92.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan							
Program: 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan							
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	angka	166.7%	77.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.08.03.210 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	orang	80.0%	65.7%	Tinggi	Sedang	C
2.08.03.202 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	orang	80.0%	65.7%	Tinggi	Sedang	C

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.03.203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten Daerah/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	kali	100.0%	89.2%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.							
Program: 2.07.05 Program Hubungan Industrial							
Program: 2.07.05 Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKN, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100.1%	81.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan							
Indikator: 17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya							
Program: IKU Pemerintah Daerah							
	PDRB Per Kapita	Rp	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
Indikator: 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)							
Program: 2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan							



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Program: 2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Persentase penyajian data kependudukan	%	100.0%	88.1%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.12.05.2.01 Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah penyajian data kependudukan	laporan	100.0%	88.1%	Sangat Tinggi	Tinggi	B

D Pilar Pembangunan Lingkungan

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.							
Indikator: 6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.							
Indikator: 6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.							
Program: 1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
1.3.3.201 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi	Jumlah Rumah Tangga	100.0%	98.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
Indikator: 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. atau Persentase rumah tinggal bersanitasi							
Indikator: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).							
Indikator: 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).							
Indikator: 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat / *Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T							
Program: 1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							
1.3.5.201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.201.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD (Dokumen)	100.0%	96.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	1.03.05.201.06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik (kk)	241.3%	97.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	1.03.05.201.10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik					
	1.03.05.201.12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga (kk)	100.0%	85.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator : 6.3.1 (a) Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman								
Program: 2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)								
2.11.05.201 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3		Persentase rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai ketentuan	Persen (%)	100.0%	96.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator : 6.3.2 (a) Kualitas air permukaan sebagai air baku								
Indikator : 6.6.1 Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu (Indek kualitas tutupan lahan dan gambut)								
Program : 2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran dan /Atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
2.11.03.201 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan		Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian, Pencegahan dan	Dokumen	125.0%	96.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup (Dokumen)						
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	125.0%	95.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Tujuan 11 :

Indikator: 11.1.1 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak

Program: 1.04.03 Program Kawasan Permukiman

1.04.03.202 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha		Jumlah laporan hasil penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10ha	Laporan					
1.04.03.203 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur Kawasan kumuh	Hektar (Ha)	28.7%	98.4%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	KB

Indikator: 11.1.1 (A) Proporsi/Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Program: 1.04.03 Program Kawasan Permukiman							
1.04.03.203 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.203.2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni	Persen (%)				
Indikator: 11.2.1 (B) Persentase Penduduk Terlayani Transportasi Umum							
Program: 2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)							
2.15.02.201 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Persentase Rencana Induk Yang Ditetapkan	Persen (%)	100.0%	95.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
2.15.02.209 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		prosentase angkutan umum yang laik jalan	Persen (%)	100.3%	98.5%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
Indikator: 11.4.1 (A) Jumlah Kota Pusaka Di Kawasan Perkotaan Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang Dan Kota Kecil							
Program: -							
Indikator: 11.5.1 Jumlah Korban Meninggal, Hilang Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 Orang							
Indikator: 11.5.1.(A) Indeks Risiko Bencana (IRB) Indonesia							
Indikator: 11.5.1 (B) Jumlah Kota Tangguh Bencana Yang Terbentuk							
Indikator: 11.5.1.(C) Jumlah Sistem Peringatan Dini Cuaca Dan Iklim Serta Kebencanaan							
Indikator: 11.5.2 (A) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif Terhadap Pdb							

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
Indikator: 11.5.2 (A) Jumlah Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana								
Indikator: 11.B.2 Persentase Pemerintah Daerah Yang Mengadopsi Dan Menerapkan Strategi Penanggulangan Bencana Daerah Yang Selaras Dengan Rencana/Strategi Nasional Penanggulangan Bencana								
Program: 1.6.6 Program Penanganan Bencana								
Indikator: 11.6.1 (A) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani / Persentase Rumah Tangga Di Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Sampah								
Program: 1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional								
1.03.04.201 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Terlayannya Rumah Tangga Melalui Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana persampahan Regional untuk menunjang tingkat layanan yang telah direncanakan	62.5%	100.0%	Rendah	Sangat Tinggi	C
			Jumlah rumah tangga yang terlayani melalui pembangunan TPA (kk)	100.0%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	1.03.04.201.03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	LUAS Bangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Luas Bangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (m2)	100.0%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan								

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
2.11.11.201 Kegiatan Pengelolaan Sampah			Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	96.6%	98.1%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
			Persentase sampah yang dikurangi	102.7%	98.1%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
			Persentase sampah yang ditangani	92.5%	98.1%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 11.6.2 (B) Indeks Kualitas Udara								
Program: 2.11.3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup								
2.11.03.201 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Rencana Pengendalian, Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup yang tersusun (dokumen)	125.0%	96.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 11.7.1 (A) Proporsi Ruang Terbuka Perkotaan Untuk Semua								
Program: 1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya								
1.03.09.201 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan		Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan, penataan	0.0%	86.0%	Sangat Rendah	Tinggi	KB

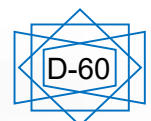


Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		wilayah Kabupaten/ Kota	bangunan dan lingkungan kawasan Kabupaten/ Kota					
Program: 1.3.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
1.03.12.201 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	100.0%	95.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
1.03.12.203 Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/ kota		Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	130.0%	92.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
1.03.12.204 Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kab./ kota		Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tersusun (dokumen)	100.0%	92.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 2.11.04 Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)								
2.11.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman hayati Kabupaten/Kota			Hektar (Ha)	127.5%	77.6%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program	
Indikator: 12.1.1 Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan								
Program: 2.09.03 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat								
Program: 2.09.03 Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat			Persentase ketersediaan pangan masyarakat	150.0%	98.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.09.03.2.01 Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	Ketersediaan energi per kapita (kcal/kap/hari)	ketersediaan energi per kapita (kcal/kap/hari)	121.7%	97.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB	
2.09.03.2.02 Kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota	Jumlah cadangan pangan daerah (kg)	Jumlah cadangan pangan daerah (kg)	3156.8%	98.9%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB	
2.09.03.2.03 Kegiatan Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi		Jumlah regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal (regulasi)	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB	
2.09.03.2.04 Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Konsumsi energi per kapita (kcal/kap/hari)	konsumsi energi per kapita (kcal/kap/hari)	112.5%	99.7%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB	

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Program: 2.09.04 Program Penanganan Kerawanan Pangan							
2.09.04.2.01 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		Jumlah peta kerentanan pangan yang tersedia (dokumen)	Jumlah peta kerentanan pangan yang tersedia (dokumen)	100.0%	99.2%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
2.09.04.2.02 Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Persentase desa tahan pangan (%)	98.1%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah KB
		jumlah desa rentan pangan (desa)	jumlah desa rentan pangan (desa)	135.3%	80.9%	Sangat Tinggi	Tinggi B
Program: 2.09.05 Program Pengawasan Keamanan Pangan							
2.09.05.2.01 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			Persentase keamanan pangan (%)	105.3%	98.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
		Jumlah sampel bahan makanan yang diuji (item)	Jumlah sampel bahan makanan yang diuji (item)	136.7%	98.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB
Indikator: 12.4.2 (a) Limbah B3 yang dihasilkan per kapita (b) Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengelolaannya							
Program: 2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)							
Program: 2.11.05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	100.0%	96.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi SB



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memenuhi persyaratan/keputusan (% perusahaan)					
2.11.05.201 Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3			Persentase rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3 sesuai ketentuan (%)	100.0%	96.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang								
Program: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
2.11.11.201 Kegiatan Pengelolaan Sampah		prosentase sampah yang dikurangi	%	102.7%	98.1%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya								
Indikator: 13.1.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang								
Program: 1.06.06 Program Penanganan Bencana								

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
1.06.06.201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pangan harian pasca bencana	Persen (%)	100.0%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
1.06.06.202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pilar Sosial yang Terlatih	Kelompok	100.0%	99.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Tujuan 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Indikator: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi

Program: 3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

3.25.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	100.0%	11.7%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
--------------	---	--	--	--------	-------	---------------	---------------	----

Program: 3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

3.25.04.2.02	Keg.Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pendampingan/pelatihan (Orang)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan)	100.0%	100.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
--------------	--	---	--	--------	--------	---------------	---------------	----



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		dan pelatihan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (pembudidaya)					

E Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
Indikator: Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan							
Program: 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak							
Program: 2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100.0%	54.1%	Sangat Tinggi	Rendah	C
2.08.07.201 Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani	orang	96.0%	54.1%	Sangat Tinggi	Rendah	C
2.08.07.202 penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani	orang	112.0%	54.1%	Sangat Tinggi	Rendah	C
Program: 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)							
Program: 2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	%	98.4%	85.8%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.08.06.202 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Dilayani	Orang	96.0%	85.8%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Program: 2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga							

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
Program: 2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase pengaduan pada Puspaga yang ditindaklanjuti	%	100.0%	90.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.08.04.201 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Dilayani	Keluarga	880.0%	90.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.08.04.203 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Keluarga yang Dilayani	Keluarga	880.0%	90.4%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B / Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Jawa Timur								
Program: 06.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Program: 06.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase OPD yang dievaluasi SAKIP nya dengan kategori peringkat minimal BB	%	100.0%	54.5%	Sangat Tinggi	Rendah	C
		Nilai Komponen Perencanaan Pada SAKIP Daerah	Poin	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
Indikator: 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) \geq B								
Program: 5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan								
Program: 5.05.02 Program Penelitian dan Pengembangan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	0.0%	97.6%	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	KB



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
	5.05.02.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Laporan	100.0%	97.1%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
	5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Laporan	200.0%	97.1%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Indikator: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	97.8%	83.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
---	--	----------------------------------	--------	-------	-------	---------------	--------	---

Indikator: 16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan

Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program: 02.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	100.3%	83.0%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
---	--	---------------------------------	--------	--------	-------	---------------	--------	---

Indikator: 16.9.1 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur

Program: 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	94.5%	0.0%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	KB
Indikator: 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun							
Program: 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk							
Program: 2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	%	99.2%	85.8%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.12.02.2.01 Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dokumen	115.5%	95.6%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.12.02.2.02 Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan	Jenis	0.0%	0.0%	Sangat Rendah	Sangat Rendah	SKB
2.12.02.2.03 Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah kecamatan yang menyelenggarakan pendaftaran penduduk sesuai standar	Kecamatan	100.0%	73.0%	Sangat Tinggi	Sedang	C
2.12.02.2.04 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jenis	100.0%	90.3%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Program: 2.12.03 Program Pencatatan Sipil							
Program: 2.12.03 Program Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	%	96.2%	95.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
2.12.03.2.01 Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta pencatatan sipil yang diterbitkan	Jumlah	157.1%	95.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan							
Program: 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan							
Program: 2.08.03 Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 penduduk perempuan)	angka	166.7%	77.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.08.03.210 Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	orang	96.0%	77.7%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
2.08.03.202 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang dilayani sesuai standar	orang	80.0%	77.7%	Tinggi	Tinggi	B
2.08.03.203 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten Daerah/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	kali	100.0%	89.2%	Sangat Tinggi	Tinggi	B
Indikator: 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif							
Program: 2.16.03 Program Aplikasi Informatika							
Program: 2.16.03 Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang	%	100.0%	98.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		diselenggarakan secara online dan terintegrasi						
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo	%	100.0%	99.8%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	214.3%	98.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB
Indikator: 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan								
Program: 2.16.02 Program Informasi dan Komunikasi Publik								
Program: 2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	%	95.9%	99.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB

Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator	Satuan	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Serapan Anggaran	Kode Evaluasi Program
		pemerintah daerah Kabupaten/Kota						
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	133.3%	99.0%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	SB



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian Pengembangan
Kabupaten Tuban

KANTOR
SUPAT TUBAN